

ISSN 1693-8925



9 771693 892128

- Increasing Students Listening by Using Slide of Picture at STKIP PGRI Pasuruan: Lesson Study for High Level Education
- Penerapan Konsep Pendidikan Berkarakter dari Teori Kecerdasan Daniel Goleman di SMKN 5 Kota Surabaya
- Kajian tentang Rencana Implementasi Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014
- Pendekatan Pragmatis Olah Bentuk Mebel Multifungsi Bagi Anak Usia Dini
- Kepuasan Pengguna Potensial terhadap Koleksi dan Layanan Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo  
*(The Satisfaction of Potential Users to The Service and collection of Books in The Library of STIKES Dr. Soetomo Hospital Foundation)*
- Gambaran Pelaksanaan JKN Melalui Cara Pembayaran, Asal Rujukan dan Jumlah Kunjungan Pasien (Studi di Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo Tahun 2014)  
*(Overview of JKN Through Payment, Origin, Reference Number of Visits (Study in Outpatient Dr. Soetomo Hospital 2014))*
- Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Masa Tugas Kepala Sekolah Setelah Ditetapkan di Kabupaten Lumajang  
*(Implementation of Regulation of the Minister of National Education Number 28 of 2010 Concerning the Duration of Principal Duties after Set District Lumajang)*
- Penerapan HAPA dan Dimensi Mutu (RATER) Dalam Rangka Evaluasi Nilai IPK Mahasiswa (Studi di Prodi S1 ARS Stikes Yayasan RS Dr. Soetomo)  
*(Implementation of HAPA and RATER in Order to Evaluation GPA Students)*
- Perdagangan Bebas dan Kesenjangan Kelas Sosial di Indonesia (Fokus Kajian Kerja Sama AFTA, IJEPA dan CAFTA)
- Model CSR Pariwisata di Surabaya
- Keberhasilan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Pacangaan Kecamatan Pangarengan Sampang
- The Speech Act Analysis of the Recorded Conversation Between Artalyta and Top Prosecutor

### **Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) Wilayah VII**

J. Humaniora	Vol. 12	No. 2	Hal. 117–197	Surabaya Des 2015	ISSN 1693-8925
--------------	---------	-------	--------------	----------------------	-------------------

# HUMANIORA

Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora

Volume 12, Nomor 2, Desember 2015

---

---

Diterbitkan oleh Kopertis Wilayah VII sebagai terbitan berkala yang menyajikan informasi dan analisis persoalan ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora.

Kajian ini bersifat ilmiah populer sebagai hasil pemikiran teoritik maupun penelitian empirik. Redaksi menerima karya ilmiah/hasil penelitian atau artikel, termasuk ide-ide pengembangan di bidang ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora. Untuk itu HUMANIORA mengundang para intelektual, ekspertis, praktisi, mahasiswa serta siapa saja berdialog dengan penuangan pemikiran secara bebas, kritis, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Redaksi berhak menyingkat dan memperbaiki karangan itu sejauh tidak mengubah tujuan isinya. Tulisan-tulisan dalam artikel HUMANIORA tidak selalu mencerminkan pandangan redaksi. Dilarang mengutip, menerjemahkan atau memperbanyak kecuali dengan izin redaksi.

---

---

**PELINDUNG**

Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA  
*(Koordinator Kopertis Wilayah VII)*

**REDAKTUR**

Prof. Dr. Ali Maksum  
*(Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VII)*

**PENYUNTING/EDITOR**

Prof. Dr. V. Rudy Handoko, MS  
Dr. Slamet Suhartono, SH., M.Hum  
Dr. Ignatius Harjanto, M.Pd  
Drs. Ec. Purwo Bekti, M.Si  
Drs. Supradono, MM  
Drs. Budi Hasan, SH., M.Si  
Suyono, S.Sos, M.Si  
Thohari, S.Kom.

**DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER**

Dhani Kusuma Wardhana, A.Md.; Sutipah

**SEKRETARIS**

Tri Puji Rahayu, S.Sos.; Soetjahyono

---

---

**Alamat Redaksi:** Kantor Kopertis Wilayah VII (Seksi Sistem Informasi)  
Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya  
Telp. (031) 5925418-19, 5947473 psw. 120 Fax. (031) 5947479  
Situs Web: <http://www.kopertis7.go.id>, E-mail: [jurnal@kopertis7.go.id](mailto:jurnal@kopertis7.go.id)



# HUMANIORA

Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora

Volume 12, Nomor 2, Desember 2015

## DAFTAR ISI (CONTENTS)

	Halaman ( <i>Page</i> )
1. Increasing Students Listening by Using Slide of Picture at STKIP PGRI Pasuruan: Lesson Study for High Level Education <b>Ninik Suryatiningsih</b> .....	117–121
2. Penerapan Konsep Pendidikan Berkarakter dari Teori Kecerdasan Daniel Goleman di SMKN 5 Kota Surabaya <b>Citra Nurmalita, Mohammad Ari Wibowo</b> .....	122–126
3. Kajian tentang Rencana Implementasi Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 ( <i>Study of Plan Implementation the Law of Village Number 6, 2014</i> ) <b>Endah Wahyuningsih</b> .....	127–132
4. Pendekatan Pragmatis Olah Bentuk Mebel Multifungsi Bagi Anak Usia Dini <b>Mariana Wibowo, Gabrielle S Wangsawidjaja</b> .....	133–144
5. Kepuasan Pengguna Potensial terhadap Koleksi dan Layanan Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo ( <i>The Satisfaction of Potential Users to The Service and collection of Books in The Library of STIKES Dr. Soetomo Hospital Foundation</i> ) <b>Widi Astuti</b> .....	145–152
6. Gambaran Pelaksanaan JKN Melalui Cara Pembayaran, Asal Rujukan dan Jumlah Kunjungan Pasien (Studi di Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo Tahun 2014) ( <i>Overview of JKN Through Payment, Origin, Reference Number of Visits (Study in Outpatient Dr. Soetomo Hospital 2014)</i> ) <b>Anif Prasetyorini</b> .....	153–158
7. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Masa Tugas Kepala Sekolah Setelah Ditetapkan di Kabupaten Lumajang ( <i>Implementation of Regulation of the Minister of National Education Number 28 of 2010 Concerning the Duration of Principal Duties After Set District Lumajang</i> ) <b>Titik Sri Astutik</b> .....	159–165
8. Penerapan HAPA dan Dimensi Mutu (RATER) Dalam Rangka Evaluasi Nilai IPK Mahasiswa (Studi di Prodi S1 ARS STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo) ( <i>Implementation of HAPA and RATER in Order to Evaluation GPA Students</i> ) <b>Muhammad Risya Rizki</b> .....	166–171

9. Perdagangan Bebas dan Kesenjangan Kelas Sosial di Indonesia (Fokus Kajian kerja sama AFTA, IJEPA dan CAFTA) <b>Robby Darwis Nasution</b> .....	172–177
10. Model CSR Pariwisata di Surabaya <b>Agoes Tinus Lis Indrianto, M. Tourism dan I Dewa Gde Satrya</b> .....	178–183
11. Keberhasilan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Pacanggaan Kecamatan Pangarengan Sampang <b>Triana Dianita Handayani</b> .....	184–191
12. The Speech Act Analysis of the Recorded Conversation Between Artalyta and Top Prosecutor <b>Supeno</b> .....	192–197

## PANDUAN UNTUK PENULISAN NASKAH

---

Jurnal ilmiah HUMANIORA adalah publikasi ilmiah enam bulanan yang diterbitkan oleh Kopertis Wilayah VII. Untuk mendukung penerbitan, selanjutnya redaksi menerima artikel ilmiah yang berupa hasil penelitian empiris dan artikel konseptual dalam bidang ilmu Sosial dan Humaniora.

Naskah yang diterima hanya naskah asli yang belum pernah diterbitkan di media cetak dengan gaya bahasa akademis dan efektif. Naskah terdiri atas:

1. Judul naskah maksimum 15 kata, ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris tergantung bahasa yang digunakan untuk penulisan naskah lengkapnya. Jika ditulis dalam bahasa Indonesia, disertakan pula terjemahan judulnya dalam bahasa Inggris.
2. Nama penulis, ditulis di bawah judul tanpa disertai gelar akademik maupun jabatan. Di bawah nama penulis dicantumkan instansi tempat penulis bekerja.
3. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tidak lebih dari 200 kata diketik 1 (satu) spasi. Abstrak harus meliputi intisari seluruh tulisan yang terdiri atas: latar belakang, permasalahan, tujuan, metode, hasil analisis statistik, dan kesimpulan, disertakan pula kata kunci.
4. Artikel hasil penelitian berisi: judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, materi, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka.
5. Artikel konseptual berisi: judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, analisis (kupasannya, asumsi, komparasi), kesimpulan dan daftar pustaka.
6. Tabel dan gambar harus diberi nomor secara berurutan sesuai dengan urutan pemunculannya. Setiap gambar dan tabel perlu diberi penjelasan singkat yang diletakkan di bawah untuk gambar. Gambar berupa foto (kalau ada), disertakan dalam bentuk mengkilap (gloss).
7. Pembahasan berisi tentang uraian hasil penelitian, bagaimana penelitian yang dihasilkan dapat memecahkan masalah, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi hasil penelitian dan disertai pustaka yang menunjang.
8. Daftar pustaka, ditulis sesuai aturan penulisan Vancouver, disusun berdasarkan urutan kemunculannya bukan

berdasarkan abjad. Untuk rujukan buku urutannya sebagai berikut: nama penulis, editor (bila ada), judul buku, kota penerbit, tahun penerbit, volume, edisi, dan nomor halaman. Untuk terbitan berkala urutannya sebagai berikut: nama penulis, judul tulisan, judul terbitan, tahun penerbitan, volume, dan nomor halaman.

### Contoh penulisan Daftar Pustaka:

1. Grimes EW, **A use of freeze-dried bone in Endodontic**, J. Endod, 1994: 20:355–6
2. Cohen S, Burn RC, **Pathways of the pulp. 5<sup>th</sup> ed.**, St. Louis; Mosby Co 1994: 127–47
3. Morse SS, **Factors in the emergence of infectious disease**. Emerg Infect Dis (serial online), 1995 Jan-Mar, 1(1): (14 screen). Available from: URL: <http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm>. Accessed Desember 25, 1999.

Naskah diketik 2 (dua) spasi 12 pitch dalam program MS Word dengan susur (margin) kiri 4 cm, susur kanan 2,5 cm, susur atas 3,5 cm, dan susur bawah 2 cm, di atas kertas A4.

Setiap halaman diberi nomor halaman, maksimal 12 halaman (termasuk daftar pustaka, tabel, dan gambar), naskah dikirim sebanyak 2 rangkap dan 1 (CD)/E-mail: [jurnal@kopertis7.go.id](mailto:jurnal@kopertis7.go.id).

Redaksi berhak memperbaiki penulisan naskah tanpa mengubah isi naskah tersebut. Semua data, pendapat atau pernyataan yang terdapat pada naskah merupakan tanggung jawab penulis. Naskah yang tidak sesuai dengan ketentuan redaksi akan dikembalikan apabila disertai perangko.

Naskah dapat dikirim ke alamat:

### Redaksi/Penerbit:

Kopertis Wilayah VII  
d/a Seksi Sistem Informasi  
Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya  
Telp. (031) 5925418-19, 5947473 psw. 120  
Fax. (031) 5947479  
E-mail: [jurnal@kopertis7.go.id](mailto:jurnal@kopertis7.go.id)  
Homepage: <http://www.kopertis7.go.id>,



# Increasing Students Listening by Using Slide of Picture at STKIP PGRI Pasuruan: Lesson Study for High Level Education

**Ninik Suryatiningsih**  
 STKIP PGRI Pasuruan  
 Email: ninik.suryatiningsih@gmail.com

## ABSTRACT

*Teaching listening at STKIP PGRI Pasuruan always challenging time to time, one of the teachers effort by using Lesson study. Lesson study adopted Classroom Action Research Design that is one of the study related to the students problems and strategies to solve that design by the teacher teams. The design is Plan (what the strategy), and Do (related to Open Class that observers observe the process of the teaching learning and the last is See (reflection) to know the obstacle that face by the teachers' model and how to solve this problem to revise the plan for next teaching. To implementing this lesson study need four times meetings. The result of this study reflects from the first up the fourth open class that the team found a few students un interested to the material and got difficulties to group discussion, so that the team change the group members, and revise plan. Finally, as the teacher we always attempt to solve the students problems so that the process of teaching listening will run well.*

**Key words:** lesson study, teaching listening

## BACKGROUND

Listening is one of the four language skills that must be mastered by the students. This skill often taught as the most difficult one. Especially for Indonesian students who have English listening. It is considered to be strange for them to listen an English dialogue. Listening is an act of hearing attentively and the process of receiving, attending and understanding auditory messages. Those messages are transmitted through the medium of sound.

Listening is often taught to the hardest language skill. According to Nadig (1999) that people were given two ears but only one mouth, because listening is twice as hard as talking. The statement is actually a description. But, it has a deep interpretation that listening is very hard.

According to Schwartz (2007) that listening is the language modality that is used most frequently. Everyday, people's ears work to catch many sounds from other people, both from direct communication or from media like television or radio. Even, it is true when people said that mouth works less than ears. He also stated that adult spend almost half of their communication time to listen. Listeners often must process messages as they come, even they are still processing what they have just heard, without backtracking or looking ahead.

Listening also as direct communication among people. According to Mindtool (2005) that people listen to obtain information, to understand, for enjoyment, and listen to becoming a good listener, people will improve their productivity, as well as their ability to influence, persuade negotiate. Moreover, they will avoid conflict and misunderstandings.

Listening comprehension introduce to the English Department students of STKIP PGRI Pasuruan from one to the fourth semester. The description of Listening comprehension 2 is to develop the student's ability to understand spoken English of pre intermediate level; literal, inferential, and evaluative comprehension of dialogue, narrative and descriptive types of texts, comprehension of main ideas and detail.

After gathered the second semester students problems, the team found that C class need more attention and solve their problem as soon as possible. So, lesson study will apply for C class that consists of 32 students. Some of them are less to concentrate or to catch the meaning from dialogue, also they less motive to learning listening. The research purposes is increasing the students listening comprehension 2 through slide of picture. The teaching of listening will use the slide of picture as a media that selected by the teachers team, hopefully by using slide of picture will help the students to motivate to learn and active to the teaching learning process.

## REVIEW OF RELATED LITERATURE

Teacher sometimes rely too heavily on published materials, often forgetting with a bit of theory and creativity you can get great results (Hegarty, 2006). Actually the teacher can help their students to develop their listening skills by using either for a few paper slips. Another opinion that the effective way in teaching listening was uttered by Murilo (2009) that teacher can change the stress distribution and have them notice how this affect meanings. He could alternatively have

them practice doing the task with a partner- which would have the added benefit of allowing them to work on pronunciation and listening interactively. When teacher teach listening, they need the language system (our knowledge of language, grammar and vocabulary) also the use of the language system (the skills of language use). Teacher can also help students become more effective listening by making them aware of the different kinds of listening, the different for listening, and the qualities of good listeners. Wolvin and Coakley (1992) identify four different kinds of listening, such as: (1) comprehensive (informational) listening that the students listen for the content of the message, (2) critical (evaluative) listening that the students judge the message, (3) appreciative (aesthetic) listening that the students listen for enjoyment and (4) therapeutic (empathetic) listening that the students listen to support others but not judge them.

As like teaching other skills to the students, a teacher need to consider the steps in teaching and learning process. According to NCLRC (2004), there are four steps that a teacher should do to have a better result of teaching listening. Those are ; making a preparation, pre-listening, whilst-listening and post-listening. Related to preparation, Andreas (2008) gave some factors to considered during the preparation. (1) how is the information organized? Does the story line, narrative, or instruction conform to familiar expectations? (2) how familiar are the students with the topic? (3) does the text contain redundancy? (4) does the text involve multiple individuals and objects? Etc. Based on the preparation, a teacher should do the pre-listening activities to stimulate the students' mind about the material of the listening. The activities may do during pre-listening are: (1) assess students background knowledge of the topic and linguistic content of the text, (2) provide students with the background knowledge necessary for their comprehension of the listening passage or activities the existing knowledge that the students possess, (3) clarify any cultural information which may be necessary to comprehend the passage, and (4) make students aware of type of text they will be listening to, the role they will play, and the purposes for which they will be listening. Brown (2006) added the activation of prior knowledge for improved listening comprehension, the teacher introduce several concepts from the cognitive views of language teaching including schema, scripts and top down/bottom up processing. He said that top down means using our prior knowledge and experiences, we know certain things about certain topics and situations and use that information to understand. While bottom up processing means using the information we have about sounds, word meanings, and discourse markers like first, then and after to assemble our understanding of what we read or hear one step at a time. Richards (2008), to understanding spoken discourse using bottom-up and top down processing, also combining bottom up and top down listening in a listening session. According to King (1984:177) that students need to understand the act of listening requires not just hearing but

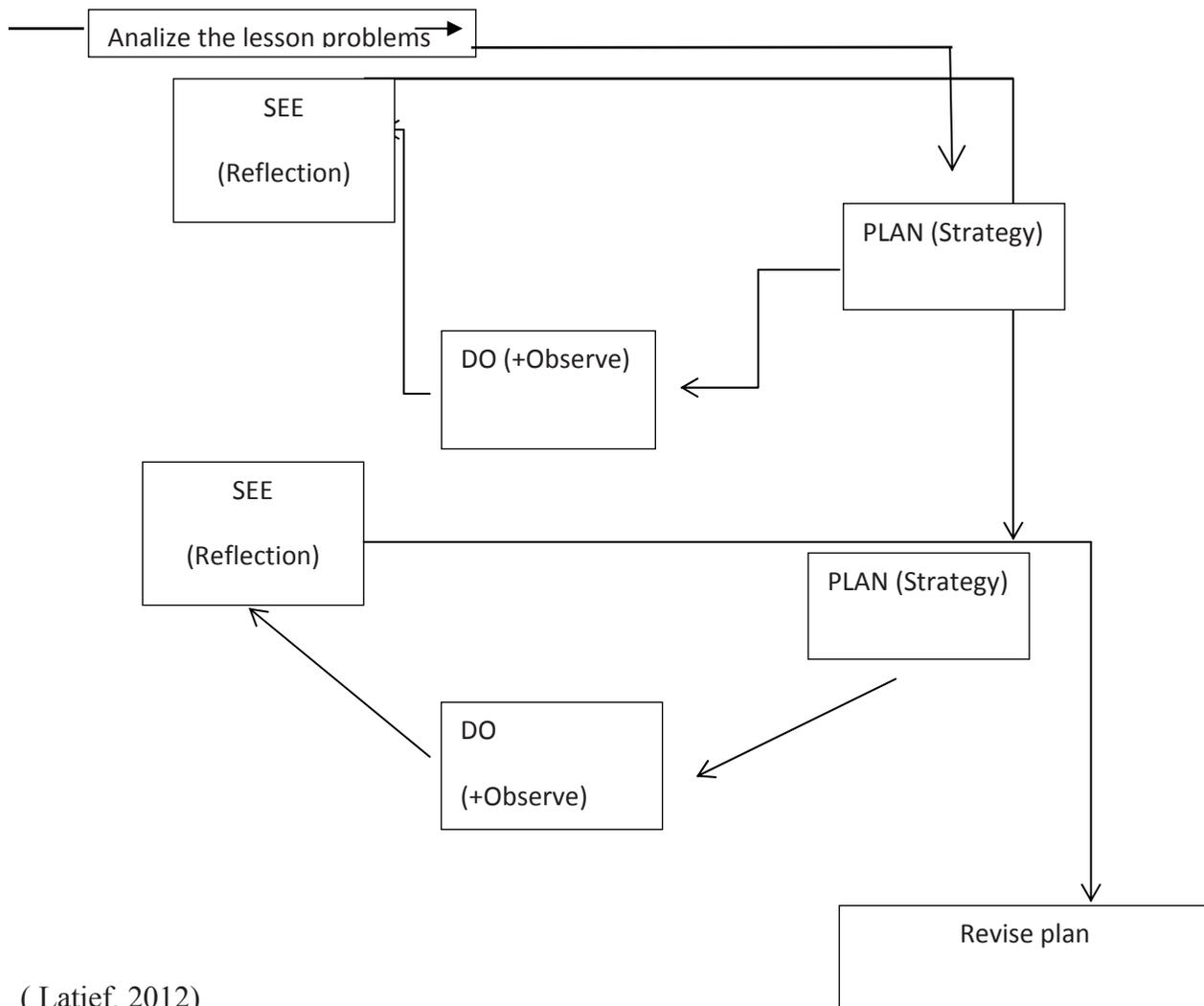
thinking, as well as good deal of interest and information which both speaker and listener must have in common. After conducting the pre-listening activities, the teacher may go on to the whilst-listening. The activity is usually called the body of the listening process. Asher (2008) stated that whilst-listening activities relate directly to the text, and students do them during or immediately after the time they are listening. Temple and Gilet (1989:55) gave the following mental activity during listening, such as: connect (make connection with people, places, situations, and ideas they know, find meaning (determine what the speaker is saying about people, places, and ideas, question (pay attention to those words and ideas that are unclear, and so on. Before the class end, the teacher should have the post-listening activities. According to Asher (2008), a teacher can use post-listening activities to check comprehension, evaluate listening skills and use of listening strategies, and extend the knowledge gained to other contexts. A post-listening activity may relate to a pre-listening activity, such as predicting; may expand on the topic or the language of the listening text; or may transfer what has been learned to reading, speaking or writing activities.

There are many kinds of media that are used in teaching English. The media can be taken from many sources such as picture, card, boards and so on. According to Kasbolah and Yuswotomo in Kholek (2007), media can classified into three parts, they are: audio aids such as radio, tape recorder, record player (songs, operas, speeches, etc); visual aids such as black or white board, picture files, wall chart, flash card, etc and Audio Visual Aids such as television, video or film projector. Gerlach and Elly (1980) divided media into five parts, which are: (1) still picture (photograph of any object or event constitute still picture, it may appear as textbook illustration as bulletin, board material as a slide, etc, (2) audio recordings, (3) motion picture, (4) television, (5) real things, simulations and models.

The objectives of using slide of pictures in teaching listening as Fitria (2002) said that by using picture more real and students understand about the object that to be discussed also can help them to solve their border the topics, more easier, cheapest and etc.

#### RESEARCH METHODS

This research was used closely to Classroom Action research, but we called as Lesson study program. Lesson study is a design of teacher profession design based on the education research collaboratively based on the collegialities and mutual learning for build learning communities (Sumar 1996 in Latief, 2012). Lesson study was implemented more than 100 years at Japanese schools and nowadays cropping up around the world (Maryoto, 2008). Lesson study come from Japanese word means, *jugyokenkyo* is a study on the teaching learning, *Jugyo* is lesson/learning and *kenkyu* is a research. The effect of this lesson study is the teacher/lecturer/tutor who usually to introvert person (to shy to be observed



(Latief, 2012)

when they are teaching) became confident and common to be observed in the classroom. The stages of Lesson study itself are as follows:

First, the team try to find out the lesson problem, then identified the problem and design the strategy, media for teaching to solve that problem, after that the team design a PLAN (Plan is design by the model, teams related to what strategy, media and material, also the assessment), continued to DO (implementing the lesson plan by the teachers' model in classroom with many observers) the last is SEE (reflection) what the observers result related to teaching learning and get another solution to revise PLAN for the next Open Class (Latief, 2012)

This research was done in STKIP PGRI Pasuruan, which are the students of English Department for the second semester consists of 32 students, which are 4 boys and 28 girls.

The research instruments that was used are Observation sheets, interview, questionnaire, test documentation.

Observation; the researcher used observation sheet that are the sequence of teaching steps and the students movement

while teaching. The observation was done at June 28<sup>th</sup> 2013, July 5<sup>th</sup> 2013, 24 and 27 July 2013.

Interview that used is open interview or direct interview to students toward the teaching listening that day, the was happened for ever meetings.

Questionnaire was used to know the students opinion toward teaching listening, that also happened at four times for every meetings.

Test was given to the students after teaching learning for every two meetings. The test is about the students understanding listening comprehension.

#### FINDING AND DISCUSSION

There are four open class during teaching learning, the explanation as follows:

**The first open class** was done on Friday, at June 28 2013, the activities was started at 10 o'clock up to 11.40. The teaching listening at room 1 with teacher's team 8 persons which are students attended was 30 students. Based on the

observation result that; (1) students are active even a few seems do not understand the models' instructions, (2) there is a student that do nothing and only copying from their friend, yawning, (3) from all participants look motivated to joining the teaching listening, even a student seem confused the model explanations. Another side, the team consist of 8 person, which is 1 person become a model, 3 persons as the observer, 1 person as fasilitator, 1 person as notulist, and 1 person as moderator. During observations, the observer sat behind the students chairs, the left and the right side of them that is not influence them. A few times the observer come close to the students to check the students activities gave note during discussion session. Based on the reflection session, that team found, (1) review the plan of teaching should clear and complete are needed to teaching activities, (2) a few students seem got difficulties to get the teacher instructions. Otherwise, to solve this problems, the team suggestions are (1) the facilities un supported the teaching learning, (2) the students chairs un effective for their interaction and discussion. The result of the students test are only 40 % from them achieve the criteria of success.

**The second open class** was done on Friday at July 5 2013, the teams was 5 persons which 21 students. The result of the observation are; (1) un matching between the lesson plan and the implementation in the classroom, while the model explain the material, the student sit at the back look un concentrate and confuse, (2) even the model played the CD third times, there were student still did not meaning and misunderstanding the dialogue. To solve this problem, the team suggest the model to gave the key words before play the CD to make them easy to get the meaning and answer the questions, (3) there is one student sit at the back only copying the answers from their friends. The solution is the model should active to approach the student and always asked them whenever they did not the meaning. The last suggestions from the teams is to design the students chair to cover their boring. For discussion session, its better divided them into heterogeneous not randomly. For the next plan, the team tried to get more detail of picture as variation. The result of the students test shows that 65% of them can pass the criteria of success.

**The third open class** was done on Wednesday, at July 24 2013, the teaching listening was held at the language laboratory room. The teams was 8 persons, which are 30 students. The observation result from teaching listening are (1) there is one student late and he disturb the other concentration when warming up session, (2) students chair are made them can not interact with their friend when during discussion session, (3) a few students seems un concentrate so that when answering the questions from the model. The problems during teaching listening such as (1) students seem un comfortable because their chair style, (2) the facilities at the lab are less to teaching listening, so its need renovation/rebuilt and adding more facilities to support the

teaching listening. The result of the students test shows that 70% of them pass the criteria of success.

**The fourth open class** was done on Saturday, at July 27 2013, the teaching listening still at the language laboratory with the teams of 8 persons, which are 30 students. The observation result are: (1) only one students active or dominate the class, the rest of the students are lack of motivation to learn, (2) student no 16 look confuse because she can not found the students worksheet that the model want, (3) student no 40 seems to cover his face with paper, to shy to face the model or their friends. The problem appear during teaching listening such as (1) the slide of picture that shows by the LCD unclear and need another LCD to support the teaching listening process, (2) a few students look confuse because many cameras around them recorded their activities, (3) mostly students active during teaching listening so the team suggest the model to more creative to create media or strategy to increase the students listening. The result of the students test shows that 80% of them pass the criteria of success. So the lesson study was stopped.

#### DISCUSSION

Based on the first open class that (1) un matching between the lesson plan and the implementation in the classroom, while the model explain the material, the student sit at the back look un concentrate and confuse, (2) even the model played the CD third times, there were student still did not meaning and misunderstanding the dialogue. To solve this problem, the team suggest the model to gave the key words before play the CD to make them easy to get the meaning and answer the questions, (3) there is one student sit at the back only copying the answers from their friends. The solution is the model should active to approach the student and always asked them whenever they did not the meaning. The last suggestions from the teams is to design the students chair to cover their boring. That suitable with the statement from Murilo (2009) that teacher can change the stress distribution and have them notice how this affect meanings. He could alternatively have them practice doing the task with a partner-which would have the added benefit of allowing them to work on pronunciation and listening interactively. Also for the second open class that even the model played the CD third times, there were student still did not meaning and misunderstanding the dialogue. To solve this problem, the team suggest the model to gave the key words before play the CD to make them easy to get the meaning and answer the questions, (3) there is one student sit at the back only copying the answers from their friends. The solution is the model should active to approach the student and always asked them whenever they did not the meaning. According to King (1984:177) that students need to understand the act of listening requires not just hearing but thinking, as well as good deal of interest and information which both speaker and

listener must have in common. And the rest of the meetings can be explained that mostly students active during teaching listening so the team suggest the model to more creative to create media or strategy to increase the students listening.

#### CONCLUSION

From the process of lesson study above, the researcher concluded that by using slide of picture can increase the students listening ability specially listening comprehension 2. As an example from the first open class that the model use advertisement from the internet as media but the learning achievement can not approve because the lack of facilities to support the teaching listening, so that the next open class the model use the slide of picture to increase the students motivation to learning listening. The main points is how to get the students attention and their curiosity to learning listening well.

#### REFERENCES

1. Nadig, Larry Alan. 1999. **Effective teaching Listening**. (online), (<http://wikionline.com>, accessed on September 2013).
2. Schwartz. 2007. **The definition of Listening** (online) (<http://www.celta-cause.com>) assessed on September 20, 2013.
3. Mindtool. 2005. **Active Listening/hear what people are saying** (online) (<http://mindtool.com>) assessed on September 20, 2013.
4. Hegarty, Paul. 2006. **Motivation tips in listening** (online) (<http://eslteacherabout.com>) assessed on September 25, 2013.
5. Wolvin and Coakley. 1992. **English language arts 10-teaching and learning strategies-listening** (online) (<http://www.sasked.gov.sk.ca>) assessed on September 20, 2013.
6. The National Capital Language Resource Center. 2004. **Goals and technique for teaching listening** (online), (<http://www/nclrc.com>) assessed on September 20, 2013.
7. Asher, Andreas. 2008. **Steps in Listening activities/preparation (online)** (<http://wikionline.com>) assessed on September 20, 2013.
8. Brown, Steven. 2006. **The effect of Using pictures in teaching learning process on the students mastery of vocabulary at SDN Pogar II Bangil**. Unpublished Thesis. STKIP PGRI Pasuruan.
9. Richards, Jack R. 2008. **Teaching listening and speaking**. Cambridge University Press.
10. King. 1984. **English Language Art 10 Teaching and Learning strategies-listening**, (online) (<http://www.sasked.gov.sk.ca>) assessed on September 10, 2013.
11. Temple and Gillet. 1989. **English language Art 10 Teaching and learning strategies listening** (online), (<http://www.sasked.gov.sk.ca>) assessed on September 10, 2013.
12. Kholek, Abdul. 2007. **Study on the teaching listening in SMU Sunan Giri Probolinggo**. Unpublished Thesis STKIP PGRI Pasuruan.
13. Gerlach, Vernon S, & Elly, Donald. 1980. **Teaching and media: a systematic approach. Second edition**. Engle Wooddoff: Prentice Hall
14. Ken, Kanagawa. 2004. **Teaching Listening Better: Is Listening being taught as well as it could be?** (online) (<http://www.abax.co.jp>) assessed on September 20, 2013.
15. Latief, Mohammad Adnan. 2012. **Research Methods on Language learning**. UM Press.
16. Maryoto, Gunawan. 2008. **Lesson Study Jawa Pos** (16 Januari 2008).
17. Fitria, Lailatul. 2003. **The effect of using picture in teaching learning process on the students' mastery of Vocabulary at SDN Pogar II Bangil**. Unpublished thesis STKIP PGRI Pasurun.

# Penerapan Konsep Pendidikan Berkarakter dari Teori Kecerdasan Daniel Goleman di SMKN 5 Kota Surabaya

Citra Nurmalita; Mohammad Ari Wibowo

Dosen STKIP-PGRI Sampang

e-mail: citranurmalita@ymail.com; blackinako@gmail.com

## ABSTRAK

Minimnya penerapan pendidikan berkarakter dari teori kecerdasan Daniel Goleman pada siswa SMK mengakibatkan kurangnya pengetahuan tentang pendidikan berkarakter yang cerdas emosi meliputi kesadaran diri (KD), pengaturan diri (PD), motivasi diri (MD), empati diri (EM) dan keterampilan sosial (KP). Penelitian dilakukan pada jenjang SMK kelas II di SMKN 5 Surabaya, data diperoleh melalui: 1. dokumentasi, 2. observasi, 3. wawancara. Sesuai dengan permasalahan digunakan analisis data dengan mengadakan interpretasi data, dan membuat coding yang berupa data matrikulasi dari indikator secara deskriptif kuantitatif untuk mendapatkan hasil data analisis teori kategori kecenderungan dari pengaruh kecerdasan emosional pada siswa. Penelitian ini membuktikan bahwa, KD, PD, MD, EM, dan KP dapat mempengaruhi kecerdasan emosional (KE) siswa di kelas saat KBM berlangsung. KE berpengaruh positif dan signifikan dengan menggunakan metode regresi ganda (multiple regression) yang dilanjutkan dengan uji T.

**Kata kunci:** Pendidikan Berkarakter, Teori Kecerdasan Daniel Goleman

## ABSTRACT

The lacks of implementation character education of the theory of intelligence Daniel Goleman on vocational students resulted in a lack of knowledge about the emotionally intelligent character education includes self-awareness (KD), self-regulation (PD), self-motivation (MD), self empathy (EM) and social skills (KP). The study was conducted on a level II class at vocational study SMKN 5 Surabaya, the data obtained through: 1. documentation, 2. observation, 3. interview. In accordance with the problems of data analysis is used to hold data interpretation, and make coding in the form of data descriptive of the matriculation of quantitative indicators to obtain the results of the data analysis of the tendency of category theory of emotional intelligence influence on students. This study proves that, KD, PD, MD, EM, and KP can affect emotional intelligence (KE) students in class when teaching takes place. KE positive and significant effect by using multiple regression method (multiple regression), followed by T. test

**Key words:** Character Education, Theory of Intelligence Daniel Goleman

## PENDAHULUAN

Terkait upaya mewujudkan pendidikan karakter yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005–2015, dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional--UUSPN).

Menurut Goleman (2006: 4), EQ sama ampuhnya dengan IQ, di mana apabila seorang siswa memiliki EQ yang baik pada saat kegiatan belajar mengajar (KBM) Menggambar Perangkat Lunak Cad Tingkat Lanjut (MPL-TL), maka untuk kepentingan-kepentingan yang lain semisal IQ atau untuk kemampuan kognitif dan psikomotorik seorang siswa akan terlaksana dengan baik pula.

Penelitian ini difokuskan pada Mata Diklat MPL-TL sebagai kegiatan penunjang dari penerapan pendidikan berkarakter teori Goleman, pembelajaran ini lebih mengandalkan kemampuan afektif, kognitif serta psikomotorik peserta didik dalam menggambar perangkat lunak untuk meningkatkan kemampuan keterampilan menggambar siswa sebagai modal utama peserta didik bekerja sebagai seorang *drafter* atau juru gambar yang memiliki karakter baik untuk menunjang kesuksesan dalam pekerjaannya.

Manfaat yang diambil dari penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dan masukan bagi masyarakat dalam memahami kecerdasan emosi Goleman untuk diterapkan pada proses pembelajaran dan memberikan langkah alternatif dalam proses pembentukan pribadi berkarakter yang cerdas emosi.

## MATERI DAN METODE

Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif-kuantitatif, data dianalisis

menggunakan teknik pengumpulan data yang bervariasi atau triangulasi (gabungan), dilakukan secara kontinyu sampai data jenuh dan menghasilkan hasil data matrikulasi untuk mengetahui kecenderungan (*skewness*), untuk mendeskripsikan pelaksanaan konsep pendidikan karakter dari teori kecerdasan Goleman. Batasan variabel penelitian ini disederhanakan dengan pembuatan *coding* dari variabel lima indikator wilayah kecerdasan emosional (KE) yaitu kesadaran diri (KD), pengaturan diri (PD), motivasi diri (MD), empati diri (EM), keterampilan sosial (KP). Analisis data ini meneliti hubungan antara indikator dari lima wilayah ciri-ciri KE yaitu KD, PD, MD, EM, KP dengan KE itu sendiri per-independen dari masing-masing indikator KE dengan KE itu sendiri. Untuk mengetahui hubungan dari variabel keduanya dengan dianalisis menggunakan SPSS 15.0 for Windows Evaluation Version.

Dari hasil analisis data yang dilakukan akan diinterpretasikan dalam bentuk paragraf untuk membahas kecerdasan emosional dari tiap siswa kelas II BG-3 untuk ditelaah dan mencoba menganalisis pengaruh konsep kecerdasan emosional dari teori Daniel Goleman dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM) menggambar gambar bangunan.

#### HASIL PEMBAHASAN

Analisis dari variabel KD siswa pada saat KBM gambar bangunan dilaksanakan didapatkan bahwa KD siswa atau kemampuan untuk mengenali emosi diri sendiri siswa dari hari pertama penelitian hingga hari terakhir yaitu pada tanggal 25 April 2012 menunjukkan bahwa keinginan siswa di kelas II BG-3 untuk bersikap terbuka (mau terus belajar dan mengembangkan diri) menunjukkan angka yang cukup besar dibandingkan dengan *sub*-indikator lain yang meliputi berani tampil dengan keyakinan, mampu menunjukkan rasa humor dan tegas (mampu membuat keputusan yang baik), ini berarti bahwa minat untuk keinginan terus belajar menggambar CAD rumah bertingkat sangat besar, didukung dengan kebiasaan siswa untuk saling mengajarkan satu dengan yang lainnya, dengan mereka saling mengajarkan banyak pengembangan-pengembangan baru yang akan didapat dari saling berdiskusi ataupun saling bertanya satu dengan yang lainnya.

Hasil analisis data pada variabel PD memiliki nilai positif bahwa pelaksanaan proses KBM CAD di kelas II BG-3 mampu membuat seluruh siswa merasa terhibur, melepaskan kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan yang siswa bawa dari luar ruangan CAD. Data yang dihasilkan dengan merujuk pada hasil pengamatan dan wawancara kepada 29 orang siswa menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang merasa tidak senang pada saat diklat CAD berlangsung. Berdasarkan nilai kategori kecenderungan disimpulkan bahwa untuk pengaturan diri di kelas II BG-3 yang meliputi

pada pandai mengelola emosi, mampu berpikir positif, memelihara norma kejujuran, bertanggung jawab, terampil (terampil menangani beragamnya kebutuhan) dan bersikap terbuka dengan gagasan baru pada siswa dapat diterapkan dengan cukup baik dalam kategori sedang.

Hasil analisis data pada variabel MD menunjukkan bahwa nilai positif pada pelaksanaan proses KBM CAD di kelas II BG-3 mampu mengendalikan emosional diri menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati, mampu menyesuaikan diri dalam "*flow*" terwujudnya kinerja yang tinggi dalam segala bidang gambar yang siswa kerjakan. Siswa yang memiliki keterampilan yang baik dan lebih produktif serta efektif dalam hal apa pun yang mereka kerjakan. Siswa sebisa mungkin untuk selalu mampu meningkatkan kinerja, mampu menyelaraskan diri dengan kelompok, siap memanfaatkan peluang atau kesempatan, serta tekun dan tidak takut mengalami kegagalan. Berdasarkan nilai kategori MD dengan kecenderungan yang baik disimpulkan bahwa untuk MD di kelas II BG-3 yang meliputi mampu meningkatkan kinerja, mampu menyelaraskan diri dengan kelompok, siap memanfaatkan peluang atau kesempatan, tekun dan tidak takut gagal dapat diterapkan dengan baik oleh siswa kelas II BG-3.

Hasil analisis data pada variabel EM disimpulkan bahwa untuk motivasi diri di kelas II BG-3 yang meliputi menunjukkan kepekaan terhadap orang lain, mengakui dan menghargai keberhasilan orang lain, senang hati menawarkan bantuan, hormat dengan orang lain dari berbagai macam latar belakang, dan mengenal dengan baik jaringan sosial (Pramuka/PMR) dapat diterapkan dengan baik oleh siswa kelas II BG-3. Hasil penelitian empati siswa menunjukkan bahwa pelaksanaan proses KBM CAD di kelas II BG-3 secara tidak langsung memberikan pembelajaran kepada siswa bagaimana untuk menghargai hasil kinerja orang lain, tidak menyakiti orang lain, dan membuat sebuah pertemanan yang bersifat heterogen.

Hasil analisis dari indikator KP menunjukkan bahwa siswa di kelas II BG-3 adalah siswa yang mempunyai seni pergaulan yang baik dan sebagian besar mampu untuk bersosialisasi dengan baik di kelas meliputi bertanya pada guru, perilaku tidak relevan, mendengarkan ceramah atau penjelasan guru, mencatat apa yang dijelaskan guru, menyampaikan pendapat yang baik, membaca, mendiskusikan tugas, kerja sama sesuai dengan nilai kategori kecenderungan yang didapatkan dalam skor sedang.

Berdasarkan analisis data matrikulasi hubungan menunjukkan nilai kategori KE disimpulkan bahwa untuk kecerdasan emosional di kelas II BG-3 yang meliputi kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi diri, empati dan kecerdasan emosional dilaksanakan dan diterapkan dengan cukup baik dalam kategori sedang oleh siswa kelas II BG-3. Berdasarkan hasil *output* nilai korelasi kecerdasan emosional

**Tabel 1.** Hasil *Output Correlation SPSS 15.0 R Kecerdasan Emosional*

		R.KP	R.PD	R.MD	R.EM	R.KP	R.KE
R.KP	Pearson Correlation	1	.756(**)	.793(**)	.502(**)	.734(**)	.878(**)
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.006	.000	.000
	N	29	29	29	29	29	29
R.PD	Pearson Correlation	.756(**)	1	.979(**)	.775(**)	.915(**)	.959(**)
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	29	30	30	30	30	30
R.MD	Pearson Correlation	.793(**)	.979(**)	1	.778(**)	.911(**)	.962(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	29	30	30	30	30	30
R.EM	Pearson Correlation	.502(**)	.775(**)	.778(**)	1	.885(**)	.907(**)
	Sig. (2-tailed)	.006	.000	.000		.000	.000
	N	29	30	30	30	30	30
R.KP	Pearson Correlation	.734(**)	.915(**)	.911(**)	.885(**)	1	.971(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	29	30	30	30	30	30
R.KE	Pearson Correlation	.878(**)	.959(**)	.962(**)	.907(**)	.971(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	29	30	30	30	30	30

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

yang didapatkan dari pengolahan data *Pearson Correlation SPSS 15.0*:

Berdasarkan tabel 1 hasil *output SPSS 15.0 R Kecerdasan Emosional* dapat diinterpretasikan angka korelasi hubungan indikator dari 5 wilayah KE yang meliputi KD,PD, MD, EM dan KP menunjukkan bahwa nilai korelasi KE adalah 1,00, besaran angka korelasi menunjukkan bahwa korelasi KE dikelas II BG-3 berada dalam kategori “Tinggi”. Sementara nilai positif mengindikasikan pola hubungan yang searah, semakin tinggi rata-rata lima wilayah kecerdasan emosional, maka semakin tinggi pula nilai korelasi dari kecerdasan emosional.

Berdasarkan uji normalitas untuk menguji pengaruh dari KE untuk siswa menunjukkan nilai,

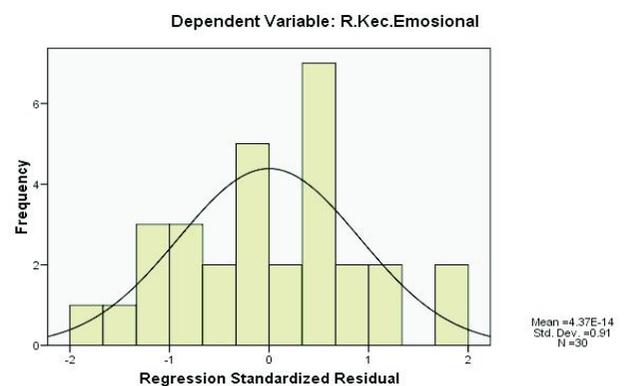
Dari tabel 2 dengan R.KD adalah 0,968 sesuai dengan Interpretasi Nilai Korelasi(\*)hal ini menunjukkan hubungan yang positif semakin besar nilai R.KD semakin tinggi pula nilai R.KE. Besar hubungan nilai R.PD dengan nilai R.KE adalah 0,959 hal ini menunjukkan adanya hubungan yang positif semakin besar nilai R.PD semakin tinggi pula nilai R.KE. Besar hubungan nilai R.MD dengan nilai R.KE adalah 0,962 hal ini menunjukkan adanya hubungan yang positif semakin besar nilai R.MD semakin tinggi pula nilai R.KE.

Dari tabel 3 di atas dapat dilihat nilai  $F_{hitung}$  yaitu 172265,274, sedangkan nilai  $F_{tabel}$  dapat diperoleh dengan menggunakan tabel F dengan derajat bebas ( $d_f$ ) Residual (sisa) yaitu 24 sebagai  $d_f$  penyebut dan  $d_f$  Regression (perlakuan)

yaitu 5 sebagai  $d_f$  pembilang dengan tarap signifikan 0,05, sehingga diperoleh nilai  $F_{tabel}$  yaitu 2,62. Karena  $F_{hitung}$  (172265,274) >  $F_{tabel}$  (2,62) maka  $H_0$  ditolak.

Berdasarkan nilai signifikan, terlihat pada kolom sig yaitu 0,000 itu berarti probabilitas 0,000 kurang dari daripada 0,05 maka  $H_0$  ditolak. Hal tersebut menandakan bahwa terdapat koefisien yang nol atau koefisien tidak berarti, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi nilai kecerdasan emosional (KE).

Berdasarkan analisis diatas maka dapat dibuat model regresi dugaannya yaitu:

**Grafik 1.** Histogram KD,PD,MD,EM,KP memengaruhi KE

**Tabel 2.** Data Korelasi Correlations

		R.Kec.Emosional	R.KD	R.PD	R.MD	R.EM	R.KP
Pearson Correlation	R.Kec.Emosional	1,000	,968	,959	,962	,907	,971
	R.KD	,968	1,000	,922	,940	,837	,927
	R.PD	,959	,922	1,000	,979	,775	,915
	R.MD	,962	,940	,979	1,000	,778	,911
	R.EM	,907	,837	,775	,778	1,000	,885
	R.KP	,971	,927	,915	,911	,885	1,000
Sig. (1-tailed)	R.Kec.Emosional	.	,000	,000	,000	,000	,000
	R.KD	,000	.	,000	,000	,000	,000
	R.PD	,000	,000	.	,000	,000	,000
	R.MD	,000	,000	,000	.	,000	,000
	R.EM	,000	,000	,000	,000	.	,000
	R.KP	,000	,000	,000	,000	,000	.
N	R.Kec.Emosional	30	30	30	30	30	30
	R.KD	30	30	30	30	30	30
	R.PD	30	30	30	30	30	30
	R.MD	30	30	30	30	30	30
	R.EM	30	30	30	30	30	30
	R.KP	30	30	30	30	30	30

**Tabel 3.** Data Anova Regresi ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9,768	5	1,954	172265,274	,000(a)
	Residual	,000	24	,000		
	Total	9,769	29			

a. Predictors: (Constant), R.KD, R.EM, R.MD, R.KP, R.PD

b. Dependent Variable: R.Kec.Emosional

**Tabel 4.** Data Residual Statistic Y= -0,001

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	-,0010	3,6587	2,6710	,58038	30
Residual	-,00564	,00609	,00000	,00306	30
Std. Predicted Value	-4,604	1,702	,000	1,000	30
Std. Residual	-1,675	1,807	,000	,910	30

a. Dependent Variable: R. Kec. Emosional

Dari tabel 4, merupakan ringkasan yang meliputi nilai minimum dan nilai maksimum mean dan standar deviasi dari *predicted value* (nilai yang diprediksi) dan statistik residu.

Berdasarkan hasil uji dengan menggunakan SPSS 15.0 for Windows Evaluation Version dan terlihat pada grafik histogram memperlihatkan sebaran data menyebar keseluruhan daerah kurva normal, sehingga dapat dinyatakan bahwa data mengikuti garis diagonal, sehingga dinyatakan bahwa data berdistribusi KE adalah normal.

Dari hasil analisis data uji t didapatkan kesimpulan bahwa kecerdasan emosional memiliki pengaruh yang signifikan dengan kecerdasan emosional, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar -0,323 dengan  $d=24$ . Nilai  $t_{hitung}$  untuk konstanta yaitu -0,323 pada  $t_{tabel}$  dengan  $d_b=24$  dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 1,71 karena  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima, sedangkan  $sig$  pada tabel B adalah 0,749 yang berarti probabilitas 0,749, karena probabilitas lebih dari 0,05 maka diterima ( $0,749 > 0,05$ ). Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa KE

secara parsial memiliki pengaruh yang **positif dan signifikan** terhadap penerapan Mata Diklat MPL-TL dikelas II BG-3 SMKN 5 Surabaya.

Mengingat kurikulum sudah padat dengan tambahan topik dan agenda muatan lokal yang ada, sejumlah guru yang merasa bebannya sudah terlalu berat tentu tidak mau mengorbankan waktu untuk memberikan diklat lain lagi dari awal. Oleh karena itu, strategi baru dari sistem pendidikan nasional yang muncul dalam pendidikan emosi saat ini adalah bukan menciptakan kelas baru, melainkan mencampurkan pelajaran tentang perasaan dan hubungan dengan topik lain yang telah diajarkan. Pelajaran emosi yang dapat berbaur secara wajar dalam diklat menggambar perangkat lunak CAD tingkat lanjut untuk kelas II BG-3 SMKN 5 Kota Surabaya.

#### KESIMPULAN

Hasil analisis kategori kecenderungan keseluruhan dari lima indikator wilayah kecerdasan emosional menurut teori Daniel Goleman, kecerdasan emosional siswa di kelas II BG-3 SMKN 5 Surabaya pada proses KBM MPL-TL adalah “Sedang” dengan nilai 2,67 dari skala kategori kecenderungan maksimal 4,00. Dari hasil kategori kecenderungan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara bersama-sama KD, PD, MD, EM, dan KP dapat mempengaruhi KE siswa di kelas II BG-3 pada saat KBM MPL-TL berlangsung.

Pengaruh keseluruhan dari kecerdasan emosional siswa pada penerapan MPL-TL dikelas adalah kecerdasan emosional memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Hasil uji t diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar -0,323 dengan  $d = 24$

dapat dilihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  untuk konstanta yaitu -0,323 pada  $t_{tabel}$  dengan  $d_b 24$  dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 1,71 karena  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima. Sedangkan  $sig$  adalah 0,749 yang berarti probabilitas 0,749, karena probabilitas lebih dari 0,05 maka diterima ( $0,749 > 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh pada KBM siswa di kelas. Penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif masih diperlukan untuk mengintegrasikan konsep pendidikan berkarakter dari teori Daniel Goleman dalam pembelajaran khususnya untuk mengukur kapasitas pendidikan karakter dari guru pengajar pada kompetensi keahlian Teknik Gambar Bangunan. Meskipun manfaat yang dimaksud tidak terlalu banyak, tetapi pihak orang tua, sekolah dan guru dapat secara bersama-sama mengetahui permasalahan yang terjadi pada perkembangan karakter anak didik, sehingga permasalahan yang terjadi di rumah yang sulit dipecahkan orang tua dapat dipecahkan bersama-sama oleh pihak sekolah agar kegiatan belajar anak di sekolah dapat berkembang dengan baik tidak dipengaruhi permasalahan dari rumah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional–UUSPN.  
Kemendiknas. 2011. *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Berkarakter*. Jakarta: Puskurbuk  
Goleman, Daniel. 2006. *Emotional Intelligence*. Terjemahan T. Hermaya. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama  
Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.  
Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

# Kajian tentang Rencana Implementasi Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014

## Study of Plan Implementation The Law of Village Number 6, 2014

Endah Wahyuningsih

Akademi Keperawatan Bahrul Ulum Jombang  
(Nursing Academy Bahrul Ulum Jombang)

### ABSTRAK

*Pengesahan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 diharapkan mampu mewujudkan tujuan berdirinya negeri ini yaitu kesejahteraan dan kemakmuran pada seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan berbasis desa diharapkan akan mampu pemeratakan pembangunan, karena dengan metode ini semua desa akan melakukan pembangunan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Di samping itu keberadaan Badan Usaha Milik Desa sebagai roda pembangunan desa diharapkan benar-benar mampu menjadi mesin kemakmuran bagi warga masyarakat desa. Dari kajian ini diperoleh beberapa kendala yang mungkin saja dapat terjadi dalam implementasi UU ini antara lain yaitu: Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting baik dari pusat sampai dengan di desa; kesiapan sumber daya manusia sebagai pengelola BUMDes mulai dari mekanisme pemilihan pengurus yang rentan akan nepotisme dan kolusi untuk kepentingan beberapa golongan; Sosialisasi yang masih kurang pada semua lapisan masyarakat tentang maksud dan tujuan dari BUMDes; Kucuran dana untuk pembangunan desa juga dapat memicu konflik sosial baik antara golongan yang dekat dengan sumber dana dan sumber daya dengan masyarakat, ataupun konflik antar desa; Tipe/ gaya kepemimpinan kita saat ini yang tidak begitu memperhatikan proses tetapi lebih mengagungkan hasil yang pasti akan berdampak pada banyak faktor.*

**Kata kunci:** BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), desa, dana

### ABSTRACT

*The ratification of village legislation no 6, 2014 is expected to implement the vision of Indonesia basic principle which is the welfare and prosperity for all Indonesians. Village based development is expected to be able to distribute the results of development evenly, therefore all villages around Indonesia will develop themselves based on their potentials. Moreover the presence of village-owned enterprises as the wheels of rural development is expected to be agent of change for rural community. This study obtains some of the obstacles that may have occurred in the implementation of this legislation, which are: planning is an important stage either the center nor the village, the readiness of human resources as the managers of BUMDes elected from the board is vulnerable to nepotism and collusion of interests among groups; the lack of socialization of BUMDes purpose in every level of society; funding for rural development can also lead to social conflict among factions close to funding sources and resources to the community or conflict among villages; the type of current leadership that doesn't heed the process but exalts the results will certainly affect to many factors.*

**Key words:** BUMDes, village, funding

### PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemerintahan sentralisasi menjadi sistem pemerintahan desentralisasi harus disadari telah membawa banyak perubahan pada negeri ini, salah satunya adalah dengan lahirnya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di mana dengan lahirnya undang-undang tersebut daerah memiliki kewenangan dan keleluasaan dalam mengatur, mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal, tentunya dengan diikuti oleh pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan.

Jika kita telaah lebih jauh lagi sebenarnya esensi dari keberhasilan pembangunan dapat dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu desa, akan tetapi di dalam pelaksanaannya pembangunan desa juga bergantung

kepada pendapatan asli desa, dan swadaya dari desa tersebut. Oleh karena itu tidak mudah untuk merealisasikan pembangunan desa. Ketika otonomi daerah sudah diterapkan, kabupaten memiliki kewajiban untuk memberikan sumber dana kepada desa, untuk merealisasikan pembangunan desa demi tercapainya kemandirian daerah dan pemerataan pembangunan. Di mana pemerataan pembangunan juga merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan selain berkurangnya pengangguran dan meningkatnya pendapatan perkapita.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk memberikan sumber dana kepada desa, supaya pembangunan desa lebih cepat terealisasi serta berguna bagi kemandirian daerah. Di mana memang esensi kemandirian sebuah daerah adalah dari pembangunan

sebuah desa, jika pembangunan desa berjalan dengan baik dan cepat maka tidak menutup kemungkinan kemandirian daerah kabupaten/kota bisa terealisasi dengan baik.

Penetapan UU Desa No 6 tahun 2014 yang mengatur tentang desa, di mana dalam salah satu pointnya UU Desa tersebut desa mendapatkan kucuran dana sebesar 1 miliar untuk kemandirian desa. Dana yang diberikan oleh pemerintah ke desa sangatlah bervariasi dengan pertimbangan luas wilayah desa dan banyaknya jumlah penduduk, adapun variasi dana yang diberikan pemerintah sebesar 1–1,4 miliar. Berdasarkan PP No 60 tahun 2014 tentang dana desa, maka disebutkan bahwa dana desa yang akan dikucurkan langsung kepada pemerintah desa bersumber dari APBN. Alokasi dana dari APBN jumlahnya sekitar 104,6 T yang akan dibagi kepada sekitar +72.000 desa yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jika tidak ada kendala maka pada bulan Mei 2015 akan dilakukan pencairan tahap pertama yaitu 70% dari total dana.

Namun, implementasi dari UU Desa ini tentu saja menyimpan sejumlah potensi negatif, seperti munculnya peraturan desa yang bisa jadi akan berbenturan dengan peraturan daerah yang dibuat pemerintah kabupaten maupun dengan peraturan desa-desa tetangga. Jika ini terjadi maka akan muncul konflik. Konflik tersebut dapat saja menghambat akses ekonomi atau menutup sumber pendapatan warga desa lain, terutama desa-desa yang tidak bisa berkembang tanpa bantuan desa lain. Itu karena melalui peraturan desa, tidak tertutup kemungkinan setiap desa akan melarang warga desa lain mengambil potensi sumber daya alam di wilayah desa bersangkutan. Inilah yang akan memicu timbulnya konflik antar desa. Jika konflik yang timbul tidak segera diredam, bukan tidak mungkin akan memicu permasalahan sosial yang lebih krusial seperti kantong kemiskinan, termarjinalkan akan mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran. Selain itu bisa jadi budaya korupsi yang seringkali terpasang secara telanjang di banyak media akan menjadi virus yang siap menular pada para politikus tingkat lini yaitu pemilik kekuasaan tingkat desa, sehingga harapan desa menjadi garda depan dalam pembangunan bangsa hanyalah mimpi semata.

#### PERMASALAHAN

Pengesahan undang-undang desa telah menghadirkan banyak sekali opini baik dari para ahli, akademisi, praktisi bahkan masyarakat juga tidak kalah heboh menyikapi hadirnya undang-undang tersebut. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai kajian rencana implementasi UU Desa nomor 6 tahun 2014, serta identifikasi tentang hal-hal yang kemungkinan besar akan terjadi ketika implementasi UU Desa diterapkan saat ini.

#### Landasan Teori

Manajemen sangat diperlukan dalam setiap kegiatan, karena dalam manajemen tahapan-tahapan Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling benar-benar diperhatikan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tahapan perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting untuk diperhatikan dibandingkan dengan tahapan lainnya karena dalam perencanaan akan diputuskan apa yang harus dilakukan, kapan dilakukannya, bagaimana melakukannya dan siapa yang melakukannya.

Pada tahapan perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. Jadi pada perencanaan sebenarnya sudah terlihat secara jelas tahapan lain seperti organizing, actuating, dan controlling akan dilakukan.

Kepemimpinan juga merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Ada beberapa tipe kepemimpinan yang ada seperti tipe kharismatis, tipe demokratis, tipe otoriter, tipe militer, tipe paternalistik dan tipe *laize faire*.

Teori tentang perilaku masyarakat desa

Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama; tinggal bersama sebanyak banyak ribu orang yang hampir semua mengenal. Kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, perkebunan dan sebagainya. Dalam tempat tinggal itu terdapat ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial. Jiwa keagamaan yang tumbuh dengan kuatnya buat sebagian disebabkan karena perasaan yang tergantung dengan alam. Bertitik tolak dari batasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Warga desa saling mengenal satu dengan yang lain secara face-to face
2. Kehidupan warga desa tergantung pada pertanian atau perikanan sebagai mata pencaharian pokok
3. Irama/ ritme hidupnya ditentukan atau seirama dengan ritme alam (di siang hari bekerja dan di malam hari mereka beristirahat)
4. Ikatan kekeluargaan pada warga desa bersifat erat, taat kepada tradisi atau kaidah sosial
5. Karena kehidupan warga desa banyak bergantung pada alam, maka jiwa keagamaan mereka sangat kuat (Djoko Pranowo)

Pembangunan berbasis masyarakat, secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya memanfaatkan potensi sumber daya (alam, manusia, kelembagaan, nilai-nilai sosial budaya) yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat setempat.

Oleh karena itu pembangunan berbasis masyarakat seharusnya pembangunan yang berangkat dari kebutuhan masyarakat dan bukannya dirumuskan oleh “orang luar”/ elite/ kekuasaan yang berada di luar masyarakat. Pembangunan berbasis masyarakat berarti pembangunan harus berbasis pada sumber daya lokal, menghormati atau berbasis pada kearifan lokal, dan berbasis pada modal spiritual yang dimiliki dan atau yang diyakini oleh masyarakat setempat. Jadi pembangunan berbasis masyarakat itu harus terkandung unsur-unsur:

1. Pembangunan dari atas dan atau dari bawah
2. Pembangunan berbasis sumber daya lokal
3. Pembangunan berbasis modal sosial
4. Pembangunan yang berbasis kebudayaan
5. Pembangunan yang berbasis kearifan lokal
6. Pembangunan yang berbasis modal spiritual.

### Teori Konflik

Sanderson (2003), Karl Marx adalah satu dari sekian tokoh sosiologi yang menjadikan infrastruktur material sebagai determinasi sistem sosial yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Dalam kaitannya dengan teori konflik, Turner (1998) menekankan bahwa Marx dalam menyusun proposisinya tentang proses konflik didasarkan atas ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya. Ketidaksertaan ini, kemudian menciptakan kelompok (grup) yang memposisikan dirinya sebagai ordinar (dominasi) di satu sisi, dan subordinat (termarjinalkan) pada sisi lainnya.

Selanjutnya, Marx dalam Turner (1998) mengatakan bahwa mereka yang tersubordinasi akan menjadi peduli terhadap kepentingan kolektif mereka atas dominasi kelompok ordinar dengan mempertanyakan pola distribusi sumber daya alam yang tidak merata tersebut. Akibatnya adalah rusaknya relasi (hubungan) antara kelompok ordinar dengan kelompok subordinat disebabkan disposisi alternatif yang diciptakan oleh kelompok ordinar terhadap kelompok subordinat. Dalam kondisi seperti ini, kelompok subordinat membangun kesatuan ideologi untuk mempertanyakan sistem yang berlangsung dan melakukan “perlawanan” melalui kepemimpinan kolektif terhadap kelompok ordinar. Hal inilah yang kemudian menyebabkan polarisasi antara kelompok ordinar dengan kelompok subordinat yang berkepanjangan.

Berbeda dengan Marx, analisis Weber (Turner, 1998) lebih menekankan teori konfliknya dari perspektif suprastruktur ideologis (merujuk pendapat Sanderson, 2003). Weber dalam Turner (1998) membangun proposisi dalam proses konflik antara superordinat dengan subordinat. Adapun proposisi yang dibangun Weber, sebagai berikut:

- Konflik antara superordinat dengan subordinat mungkin terjadi apabila ada tarikan dari otoritas politik.
- Adapun tarikan tinggi dari otoritas politik tersebut dapat terjadi, melalui: keanggotaan dalam kelas, kelompok status, dan hierarki politik. Selain itu, juga dapat terjadi melalui diskontinu atau derajat ketidaksetaraan dalam

distribusi sumber daya dengan hierarki sosial yang tinggi. Juga dapat melalui mobilisasi sosial melalui hierarki sosial yang didasarkan atas kekuasaan dan prestise, serta kekayaan.

- Konflik antara superordinat dengan subordinat dimungkinkan terjadi melalui kepemimpinan yang karismatik yang dapat memobilisasi subordinat.
- Melalui kepemimpinan yang karismatik tersebut, konflik berhasil dicapai dengan tekanan yang kuat terhadap otoritas yang lama sehingga menghasilkan sistem baru perihal peran dan administrasi.
- Sebuah sistem dengan otoritas peran dan administrasi yang terbentuk tersebut, kembali terjadi tarikan yang terus berulang (kembali keproposisi ke-2 dan seterusnya).

### PEMBAHASAN

Pengesahan undang-undang desa oleh DPR tentunya mempunyai tujuan yang telah sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu menciptakan masyarakat Indonesia adil dan makmur yang sesuai dengan amanat dalam UUD 1945. Pembangunan di Indonesia saat ini sudah mengalami perubahan model pembangunan jika dahulu pada era orde baru masih menggunakan model Basic Need di mana peran negara menjadi sangat sentral karena negara merupakan pusat dari public service, dan indikator yang digunakan juga indikator sosial, di mana negara berusaha memenuhi kebutuhan mendasar dari masyarakat sehingga model ini sangat bertumpu pada kekuatan anggaran dan kemampuan administratif. Pada saat ini model terkolaborasi antara model basic need, economic growth dan people centered. Dalam hal ini negara pembangunan berfokus pada pertumbuhan ekonomi sehingga upaya untuk meningkatkan investasi merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, sedangkan model people centered lebih mengedepankan pemberdayaan manusia, masyarakat tidak lagi dipandang sebagai obyek dari yang namanya pembangunan tetapi mereka adalah subyek/pelaku dari pembangunan, pada model ini fungsi manusia menjadi sangat sentral dan mendudukkan manusia kepada fungsi yang mulia yaitu manusia yang berpotensi dan memiliki kreativitas serta komitmen yang harus dirangsang untuk berkembang. Memang harus dipahami bahwa tidak bisa kita menilai suatu negara hanya menggunakan salah satu model saja tetapi seringkali banyak negara itu melakukan kombinasi di antara beberapa model tersebut, tentunya dengan mencoba menghilangkan yang negatif dan mengambil yang positif yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan.

Pada bulan Mei 2015 jika tidak ada perubahan direncanakan pencairan tahap pertama yaitu 30% akan serentak dilakukan di seluruh desa di Indonesia. Pencairan dana tersebut tidak melalui kepala desa tetapi turunnya langsung pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), adapun pengelolaan BUMDes terdiri atas Direktur, Sekretaris,

Bendahara dan Divisi-divisi atau Bidang Sumber Daya yang dapat dikembangkan setiap desa.

Pembentukan BUMDes ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan perekonomian, menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi angka pengangguran di desa. Kepengurusan BUMDes disahkan oleh Kepala Desa dengan terbitnya surat keputusan. Adapun jenis-jenis usaha dari BUMDes adalah bidang jasa, bidang ekonomi dan perdagangan, bidang pertanian, bidang industri, bidang usaha rumah tangga, unit perdagangan dan atau lumbung pangan, atau menjalankan usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan desa dan tentunya disesuaikan dengan sumber daya dan potensi yang dimiliki desa. Berikut ini adalah beberapa kendala yang mungkin terjadi dengan mulai diberlakukannya undang-undang desa.

Tersebut antara lain;

**Pertama**, hal yang perlu diperhatikan adalah tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan ini merupakan tahapan yang paling vital di samping tiga tahapan lain dalam proses manajemen seperti organizing, actuating, dan controlling. Hal ini dikarenakan pada tahapan perencanaan inilah semua hal ditentukan untuk mencapai tujuan. Artinya pada tahapan ini pula dilakukan identifikasi permasalahan untuk menetapkan tujuan, lalu alternatif pilihan kegiatan juga diputuskan, siapa yang akan melaksanakan, bahkan sampai dengan bagaimanakah mekanisme kontrol akan dilakukan supaya tidak terjadi penyelewengan/ ketidaksesuaian dengan perencanaan. Artinya pada tahapan ini ditentukan kegiatan apa yang harus dilakukan, kapan dilakukannya, bagaimana melakukannya dan siapa yang melakukannya. Hal inilah yang menyebabkan tahapan perencanaan menjadi tahapan yg sangat urgent/ penting untuk diperhatikan. Implementasi dari UU Desa terutama tentang dana desa harus benar-benar matang dalam proses perencanaan, khususnya tentang sumber daya manusia di desa yang akan menjadi pengguna anggaran. Pemerintah terkesan tergesa-gesa mengenai hal ini, persiapan hanyalah sampai pada diklat-diklat kepala desa, padahal pengguna anggaran bukanlah kepala desa tetapi BUMDes. Alangkah bagusnya jika dipersiapkan infrastrukturnya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan diklat-diklat oleh lembaga yang kompeten dilakukan untuk semua pengurus BUMDes di seluruh Indonesia. Pada saat diklat penting juga dimasukkan materi tentang kebangsaan, dan kerohanian sehingga tercipta para pengguna anggaran yang mengerti dan memahami tugas dan fungsi serta yang memiliki idealisme. Jika hal ini telah siap baru dicairkan dana desa tersebut.

**Kedua**, kesiapan SDM merupakan hal yang sangat vital yang harus diperhatikan, jangan sampai dengan ketidaksiapan SDM ini dana untuk pembangunan desa yang berasal dari APBN akan menguap hilang dan tidak tepat sasaran. Ketidaksiapan sumber daya manusia ini bisa saja menyebabkan program-program kerja yang sudah direncanakan di musyawarah desa dan dituangkan dalam

BUMDes menjadi hanya bagus dikertas tetapi gagal dalam implementasi. Seharusnya pemerintah tidak perlu tergesa-gesa untuk pencairan dana desa ini sebelum BUMDes beserta jajaran pengurusnya mendapatkan pelatihan secara intensif dan dinyatakan lulus dari diklat yang dilakukan oleh pemerintah. Alokasi dana tidak perlu dipaksakan turun tahun ini tetapi digunakan untuk persiapan-persiapan sumber daya manusia sebagai pelaksana amanat ini.

Di samping itu perlu juga dilakukan propaganda-propaganda tentang BUMDes pada seluruh lapisan masyarakat desa sehingga mereka semua menyadari pentingnya keberadaan BUMDes bagi pengentasan kemiskinan dan pengangguran di desa karena dana BUMDes bukan hanya milik sekelompok orang tetapi milik dan untuk seluruh masyarakat desa.

Ketidaksiapan SDM bukan tidak mungkin akan menyebabkan salah persepsi akan dana tersebut dan menyebabkan budaya korupsi yang sudah menjadi trend para pemegang kekuasaan dan yang telah tersiar secara telanjang di media masa akan marak diikuti oleh banyak pemimpin desa. Berbagai desakan sebagai akibat dari biaya politik yang tinggi seringkali menjadi modus para kepala daerah mengakali berbagai sumber dana yang ada untuk balik modal atau jika beruntung dan tidak ketahuan akan mendapatkan untung. Berbagai macam cara dilakukan mulai mark up dan kegiatan fiktif dilakukan tanpa berdosa karena membudayanya korupsi di negeri ini.

Hal lain yang mungkin saja terjadi adalah dengan begitu banyaknya kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa bisa saja memunculkan penguasa-penguasa kecil yang mungkin akan merubah cara pemerintahan di daerahnya menjadi system oligarki. Sistem ini akan membuat para pemimpin dalam memerintahkan kesejahteraan golongannya menjadi prioritas utama sehingga kolusi dan nepotisme akan semakin mewarnai sistem pemerintahannya.

**Ketiga**, hal lain yang patut diwaspadai adalah pada saat pembentukan struktur kepengurusan BUMDes yang bisa jadi sudah dilakukan setting oleh pemegang kekuasaan di desa. Pembentukan struktur BUMDes memang dilakukan dengan musyawarah desa akan tetapi juga rawan dimasuki kolusi dan nepotisme oleh pemimpin desa.

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa diharapkan mampu menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan yang masih saja kita temui di banyak desa. Pencairan dana desa ini diharapkan mampu menghidupkan usaha-usaha yang ada di tiap desa. Jenis usaha yang diadakan hendaknya sesuai dengan sumber daya alam dan juga dengan tetap memperhatikan sumber daya manusia sebagai pelaksanakannya.

Hal lain berkenaan dengan BUMDes yang juga patut untuk kita perhatikan adalah kurang pemahannya masyarakat akan program BUMDes, walaupun dalam pelaksanaannya setiap desa akan mendapat tenaga pendamping akan tetapi akan lebih efektif jika pengawasan pelaksanaan usaha tersebut dilakukan tidak hanya oleh pendamping akan tetapi oleh

seluruh lapisan masyarakat. Hal ini akan tercapai jika sejak awal dilakukan sosialisasi tentang BUMDes kepada seluruh warga desa secara terbuka. tentunya dengan karakteristik masyarakat desa yang masih dengan sangat baik menjaga nilai dan norma maka kontrol sosial akan sangat efektif dilakukan dari berbagai arah dari pendamping, dari masyarakat, dan juga dari pemerintah daerah setempat.

Keempat, pencairan dana desa juga akan dapat memicu munculnya konflik pada tingkat desa. Konflik yang muncul dapat digolongkan menjadi dua, yang pertama adalah konflik antar kelas di desa yaitu antara pengguna anggaran, para pejabat desa dengan warga desa atau mungkin yang kedua yaitu konflik antar desa.

Konflik yang kemungkinan besar terjadi di desa dipicu oleh ketidaksetaraan akses terhadap sumberdaya dan sumber dana. Di mana ketidaksetaraan ini kemudian menciptakan kelompok yang memposisikan sebagai dominasi atas kelompok yang termarginalisasikan yaitu kelompok yang jauh dari kedua hal tersebut. Jika mengamati hal tersebut maka apa yang dikemukakan oleh Marx akan berpotensi terjadi, di mana golongan pengguna anggaran yang mungkin saja berisi orang-orang yang sudah disetting oleh pemegang kekuasaan di desa menjadi golongan-golongan yang dimakmurkan dengan keberadaan BUMDes. Bukan tidak mungkin ketika pembentukan BUMDes sudah disetting dengan baik maka kemakmuran pun hanya akan dinikmati oleh kelompok tertentu, jika kelompok yang tidak mendapatkan apa pun dari keberadaan BUMDes bisa saja akan bergejolak, dan melawan kondisi yang terjadi. Oleh karena itu keterbukaan harus benar-benar dilakukan, sosialisasi latar belakang, tujuan dan manfaat keberadaan BUMDes harus benar-benar dipahami oleh masyarakat.

Konflik antar desa yang dimaksud di sini adalah dengan hadirnya dana desa ini maka setiap desa harus memiliki peraturan desa yang mungkin saja akan berbenturan dengan peraturan desa lain. Oleh karena itu peraturan desa dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah dan juga harus sesuai dengan peraturan UU Desa. Dengan begitu diharapkan peraturan masing-masing desa tidak saling berbenturan. Pada saat perumusan peraturan desa hendaknya badan permusyawaratan desa yang bertugas membahas dan menyepakati aturan desa mampu menampung aspirasi masyarakat desa dan juga mampu melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa dengan baik.

Kelima, tipe/ gaya kepemimpinan juga akan dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada desa. Tipe kepemimpinan yang ada di desa ini juga dipengaruhi oleh mekanisme pemilihan dan budaya masyarakat desa pada saat pemilihan kepala desa berlangsung. Pada saat pemilihan konflik begitu terasa money politic seolah sudah begitu membudaya pada masyarakat desa, mereka sudah tidak perlu malu dan menutup-nutupi budaya money politic lagi karena sudah tidak dianggap tabu tetapi wajar di

mana untuk mendapatkan kedudukan nomor satu di desa tidak mudah dan tidak diperoleh secara gratis. Persepsi seperti ini sudah terkonstruksi dengan begitu baiknya pada masyarakat kita saat ini. Maka janganlah heran ketika ada pemimpin yang telah menjadi pemimpin akan berupaya dengan keras untuk mengembalikan uang yang telah mereka keluarkan pada saat pemilihan kepala desa. Perubahan masyarakat desa yang dulu lekat dengan karakteristiknya seperti tepo seliro, memiliki sifat kekeluargaan, religius, mengutamakan musyawarah, menghargai nilai dan norma serta menjalankan kontrol sosial dengan begitu bagusnya telah berubah menjadi masyarakat yang individualistis dan materialistis. Hal ini menyebabkan terpilihnya tipe-tipe pemimpin yang tidak menghargai proses tetapi mengagungkan hasil.

#### KESIMPULAN

1. Implementasi dari UU desa akan menjadi sia-sia jika tahapan perencanaan, baik di tingkat pusat sampai dengan tingkat desa tidak dilakukan secara matang. Perencanaan ini akan diputuskan apa yang harus dilakukan, kapan dilakukannya, bagaimana melakukannya dan siapa yang melakukannya
2. Kesiapan SDM merupakan hal yang sangat vital yang harus diperhatikan, jangan sampai dengan ketidaksiapan SDM ini dana untuk pembangunan desa yang berasal dari APBN akan menguap hilang dan tidak tepat sasaran.
3. Rawan terjadi kolusi dan nepotisme dalam hal pembentukan struktur kepengurusan BUMDes yang bisa jadi sudah dilakukan setting oleh pemegang kekuasaan di desa. Pembentukan struktur BUMDes memang dilakukan dengan musyawarah desa akan tetapi juga rawan dimasuki kolusi dan nepotisme oleh pemimpin desa.
4. Pencairan dana desa juga akan memicu munculnya konflik pada tingkat desa. konflik yang muncul dapat digolongkan menjadi dua, yang pertama adalah konflik antar kelas di desa yaitu antara pengguna anggaran, para pejabat desa dengan warga desa tau mungkin yang kedua yaitu konflik antar desa.
5. Gaya kepemimpinan juga akan dapat memengaruhi pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada desa, tipe kepemimpinan ini secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh mekanisme pemilihan.

#### SARAN

1. Sebaiknya pemerintah tidak perlu tergesa-gesa untuk mencairkan dana pembangunan desa, tetapi perlu dilakukan perencanaan secara matang, baik kesiapan dari pusat maupun dari desa terutama kesiapan kepengurusan BUMDes dan pilihan bidang usaha yang akan menjadi ujung tombak dari pembangunan.

2. Kesiapan pengelola BUMDes harus diperhatikan dan juga rencana kerjanya minimal dalam satu tahun pertama juga harus sudah ditetapkan dan dilakukan sosialisasi pada masyarakat.
3. Kehadiran tenaga pendamping sebagai pintu control diharapkan akan efektif dalam menjalankan tugasnya, tetapi jauh akan lebih efektif jika seluruh masyarakatlah yang menjadi control atas kinerja BUM Des, hal ini akan bisa berlangsung dengan baik jika masyarakat mengetahui dan memahami tentang keberadaan BUMDes.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Turner, J. H. *The Structure of Sociological Theory* (sixth edition). Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company, 1998.
3. Ritzer G. dan Goodman DJ. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana. 2003.
4. Sanderson, SK. *Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial* (edisi kedua). PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
5. Handoko Hani T. *Manajemen*. BPFE. Yogyakarta., 2014
6. Djoko Pranowo. *Masyarakat Desa Tinjauan Sosiologi*. PT Bina Ilmu. Jakarta. 1995

# Pendekatan Pragmatis Olah Bentuk Mebel Multifungsi Bagi Anak Usia Dini

**Mariana Wibowo, Gabrielle S Wangsawidjaja**  
 Program Studi Desain Interior, Universitas Kristen Petra  
 Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya  
 mariana\_wibowo@petra.ac.id

## ABSTRAK

*Perubahan life style diakibatkan perkembangan teknologi dan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, mengakibatkan penghuni memilih tinggal di apartemen. Namun, perlu disadari, anak dalam rentang umur nol hingga tujuh tahun membutuhkan stimulasi agar pertumbuhan kemampuan sensorik dan motorik menjadi maksimal. Minimnya ketersediaan ruang di dalam apartemen untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat diselesaikan melalui mebel multifungsi. Menggunakan apartemen The Voila sebagai objek desain, dilakukan pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, serta studi literatur yang akan digunakan sebagai basis analisa. Melalui analisa programming dan pendekatan pragmatis, diangkatlah konsep Fun in Function. Konsep ini menggabungkan sebuah proses pembelajaran melalui permainan yang dibutuhkan dalam perkembangan psikomotor, kognitif serta fisik anak dengan fungsi mebel yang secara utuh mendukung aktivitas anak-anak melalui mebel yang aman, mudah, kuat, multifungsi sehingga dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama. Ide desain yang dipilih memiliki bentuk modul awal berbentuk kotak berukuran 1000 × 1000 × 620 mm, di mana kemudian dipecah menjadi lima modul, yang dapat menghasilkan lima belas fungsi mebel yang memiliki fitur permainan sebagai stimuli perkembangan sensorik dan motorik.*

**Kata kunci:** Pragmatis, Mebel, Multifungsi, Anak Usia Dini

## ABSTRACT

*Changing in lifestyle due to technology development and population growth cause people tends to live in an apartment. Yet, children between the age of zero to seven, need stimulation to maximize their sensory and motoric capabilities. Multifunction furniture can be used as the solution to the shortage of space to fulfill those needs. Using The Voila apartment as the design object, data gathering is done through interview, questionnaire and literature study to be used in further analysis. Through programming and pragmatism theory, fun in function is chosen as the concept. This concept combines a process of learning through play that is needed in psychomotor, cognitive and physical growth, with furniture function that holistically supporting children activity through safe, simple, and firm multifunction furniture that can be used in long term period. Selected design idea has an initial module 1000 × 1000 × 620 mm dimension, that contains five modules able to construct fifteen functions along with toys as sensory and motoric development stimuli.*

**Key words:** Pragmatism, Furniture, Multifunction, Children

## PENDAHULUAN

Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk hingga 1,49% per tahun yang mengakibatkan padatnya kota besar yang ada, salah satunya adalah kota Surabaya [1]. Minimnya lahan mengakibatkan pola huni masyarakat berpindah ke hunian yang *compact* yaitu apartemen. Akibatnya tidak jarang anak tumbuh di sebuah lingkungan apartment tersebut. Pendidikan anak usia dini pada rentang umur nol hingga tujuh tahun memiliki dampak yang besar bagi kemampuan anak saat ia dewasa [2]. Dibutuhkan rangsangan agar perkembangan sensorik maupun motorik mereka menjadi optimal, di mana metode yang terbaik adalah metode permainan [3]. Namun, minimnya ruang pada hunian mengakibatkan kurang terpenuhinya kebutuhan anak tersebut. Ruang bermain anak menjadi sempit, kurangnya media permainan anak serta tidak tersedianya mebel yang dikhususkan bagi anak. Hal ini dapat berdampak buruk bagi

tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah mebel yang dapat menstimulasi perkembangan sensorik dan motorik anak sesuai dengan tingkatan umur anak melalui media permainan bervariasi bentuk rupa dan warnanya, yang dapat mengakomodasi kebutuhan anak di dalam ruangan dan sirkulasi yang sempit dalam penggunaan yang berkelanjutan. Beberapa tujuan mebel ini adalah:

1. Menstimulasi perkembangan sensorik dan motorik anak melalui mebel sesuai dengan tingkatan umur anak
2. Mampu memberikan stimulasi agar anak lebih aktif
3. Memberikan kemudahan bagi orang tua dalam menyediakan mebel yang dibutuhkan anak usia dini
4. Mengurangi masalah yang ditimbulkan dalam penyediaan mebel khusus anak pada hunian sempit
5. Membentuk dalam menghasilkan generasi yang lebih cerdas

Perancangan ditujukan untuk user yang bertempat tinggal di apartemen dengan luasan kurang dari 100 m<sup>2</sup>

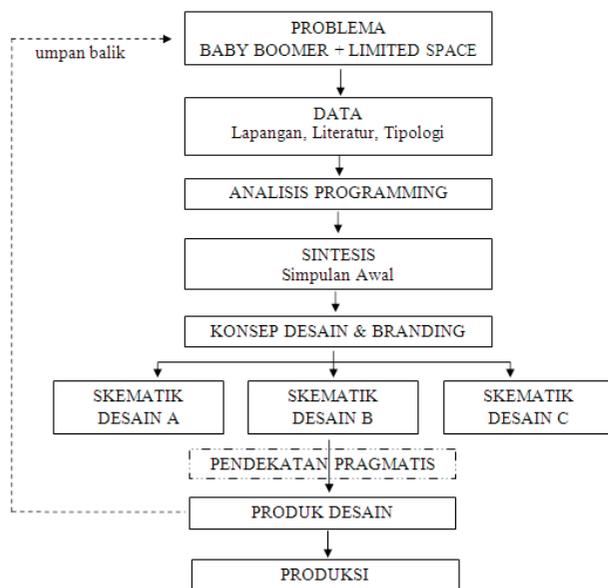
yang memiliki anak usia dini berusia nol hingga tujuh tahun, yang berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Mebel ini dikhususkan untuk mengakomodasi aktivitas anak sehari-hari seperti beristirahat, bermain, makan dan minum, menyimpan benda, belajar, mandi dan berpakaian.

**METODE PERANCANGAN**

Perancangan dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang berkembang di masyarakat, yaitu kurangnya ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan anak yang berhubungan dengan tumbuh kembang kemampuan sensorik dan motorik anak.

Berdasarkan temuan tersebut, dilakukan wawancara ke 200 responden secara acak (*random*), untuk mengetahui lebih dalam kebutuhan mebel serta aktivitas anak pengguna apartemen. Dapat disimpulkan bahwa mebel yang paling sering dibutuhkan oleh orang tua untuk anak di apartemen adalah fasilitas ranjang (95%), fasilitas penyimpanan (92%), *baby walker* (87%), *baby highchair* (83%), meja belajar (73%) dan *play yard* (64%). Selain itu, anak paling menyukai bentuk lingkaran (43%), diikuti dengan segitiga (36%) dan persegi (12%). Untuk warna, mayoritas orang tua mengatakan bahwa anak mereka menyukai warna primer (52%) Untuk mengetahui lebih dalam tentang permasalahan yang dihadapi, dilakukan survey terhadap objek desain. Objek desain perancangan menggunakan apartemen The Voila tipe 79/89 yang berlokasi di *Superblock* Ciputra World yang berada di Jalan Mayjend Sungkono. Desain interiornya menggunakan style modern, yang didominasi warna putih dengan aksesoris natural.

Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, telah dilakukan programming sehingga dapat dituangkan sebuah konsep



**Gambar 1.** Bagan tahap metode perancangan.

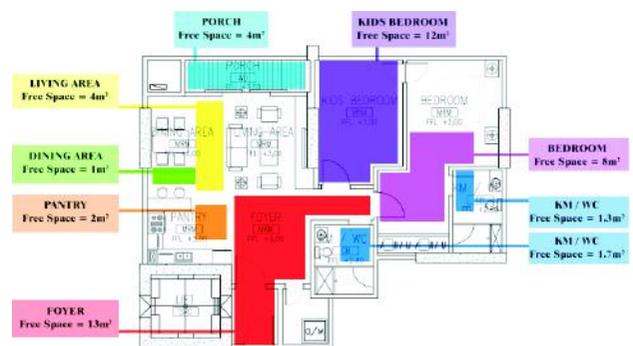
desain yang kemudian dirancang berupa sebuah desain produk yang dapat diproduksi sebagai solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi.

Metode pendekatan desain yang digunakan adalah pendekatan pragmatis, yaitu metode pendekatan pragmatis di mana perancang akan melakukan uji coba agar mengetahui apakah desain mampu memecahkan permasalahan secara tepat atau tidak.

**PROGRAMMING**

**Programming**

*Programming* dimulai dengan menganalisis denah ruang dari apartemen The Voila yang telah dipilih, untuk mengetahui ruang kosong yang berpotensi untuk dapat digunakan sebagai tempat aplikasi mebel yang didesain tanpa harus mengganggu mebel yang telah ada. Ruang anak menjadi prioritas peletakan mebel desain dan ruang.



**Gambar 2.** Free space pada tiap ruang apartemen The Voila.

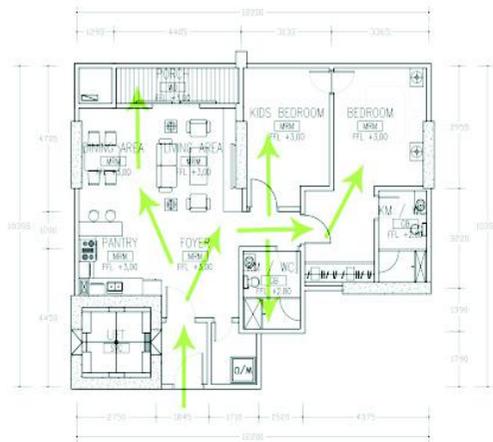
Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan pola aktivitas anak sehari-hari yang secara keseluruhan membutuhkan mebel terbagi atas empat kategori, yaitu fasilitas berbaring, penyimpanan, bidang kerja dan duduk.



**Gambar 3.** Pola aktivitas anak di rumah.

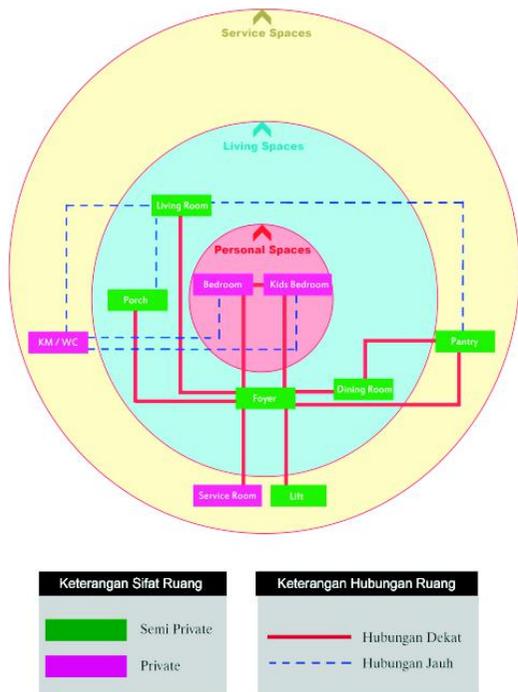
Sirkulasi anak meliputi keseluruhan ruang apartemen, seperti kamar anak, foyer di *living area* maupun di ruang tidur orang tua. Namun ruang sekitar *pantry* dibatasi khusus untuk orang tua, dikarenakan banyaknya elektronik serta benda berbahaya bagi anak usia dini seperti kompor dan

pisau. Untuk aktivitas mandi dan buang air, anak akan menggunakan kamar mandi luar.



Gambar 4. Alur sirkulasi anak di dalam apartemen The Voila.

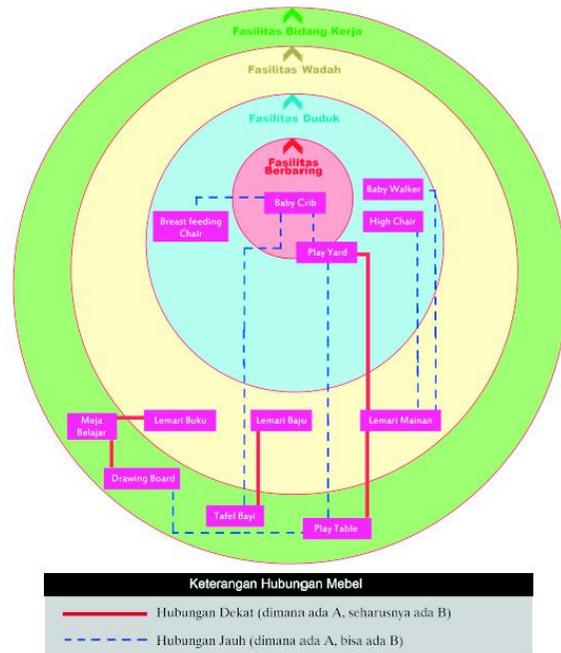
Hubungan kedekatan ruang dianalisis dan digunakan sebagai acuan untuk mengelompokkan mebel berdasarkan letaknya pada ruangan. Hal ini juga berhubungan dengan pergerakan mebel dari ruang satu ke ruang lainnya. Dari hasil programming dan analisa aktivitas anak serta pergerakannya membagi mebel ini menjadi beberapa modul.



Keterangan Sifat Ruang	Keterangan Hubungan Ruang
<span style="background-color: #90EE90; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> Semi Private	<span style="border-bottom: 1px solid red; width: 20px; display: inline-block;"></span> Hubungan Dekat
<span style="background-color: #800080; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> Private	<span style="border-bottom: 1px dashed blue; width: 20px; display: inline-block;"></span> Hubungan Jauh

Gambar 5. Bagan hubungan kedekatan ruang.

Hubungan kedekatan mebel digunakan sebagai acuan untuk membentuk kelompok modul mebel, di mana satu modul tidak akan memiliki fungsi guna ganda dalam periode waktu yang sama. Sehingga kebutuhan user terhadap mebel akan tetap terpenuhi tanpa menghilangkan satu fasilitas yang sedang dibutuhkan.



Keterangan Hubungan Mebel	
<span style="border-bottom: 1px solid red; width: 20px; display: inline-block;"></span>	Hubungan Dekat (dimana ada A, seharusnya ada B)
<span style="border-bottom: 1px dashed blue; width: 20px; display: inline-block;"></span>	Hubungan Jauh (dimana ada A, bisa ada B)

Gambar 6. Bagan hubungan kedekatan mebel.

Berdasarkan analisa kebutuhan pengguna akan mebel, hubungan kedekatan ruang dan kedekatan mebel, modul akan dipecah menjadi lima modul. Mebel yang berada di dalam satu modul, dapat memiliki fungsi ganda atau dapat dialihfungsikan, disesuaikan dengan kebutuhan anak terhadap mebel pada usia tertentu. Pengelompokan modul tersebut dibagi atas:

1. Modul A meliputi fungsi *baby crib*, *play yard*, *play table* dan *bed*.
2. Modul B meliputi fungsi lemari mainan, lemari buku dan papan tulis.
3. Modul C berfungsi sebagai fasilitas wadah, yaitu lemari pakaian anak.
4. Modul D berfungsi sebagai *table baby*, *meja belajar* dan *play table chair*.
5. Modul E berfungsi sebagai *baby walker*, *baby high chair* dan *study chair*.

Material rangka menggunakan material kayu pinus yang memiliki serat cukup halus dan mudah untuk diolah dan diproses menjadi mebel. Selain itu, kayu pinus memiliki kelas kuat yang cukup baik sehingga aman untuk digunakan sebagai material mebel anak. Selain itu multipleks digunakan sebagai material yang tidak menerima beban yang besar. Kombinasi material ini akan menghasilkan mebel yang kokoh, namun masih mudah dipindahkan karena ringan.

Sistim konstruksi yang digunakan akan banyak menggunakan sistem *knockdown* dan *interlocking* kayu yang diperkuat dengan baut dan sekrup. Hal ini untuk memudahkan bongkar pasang modul mebel yang ada sesuai usia pemakaian dan fungsinya, terutama pada mebel kayu yang mengalami transformasi bentuk dan digunakan pada usia berbeda.

## KONSEP DAN DESAIN AKHIR

### Konsep

Latar belakang pemilihan konsep dilandasi pada kondisi psikologis pengguna yakni anak usia dini yang belajar melalui hal-hal yang menyenangkan. Di sisi lain, anak usia dini, yaitu yang berumur nol hingga tujuh tahun, berada dalam fase perkembangan yang sangat penting, meliputi psikomotorik, kognitif, dan fisik.

Dalam menstimulasi kekuatan motorik serta penalaran dan kekuatan sensorik, dibutuhkan pelatihan yang melingkupi tiga aspek yaitu eksploratif (merangsang pikiran anak), asosiatif (menuntut keterlibatan anak) dan edukatif (memberikan pembelajaran anak). Pelatihan yang terbaik yang dapat diberikan pada anak usia dini adalah melalui media permainan atau sering disebut sebagai belajar melalui permainan (*learning through play*).

Anak dalam perkembangan fisiknya membutuhkan perabot agar bertumbuh secara maksimal. Perlu disadari bahwa antropometri anak dan orang dewasa sangatlah berbeda sehingga diperlukan perabot khusus untuk anak. Menimbang ketersediaan ruang yang terbatas serta pertumbuhan tubuh anak yang berkembang cepat, solusi yang terbaik adalah menggunakan mebel yang bersifat modular. Sifat modular meliputi tiga sifat, yaitu praktis, ringan dan memiliki bentuk umum. Praktis memiliki arti dapat dialihfungsikan (*convertible*), sistem konstruksi yang mudah dioperasikan (*simple*) dan mudah dirakit kembali. Di sisi berbeda, mebel harus bersifat multifungsi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak dalam aktivitas mereka sehari-hari. Mebel multifungsi harus dapat memberikan *support* dalam beraktivitas, dapat bertahan hingga anak berumur tujuh tahun (*longlasting*) dan fleksibel sehingga peletakan mebel mengikuti kebutuhan user (*portable*).

Berdasarkan kebutuhan akan *learning through play* dengan menggunakan mebel modular dan multifungsi, konsep yang dipilih adalah *FUN IN FUNCTION*.

Konsep *fun in function* terdiri dari dua kata pembentuk, yaitu *fun* dan *function*. *Fun* memiliki tiga nilai konsep, yaitu *playable*, *color matters* dan *interactive*. *Playable* memiliki arti mebel memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat bermain melalui mebel tersebut. *Color matters* bermakna bahwa pemilihan warna mebel didasari pada penelitian ketertarikan anak pada warna. *Interactive* berarti anak dapat berpartisipasi aktif menggunakan mebel tersebut. *Function* memiliki lima nilai konsep, yaitu *useful*, *easy to use*, *safe for kids*, *durable*, *stable* dan *multiple usage*. *Useful* memiliki makna bahwa mebel dapat memberikan fungsi sesuai yang diharapkan *buyer*. *Easy to use* memberikan pengertian bahwa user akan diberikan kemudahan dalam menggunakan setiap fungsi dari bagian mebel. Perhatian pada aspek keamanan mebel terutama untuk anak usia dini adalah penjabaran dari *safe for kids*. Mebel tidak hanya harus kokoh (*stable*),

namun harus memiliki konstruksi yang baik sehingga awet untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama (*durable*). Penggunaan mebel harus dapat divariasikan untuk dapat mendukung beberapa aktivitas sekaligus sehingga dapat menghemat tempat maupun biaya (*multiple usage*).

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa *fun in function* adalah sebuah konsep di mana menggabungkan sebuah proses *learning through play* yang dibutuhkan dalam perkembangan psikomotor, kognitif serta fisik anak dengan fungsi mebel yang secara utuh mendukung aktivitas anak-anak melalui mebel yang aman, mudah, kuat, multifungsi sehingga dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama.

Konsep ini mengusung gaya *shaker* dan *arts and crafts*. *Shaker* memiliki arti keindahan ditemukan dari kegunaan dari desain itu sendiri. Sedangkan *art and crafts* adalah suatu gaya desain di mana keindahan ditemukan dalam *craftsmanship*. Perancangan menganut prinsip "*form follow functions*" yang berarti bentuk desain disesuaikan dengan fungsi yang dimiliki.

### Aplikasi Konsep

Berdasarkan dengan konsep dan tema perancangan, maka beberapa aplikasi konsep yang dituangkan dalam tujuh bagian, yaitu bentuk, organisasi mebel, material, *finishing*, warna, konstruksi, dan permainan.

Bentuk yang dipakai adalah bentuk persegi. Berdasarkan kuesioner yang telah disebar, lembaga PAUD lebih menyukai bentuk persegi untuk mebel yang dimiliki dikarenakan dapat lebih menghemat tempat dan mudah dalam penyimpanan. Sedangkan untuk kuesioner yang disebarkan kepada orang tua menunjukkan bahwa orang tua lebih menyukai bentuk bulat dan segitiga. Berdasarkan gaya *form follow function*, maka bentuk persegi dipilih. Bentuk persegi cenderung mudah untuk diaplikasikan dalam ruang karena memiliki bentuk geometris yang sederhana dan bersifat sangat fleksibel. Keempat sisi persegi yang sama panjang dan keempat sudutnya yang saling tegak lurus menghasilkan keteraturan dan kejernihan visual. Untuk mengkonsiderasi aspek keamanan untuk anak usia dini, sudut tajam akan dihilangkan.

Peletakan mebel sistem *cluster*, berbentuk kelompok dengan pendekatan fisik fungsional dari masing-masing komponen mebel. Peletakan mebel berdasarkan kedekatan fungsi mebel terhadap jenis guna ruang, mengakibatkan hubungan kedekatan ruang yang terkolaborasi dengan kedekatan mebel di dalam ruang. Hal ini menyebabkan kehadiran mebel yang menghubungkan ruang di antaranya pada saat mebel diletakkan atau digerakkan. Mebel akan dikelompokkan berdasarkan fungsi terhadap penggunaannya, memberi fleksibilitas terhadap peletakan dengan persyaratan fungsional berkenaan dengan ukuran, wujud, dan jarak letak volume, bentuk tunggal dan variasi tampak juga dipertimbangkan.

Material yang dipilih merupakan material yang bersifat ringan sehingga pengguna dapat dengan mudah memfungsikan setiap bagian dari mebel. Selain itu, kekuatan material mebel menjadi bahan pertimbangan pemilihan mebel dikarenakan mebel diharapkan dapat digunakan dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, untuk bagian yang membutuhkan kekuatan konstruksi dan bagian daya tekan rentan menggunakan kayu solid pinus. Selain karena kekuatannya, kayu pinus juga memiliki warna kuning keputihan dengan serat dan mata kayu yang cukup kontras sehingga memiliki nilai keindahan tersendiri. Sebagai material pendamping, digunakan material multipleks yang difungsikan pada bagian ringan dan tidak menumpu beban berat.

*Finishing mebel* didasarkan pada anak-anak sebagai user dari mebel ini. Tidak diaplikasikan warna solid terlalu dominan pada mebel agar tetap sesuai dengan nuansa monochrome pada interior apartemen. Sebagian besar kayu pinus akan diekspos seratnya. Kayu pinus akan dihaluskan dan diberi *wood stain clear doff* agar tidak merubah warna asli kayu. Sedangkan untuk beberapa bagian minor akan diberikan *finishing waterbased color*, berwarna kuning, merah dan biru. Lapisan waterbased hanya akan dikuas tipis pada permukaan kayu sehingga serat masih dapat terlihat secara samar.

Warna primer dipilih dalam perancangan karena memiliki kesan aktif dan dinamis sehingga dapat merangsang aktivitas dan meningkatkan rasa ingin tahu dari anak. Warna dominan kuning memberikan kesan gembira, penuh energi dan hangat. Warna biru juga dipilih karena dapat menimbulkan suasana dingin, tenang, nyaman dan tentram, dapat memperluas imajinasi dan memperlancar komunikasi. Sebagai warna subordinat, merah dapat membangkitkan semangat dan keberanian anak sehingga mendukung proses belajar melalui bermain. Warna ini diaplikasikan sebagai aksentuasi, dengan dominasi warna asli kayu pinus pada mebel. Kayu pinus memiliki warna kuning keputihan yang tergolong terang dan netral sehingga aplikasi warna primer tidak bertubrukan. Kehadiran warna primer pada mebel akan memiliki kesan yang lebih kuat dibandingkan kayu pinus.

Konstruksi yang digunakan adalah sistem *knockdown* pada mayoritas bagian. Konstruksi *knockdown* digunakan karena kekuatannya. Konstruksi dengan cara membentuk *joint custom* dari kayu, aplikasi sistem *interlocking* seperti puzzle dengan bantuan sekrup *knockdown* putar ujung pyramid. Kekuatan terjamin sebab kayu tidak akan mudah rusak, dan pertemuan antar kayu jarang mengalami gesekan, muai susut kayu menyebabkan ukuran *joint* semakin erat dari waktu ke waktu. Antar komponen pembentuk mebel akan lebih solid dan kokoh sebab di setiap pertemuan jointnya terdapat kekuatan. Beberapa bagian menggunakan konstruksi sistem lipat. Konstruksi sistem lipat memiliki kelemahan karena kekuatannya hanya bergantung pada *stopper*. Sistem lipat hanya diaplikasikan pada bagian yang mengalami daya tekan vertikal dan tidak memiliki daya tekan horizontal.

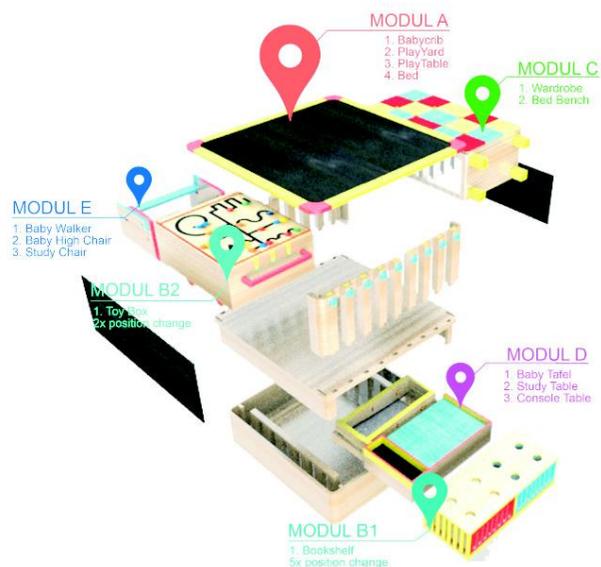
Pada mebel diaplikasikan permainan yang dapat menstimulasi tumbuh kembang anak terutama pada pelatihan saraf sensorik dan motorik. Permainan dikolaborasi dengan mebel tanpa menimbulkan adanya suatu komponen baru di luar mebel tersebut. Sistem aplikasi permainan pada mebel adalah dengan meleburkan permainan ke salah satu komponen mebel. Hal ini akan menjawab kebutuhan user akan permainan anak tanpa menambah ruang yang perlu diakomodasikan untuk penyimpanan permainan. Beberapa sistem permainan yang dipakai adalah permainan balokan kayu dengan berbagai bentuk yang dapat diputar dan digerakkan pada poros jeruji, corat-coret pada meja bermain, *maze* dan permainan angka pada *toybox*.

### Aplikasi Desain

Modul mebel aplikasi desain berupa sebuah kotak dengan dimensi 1000 mm × 1000 mm × 620 mm, di mana sisi atas modul terdiri dari dua plat papan yang dikunci dengan sistem *framing knock down*. Pada dua sisi terdapat rel dan dua sisi lainnya dikunci oleh papan. Modul awal ini menyimpan modul lainnya di dalamnya sehingga tersusun rapi. Hal ini dapat dilihat melalui gambar 7 dan gambar 8 di bawah ini:



Gambar 7. Modul awal.



Gambar 8. Explode view modul keseluruhan.

Modul A memiliki total 4 fungsi, sebagai *baby crib*, *play yard*, *play table*, dan ranjang anak. Fungsi awal sebagai *baby crib* dibentuk dengan cara menarik sisi kanan dan kiri *frame knockdown*, kemudian menarik papan tutup atas

dan memasang kembali *frame* hingga terkunci. Papan ini kemudian diletakkan pada sisi kanan dan kiri *baby crib*, menggantikan papan pelindung awal. *Railing* yang dapat dilihat pada gambar 9 dapat ditarik hingga mencapai ketinggian 580 mm agar anak terjaga aman di dalam *baby crib* dan tidak dapat memanjat serta melompat keluar.



**Gambar 9.** Modul A fungsi *baby crib*.

Papan pada sisi kanan dan kiri modul A (gambar 9) terbuat dari multipleks dengan finishing cat magneto lapis cat kayu hitam. Permukaan papan bersifat *magnetic* sehingga anak dapat bermain menempelkan berbagai macam benda seperti magnet alphabet, magnet berbentuk buah dan hewan, dan magnet balok kayu. Permainan magnet ini mengasah kemampuan sensorik anak dalam hal penglihatan dan sentuhan. Untuk kemampuan motorik kasar, anak belajar untuk menggenggam permainan magnet, meraih dan menarik permainan magnet dari papan. Selain itu, cat hitam pada permukaan membuat papan dapat digunakan sebagai *blackboard* untuk melatih kemampuan motorik halus anak dalam membuat coretan. (A1)



**Gambar 10.** Permainan pelatihan kemampuan sensorik dan motorik pada modul a (a1: magnetic board & blackboard) (a2: hanging toys)

Pada *railing* di sisi modul A dapat diberi gantungan permainan boneka yang merangsang kemampuan motorik kasar anak untuk meraih dan menggenggamnya. Boneka ini memiliki sifat empuk dan lembut sehingga dapat melatih kemampuan motorik halus anak dalam pergerakan jemari tangannya untuk meremas dan memegang. (A2)

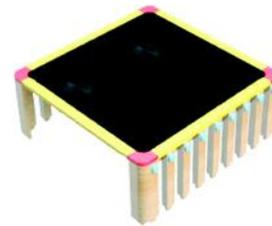
Jika ingin digunakan sebagai *play yard*, alas modul dapat dilepas sehingga menjadi lebih mudah dan ringan untuk

dipindahkan. Dapat diberikan matras berukuran 950 mm × 950 mm sebagai alas *play yard*, maupun diisi dengan bola-bola menjadi kotak mandi bola (gambar 11).



**Gambar 11.** Modul A fungsi *play yard*.

Ketika anak sudah menginjak usia 4 tahun dan tidak lagi membutuhkan *baby crib* maupun *play yard*, modul A dapat difungsikan sebagai *play table* dengan melepas *frame knockdown* dan mengembalikan papan dari sisi samping ke sisi atas lagi. *Play table* memiliki ketinggian 350 mm, digunakan oleh anak sembari duduk di lantai. Papan bagian atas merupakan *black board* yang dapat menjadi wadah bagi anak untuk menuangkan kreativitas dan kreasinya. Hal ini dapat dilihat melalui gambar 12 di bawah ini:



**Gambar 12.** Modul A fungsi *play table*.

Ketika anak bertambah tinggi dan sudah tidak lagi dapat menggunakan *baby crib* sebagai fasilitas tidur, modul ranjang yang digunakan sebagai alas modul awal dapat diubah menjadi sebuah ranjang anak. Dengan menggunakan sistem *interlocking* ulir lidah, pengguna dapat menarik kedua sisi menambahkan panjang modul awal dari 600 mm menjadi 1600 mm, menghasilkan dipan tempat tidur anak berukuran 1600 mm × 600 mm × 250 mm (gambar 13).



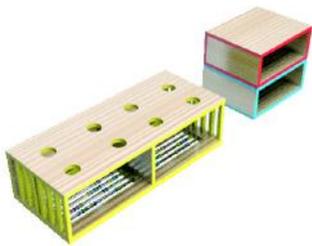
**Gambar 13.** Modul A ranjang tidur anak.

Modul B1 (gambar 14) memiliki fungsi sebagai *bookshelf* dengan perubahan posisi sebanyak 5 kali. Modul *bookshelf* tersimpan di dalam alas modul awal, terdiri dari 3 komponen kotak. Terdapat 1 kotak besar dan 2 kotak kecil. Pada awal modul ini disimpan di dalam packaging, kedua kotak kecil dimasukkan ke dalam kotak besar agar rapi dan ringkas.



**Gambar 14.** Modul B1 posisi awal.

Kotak pertama memiliki ukuran 720 mm × 300 mm × 200 mm dan terdapat 8 buah lubang dengan diameter 50 mm di sisi atas kotak. Kotak kedua dan ketiga memiliki ukuran 338 mm × 270 mm × 160 mm. Pada susunan posisi 1, kotak kecil dapat ditarik keluar dan disusun tumpuk sehingga membentuk sebuah nakas dengan ketinggian 320 mm. Kotak besar dapat berdiri sendiri secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dapat dilihat dari gambar 15 dan gambar 16 di bawah ini:

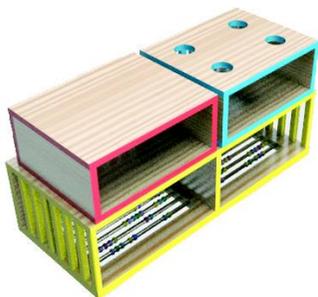


**Gambar 15.** Modul B1 posisi 1.



**Gambar 16.** Modul B1 posisi 2.

Dua buah kotak kecil masing-masing memiliki 4 buah tabung silinder dengan diameter 50 mm setinggi 150 mm yang digunakan untuk mengunci peletakan kotak kecil diatas kotak besar pada posisi 3. Pada posisi ini terbentuk sebuah *bookshelf* setinggi 360 mm dengan 4 *compartment* untuk meletakkan buku anak (gambar 17).



**Gambar 17** Modul B1 posisi 3.

Pada kotak kedua juga terdapat 4 buah lubang berdiameter 50 mm sehingga kotak ketiga dapat ditumpuk diatas kotak kedua menghasilkan posisi 4. Peletakan ini menghasilkan ruang di atas kotak besar bila anak hendak meletakkan barang maupun hiasan secara bebas (gambar 18).

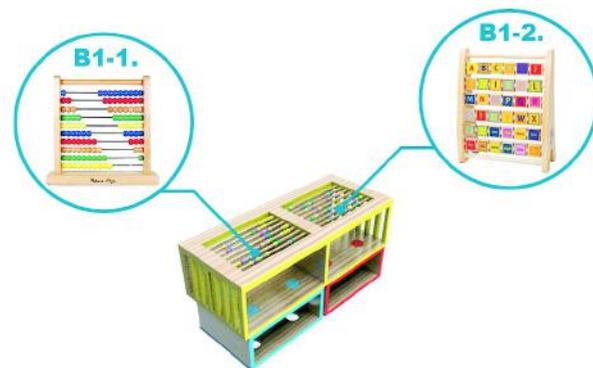


**Gambar 18.** Modul B1 posisi 4.

Posisi 5 dapat dibentuk dengan meletakkan kedua kotak kecil di bawah kotak besar, dengan sisi permainan di atas. *Bookshelf* dengan posisi ini juga bisa digunakan sebagai meja bermain. Ketinggian *bookshelf* pada 360 mm memungkinkan anak untuk berdiri sambil bermain.



**Gambar 19.** Modul B1 posisi 5.

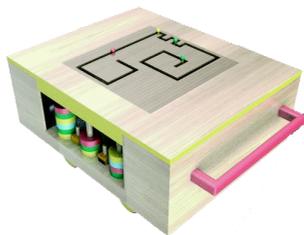


**Gambar 20.** Permainan pelatihan kemampuan sensorik dan motorik pada modul b1 (b1-1: *abacus*) (b1-2: *board block books*).

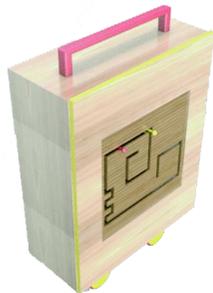
Permainan *abacus* diterapkan pada sisi kiri bidang permukaan box besar. *Abacus* dimainkan dengan cara seperti sempoa untuk melatih anak dalam berhitung. Permainan ini melatih kemampuan sensorik anak dalam indera penglihatan dan sentuhan. Kemampuan motorik kasar yang dilatih adalah daya tarik pada saat anak menggeser bola ke kiri dan kanan. Kemampuan motorik halus yang dilatih adalah memegang permainan menggunakan otot jemarinya (B1-1). Pada sisi kanan bidang permukaan box besar diterapkan permainan

*board block books*. Permainan ini melatih kemampuan sensorik dan motorik yang sama seperti *abascus*. Namun guna permainan ini adalah untuk belajar mengenai alfabet, kata benda dan cara membaca (B2-2).

Modul B2 berupa *toybox* berbentuk kotak yang berukuran 450 mm × 550 mm × 200 mm. Sistem bukaan menggunakan engsel kupu dengan catches trusty untuk kuncinya. *Toybox* memiliki fitur roda sehingga mudah dibawa dan dipindahkan antar ruang. Roda bersifat tidak paten, sehingga bisa dilepas dan peletakkannya menyesuaikan posisi *toybox* hendak diletakkan atau diberdirikan. Posisi saat berdiri akan lebih menghemat tempat area penyimpanan. Namun untuk menggunakan permainan yang ada pada permukaan, pengguna akan lebih mudah mengakses saat posisi diletakkan.

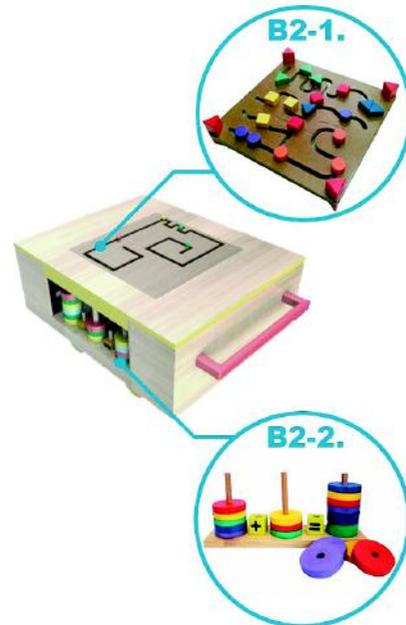


**Gambar 21.** Modul B2 posisi tidur.



**Gambar 22.** Modul B2 posisi berdiri.

Pada permukaan *toybox*, terdapat aplikasi permainan *maze*, yaitu menggerakkan sebuah benda mengikuti alur. Permainan ini efektif dalam mengembangkan sensorik anak dalam menyentuh dan merasakan bentuk benda sembari memperkuat kemampuan motorik dalam menggenggam dan meremas (B2-1). Pada sisi samping *toybox* terdapat permainan lingkaran hitung. Terdapat 5 buah pasak tiang yang dapat dimasuki lingkaran hitung. Pasak pertama merupakan jumlah lingkaran awal, pasak kedua untuk simbol ditambah atau dikurangi, pasak ketiga untuk jumlah banyak lingkaran yang akan ditambah atau dikurangi, pasak keempat untuk simbol sama dengan, dan pasak terakhir untuk jumlah lingkaran akhir. Permainan ini melatih kemampuan anak dalam berhitung, kemampuan sensorik anak dalam penglihatan dan sentuhan, kemampuan motorik kasar dalam meraih dan menggenggam dan kemampuan motorik halus untuk menyusun dan memegang lingkaran ke dalam pasak (B2-2).



**Gambar 23.** Permainan pelatihan kemampuan sensorik dan motorik pada modul b2 (b2-1: *maze*) (b2-2: lingkaran hitung).

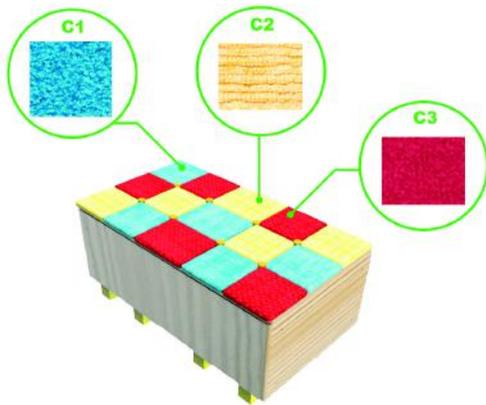
Modul C memiliki fungsi utama sebagai lemari baju, dengan besaran 900 mm × 465 mm × 300 mm. Menggunakan engsel piano sebagai sumbu buka, lemari dapat dibuka dengan menarik daun pintu di salah satu sisinya yang telah diberi lekukan sedalam 20 mm. Dilengkapi dengan plat *stainless sas* sebagai pengganti kaca untuk mencegah potensi pecah yang berbahaya bagi anak. Pada sisi dalam lemari terdapat 4 buah rak kayu bersifat *knockdown*, hanya diberi lis kayu sebagai pengganjal di sisi kiri dan kanan sehingga pengguna dapat menyesuaikan ketinggian rak yang akan digunakan.



**Gambar 24.** Modul C fungsi lemari baju.

Pada permukaan daun pintu terdapat aplikasi busa lapis kain dengan warna dan tekstur yang berbeda. Selain menarik, puff ini dapat menjadi permainan bagi anak yang dapat memberikan stimulasi bagi kemampuan sensorik anak dalam melihat, menyentuh, dan mengenal setiap tekstur dan warna. Kain hennessy 815 (C1) berwarna biru memiliki tekstur kasar menyerupai handuk. Kain rover 050 (C2) memiliki permukaan yang halus dengan ulir horizontal yang menonjol memberikan tekstur garis berwarna kuning. Kain legacy

crimson 707 (C3) berwarna merah dengan permukaan halus seperti beludru.



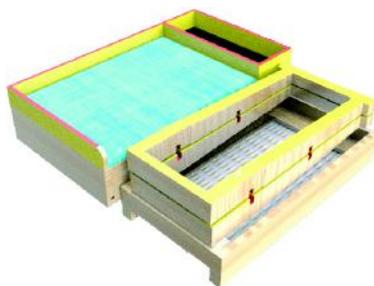
**Gambar 25.** Ragam tekstur dan warna pada *puff*.



**Gambar 26.** Modul C fungsi *bed bench*.

Ketika pakaian anak sudah mulai banyak dan lemari dirasa tidak cukup, modul c dapat diletakkan secara horizontal sehingga menjadi sebuah *bed bench* yang nyaman untuk diduduki. Ruang kosong dalam modul c tetap bisa digunakan sebagai fasilitas penyimpanan untuk berbagai kebutuhan *user*.

Modul D menawarkan fungsi fasilitas bidang kerja yang meliputi tafel bayi, *study table* dan *console table*. Modul D pada awalnya disimpan di dalam kerangka ranjang sisi bawah, bersebelahan dengan *bookshelf*. Modul ini terdiri dari 3 bagian yaitu bagian meja, bagian kaki, dan bagian rak.



**Gambar 27.** Modul D posisi awal.

Tafel bayi (gambar 28) dapat dikonstruksikan dengan cara memasukkan kaki ke dalam slot yang ada pada sisi bawah bagian meja. Setelah kaki terpasang, rak dimasukkan ke alur yang ada di kaki agar kaki tafel terkunci dan tidak goyang. Tafel memiliki ukuran 640 mm × 360 mm × 754 mm. Pada bidang permukaan meja tafel terdapat kotak kayu untuk

tempat meletakkan bedak, minyak dan peralatan perawatan bayi. Bantalan untuk tafel dapat dilepas pasang, dibalut dengan kain oscar agar tahan air dan mudah dibersihkan. Juga terdapat laci untuk menyimpan pernak pernik, maupun untuk perpanjangan meja tafel bila bidang dirasa kurang luas. Rak di bawah meja tafel dapat difungsikan untuk meletakkan pakaian, popok, maupun barang bayi lainnya.



**Gambar 28.** Modul D tafel bayi.

Ketika anak sudah dapat ganti baju mandiri dan tafel bayi tidak lagi dibutuhkan, kaki meja bagian bawah dapat dilipat hingga meja memiliki ketinggian 600 mm. Pada tahap ini anak sudah mulai belajar menulis, dan membutuhkan fasilitas bidang kerja yang memadai sehingga modul D dapat digunakan sebagai meja belajar. Bantalan tafel dapat dilepas sehingga permukaan meja rata. Bagian kotak pada sisi kanan permukaan meja dapat digunakan untuk menyimpan peralatan tulis dan mewarna.



**Gambar 29.** Modul D fungsi *study table*

Permukaan *study table* diberi finishing cat hitam dan dapat digunakan sebagai *blackboard* (gambar 30). Anak dapat menuangkan ide kreatifnya secara spontan dengan menggosokkan kapur di atasnya. Dengan melakukan kegiatan ini, kemampuan motorik halus anak dalam memegang kapur dan mencoret bidang terasah, begitu juga dengan kemampuan motorik kasar anak dalam menggenggam benda (D1). Rak diberi aplikasi *lego board* yang bisa dilepas dan digunakan sebagai bidang alas untuk merakit balokan lego sesuai dengan imajinasi anak. Permainan lego mengasah kemampuan sensori penglihatan dan sentuhan. Kemampuan motorik kasar menggenggam, meraih dan melempar anak juga terasah dalam proses bongkar pasang balokan lego. Begitu juga dengan kemampuan menyusun dan memegang balok (D2).



**Gambar 30.** Permainan pelatihan kemampuan sensorik dan motorik pada modul d (d1: *blackboard*) (d2: *lego board*).

Modul D juga dapat difungsikan sebagai *console table* (gambar 31), dengan memutar balik sisi atas meja menjadi bagian bawah yang menopang rak. *Console table* dapat digunakan untuk memajang permainan lego yang telah dirakit diatas *lego board*, menyimpan benda, memajang permainan koleksi anak, maupun meletakkan benda diatasnya seperti meja peralihan.



**Gambar 31.** Modul D fungsi *console table*.

Modul E terdiri dari balok kayu per komponennya. Pada modul awal, penyimpanan modul E dilepas per komponen dan diletakkan di dalam *toybox*, lemari baju, dan di sisi *toybox* pada bagian atas modul A. Modul ini memenuhi kebutuhan fasilitas duduk anak. Ketika anak berada pada usia 0 hingga 1 tahun, ia membutuhkan sebuah sarana untuk membantu anak belajar berjalan. Modul E dapat dikonstruksikan menjadi *baby walker*, yang dapat dilihat pada gambar 32, untuk melatih kemampuan motorik mereka. *Baby walker* dapat dikonstruksikan dengan menyusun komponen yang ada, balok satu dengan lainnya akan saling mengunci karena ukuran lubang dan balok kayu telah diukur dengan presisi. Dengan adanya roda berporos pusat di sisi bawah *baby walker*, bayi dengan mudah mendorong *baby walker* ini

dengan berpegangan pada *handle* horizontal maupun *handle* vertikal yang lebih tinggi.



**Gambar 32.** Modul E fungsi *baby walker*.

Pada usia dini anak cenderung aktif bergerak dan susah untuk duduk diam. Untuk mempermudah proses penyusapan, bayi membutuhkan sebuah *baby high chair* (gambar 33) sehingga pengawas dapat dengan mudah menjangkau bayi. Menggunakan komponen kayu yang telah tersedia, setelah dirakit akan terbentuk sebuah *baby high chair* dengan dudukan setinggi 590 mm. Dilengkapi dengan kayu pengaman di sisi kiri dan kanan, serta sandaran dan meja di sisi depan kursi sehingga anak aman duduk di kursi. Meja dapat diatur pada 2 ketinggian, yaitu 140 mm dari dudukan dan 180 mm dari dudukan. Ketinggian yang berbeda ini disediakan agar meja dapat disesuaikan dengan tebal maksimum paha anak terhadap meja.



**Gambar 33.** Modul E fungsi *baby high chair*.

Ketika tidak lagi dibutuhkan, perpanjangan kaki serta meja dari *baby high chair* dapat dilepas sehingga terbentuklah sebuah *study chair*, yang dapat dipakai untuk melengkapi *study table* yang dibentuk dari modul D. Dudukan kursi terbuat dari kayu dan bersifat keras agar memacu semangat belajar anak dan tidak membuat anak merasa terlalu nyaman dan malas. Sandaran tegak juga membuat anak lebih fokus dalam proses pembelajarannya.



**Gambar 34.** Modul E fungsi *study chair*.

**Simulasi Ruang**

Peletakkan modul mebel pada *layout* interior apartemen bersifat fleksibel. Modul A dapat diletakkan di kamar anak sebagai *baby crib*, *play yard*, *play table* maupun ranjang anak. Modul A juga dapat diletakkan di kamar orang tua agar memudahkan jarak pandang pengawasan saat orang tua hendak beraktivitas di kamarnya. Peletakkan juga dapat dilakukan di area kosong lainnya seperti *foyer* dan *living area*. Hal ini dapat dilihat melalui gambar 35 di bawah ini.



**Gambar 35.** Simulasi interior A



**Gambar 36.** Simulasi interior B

Modul B *bookshelf* dan *toybox* dapat diletakkan di kamar anak, *living area*, *foyer*, maupun kamar orang tua. Dimensi mebel yang relatif kecil membuat kedua modul ini mudah dipindahkan sesuai dengan kebutuhan user. Modul C yang berfungsi sebagai lemari baju dan *bed bench* dapat diletakkan di kamar anak karena memiliki fungsi sebagai fasilitas penyimpanan semi permanen. Hal ini dapat dilihat melalui gambar 36 di atas. Untuk hasil simulasi per ruangannya, peletakkan modul masing-masing mebel dapat dilihat pada gambar 37 hingga gambar 43 di bawah ini:



**Gambar 37.** Nuansa foyer dan living area



**Gambar 38.** Nuansa living area, dining area dan pantry



**Gambar 39.** Nuansa foyer dengan modul a sebagai play table



**Gambar 40.** Nuansa kamar anak 1



**Gambar 41.** Nuansa kamar anak 2



**Gambar 42.** Nuansa kamar orang tua dengan modul a sebagai play yard



**Gambar 43.** Modul D fungsi tafel bayi pada kamar mandi

Modul D sebagai tafel bayi dapat diletakkan di kamar anak, atau di kamar mandi untuk meminimalisir resiko terjadinya kotoran tercecer di kamar. Modul D fungsi study table dapat diletakkan di kamar anak dan fungsi sebagai console table dapat diletakkan baik di kamar anak, foyer, living area maupun kamar orang tua karena fungsinya yang

universal. Modul E sebagai fasilitas *baby high chair* dapat diletakkan di *dining area*. Pada saat modul E difungsikan sebagai *baby walker*, sifatnya fleksibel sebab guna awal dari *baby walker* adalah untuk membantu anak belajar berjalan. Untuk fungsi modul E sebagai *study chair* dapat diletakkan di kamar anak.

## KESIMPULAN

Permasalahan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi telah mengakibatkan minimnya ruang yang dapat digunakan untuk meletakkan mebel maupun permainan anak, yang dibutuhkan pada perkembangan sensorik dan motorik anak usia dini. Hal ini mempengaruhi kemampuan anak di saat ia telah dewasa. Melalui proses analisa dengan melalui pendekatan pragmatis, dihasilkan olah bentuk mebel multifungsi untuk anak usia dini dengan mengambil konsep *Fun in Function*, yang menggabungkan sebuah proses *learning through play* yang dibutuhkan dalam perkembangan psikomotor, kognitif serta fisik anak dengan fungsi mebel yang secara utuh mendukung aktivitas anak-anak melalui mebel yang aman, mudah, kuat, multifungsi sehingga dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama. Terdapat 15 fungsi yang dapat dihasilkan yang dapat mendukung aktivitas anak dari umur nol hingga tujuh tahun beserta dengan permainan yang dapat mendukung perkembangan kemampuan sensorik dan motorik anak. Mebel ini dapat menjadi jawaban terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat pada mebel anak usia dini.

## DAFTAR PUSTAKA

1. BPS. *Statistik Indonesia*. Jakarta: BPS, 2010.
2. Margaret, Gerdler. *Belajar Dan Membelajarkan*. Seri Pustaka Teknologi Pendidikan No. 11, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
3. Brewer MB. *The importance of being we: Human nature and intergroup relations*. *American Psychologist Number 62* (2007): 728–738.
4. Santosa, Adi. "Pendekatan Konseptual Dalam Perancangan Interior." *Dimensi Interior Vol. 3, No. 2* (Desember 2005). 1 Desember 2014
5. Ching, Francis D.K. *Ilustrasi Desain Interior*. Trans.Paul Hanoto Adjie. Jakarta: Erlangga, 1996.
6. Ministry of Cosumer Affairs, Manat Kaihokohoko. *Keeping Kids Safe: Children's and Nursery Products*. New Zealand: Ministry of Business, Innovation & Employment, 2013.
7. International Tropical Timber Organization. *A Handbook of Selected Indonesian Wood Species*. Indonesia: Indonesian Sawmill and Woodworking Association, 2008.
8. Mayangsari, Sriti. *Peran Warna Interior terhadap Perkembangan dan Pendidikan Anak di Taman Kanak-Kanak*. *Jurnal Dimensi Interior*, Vol. 2: No. 1, 2004.
9. Pakarinen T. *Success factors of wood as a furniture material*. *For. Prod. J.* 49 (9), 79–85, 1999.
10. Rogers C & J Sawyers. *Play in the lives of children*. Washington: NAEYC, 1988.
11. Semiawan R. Conny. *Pendidikan Keluarga dalam era Global*. Jakarta: Pres Hallindo, 2002.

# Kepuasan Pengguna Potensial terhadap Koleksi dan Layanan Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo

## The Satisfaction of Potential Users to The Service and collection of Books in The Library of STIKES Dr. Soetomo Hospital Foundation

Widi Astuti

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Yayasan RS Dr. Soetomo  
Jl. Karangmenjangan No. 12 Surabaya

### ABSTRACT

*Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo, mendeskripsikan kepuasan pengguna potensial terhadap Perpustakaan STIKES Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo. Objek penelitian adalah mahasiswa dan dosen yang berjumlah 100 sampel (90 mahasiswa 10 dosen). Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo khususnya Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo dan dapat dijadikan sebagai masukan bagi perpustakaan maupun manajemen STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo dalam menentukan pengembangan perpustakaan agar dapat memuaskan pengguna potensial, sebagai sarana untuk pendidikan, penelitian dan dosen. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode analisis deskriptif, skala linkert dan menggunakan SPSS 17, pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, kuesioner, dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa kriteria pengguna potensial dengan nilai kriteria kepuasan terhadap koleksi, layanan dan sikap petugas Perpustakaan pada bulan Desember 2014 s.d. Pebruari tahun 2015 sebesar 3,69 dengan kriteria puas, hasil tersebut menunjukkan bahwa layanan dan sikap petugas perpustakaan dapat memuaskan pengguna potensial. Kepuasan terhadap Koleksi dengan nilai kriteria 3,38 kriteria cukup puas disebabkan karena ada koleksi yang masih perlu ditingkatkan dalam jumlah dan judul dan kualitas.*

**Kata kunci:** *kepuasan, pengguna potensial, perpustakaan*

### ABSTRACT

*This research was conducted in the Library STIKES Dr. Soetomo Hospital Foundation, describing potential user. Object of research is the students and lecturers of the 100 samples (90 students 10 lecturers) Hopefully this research will benefit the STIKES especially Library and can be used as input for the library as well as the management in determining the development of the library in order to satisfy potential users, as a means of education, research and lecturer. This research was conducted with descriptive analysis method, scale linkert and using SPSS 17, data collection is done by observation, questionnaires, and interviews. Based on research that has been conducted, it can be concluded that the criteria for potential users to the value of the collection criteria satisfaction, service and attitude of Library officials in December 2014 to February 2015 amounted to 3.69 with the criteria satisfied, the result shows that the service and attitude of the librarian can satisfy potential users. Satisfaction of the collection with the value 3.38 criterion criteria quite satisfied because there are collections that still need to be improved in the number and title and quality.*

**Key words:** *satisfaction, potential users, the library*

STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya yang menyelenggarakan pendidikan yang terdiri dari 2 (dua) Prodi yaitu di Prodi D-III Rekam Medik dan Infor-masi Kesehatan (RMIK) dan S-1. Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo mempunyai peranan yang penting dalam menunjang kegiatan aktivitas perkuliahan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya sebagai unit penunjang kegiatan akademik, Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo menyediakan beberapa pelayanan, yang meliputi koleksi bahan pustaka dan layanan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo pada khususnya, dosen serta staf dan kemungkinan

dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain, dan masyarakat di sekitar kampus. Evaluasi terhadap kinerja pelayanan Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo belum dilakukan oleh pihak internal STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo yaitu oleh Penjaminan Mutu STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo

Menurut Turk (2007), evaluasi terhadap kepuasan merupakan hal yang penting untuk mendapatkan informasi tentang kinerja dari pelayanan perpustakaan sehingga pelayanan yang telah diberikan dapat ditingkatkan dan keberadaan perpustakaan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penggunaannya. Sebagai pusat layanan informasi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna,

kepuasan terhadap jasa pelayanan merupakan salah satu hal yang penting bagi Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo.

Menurut Irmansyah, 2006, dengan memberikan kepuasan kepada pengguna diharapkan fungsi dan tujuan dari perpustakaan dapat dicapai. Untuk itu perlu dilakukan penelitian kepuasan jasa pelayanan Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo.

Dengan demikian faktor-faktor kepuasan jasa pelayanan pengunjung dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan dalam pengembangan Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo. Sesuai dengan harapan pemustaka.

American Library Association (1987), mengartikan perpustakaan sebagai suatu koleksi buku dan bahan pustaka lainnya yang diorganisasikan dan administrasikan untuk keperluan membaca konsultasi dan studi. Perpustakaan sebagai gudang ilmu menyediakan berbagai macam bahan sumber informasi dan fasilitas yang tidak terbatas jumlahnya dalam bentuk buku, jurnal, majalah, dan sebagainya untuk kemudahan belajar mahasiswa. Koleksi buku dan bahan pustaka tersebut mengandung berbagai informasi yang diperlukan

Sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi, perguruan tinggi dikelola dengan berpedoman pada kepentingan sivitas akademika yang terdiri dari mahasiswa, tenaga pengajar dan karyawan. Dalam pelaksanaannya perguruan tinggi harus dilengkapi dengan berbagai fasilitas guna mendukung keberhasilan tujuan dari program perguruan tinggi. Salah satu fasilitas pendukung keberhasilan suatu perguruan tinggi adalah melalui penyediaan perpustakaan yang turut melaksanakan tridharma melalui penyediaan, pengorganisasian, dan memberikan pelayanan kepada pengguna perpustakaan.

Tujuan utama diselenggarakannya perguruan tinggi adalah untuk mendukung, memperlancar serta mempertinggi kualitas pelaksanaan program kegiatan perguruan tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut upaya yang dilakukan oleh perpustakaan perguruan tinggi adalah dengan cara mengumpulkan, mengolah dan memanfaatkan bahan pustaka kepada pemakai jasa perpustakaan perguruan tinggi yaitu civitas akademika.

STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo adalah perguruan tinggi swasta di bawah naungan Yayasan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo di mana dahulu bernama Akademi Perkam Medik dan Informatika Kesehatan (APIKES) Pena Husada. Berdasarkan ijin operasional keputusan Dirjen Dikti Kemendikbud Nomor 31/E/O/2012 tanggal 26 Januari tentang perubahan bentuk Akademi Perkam Medik dan Informatika Kesehatan (APIKES) Pena Husada menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo.

STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo mempunyai 2 (dua) Program Studi (Prodi), yaitu Prodi D-III Rekam Medik dan

Informasi Kesehatan (RMIK) dan Prodi S-1 Administrasi Rumah Sakit (ARS), 2 (dua) program studi tersebut didirikan berdasarkan bahwa tenaga kesehatan ahli madya perekam kesehatan serta sarjana administrasi rumah sakit adalah tenaga kesehatan yang mempunyai peran strategis untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pengelolaan Rumah Sakit di era persaingan global. Pendidikan S-1 Administrasi Rumah Sakit dan D-III Rekam Medik dan Informasi Kesehatan didesain untuk menyiapkan lulusan yang memiliki kualifikasi manajerial di bidang manajemen dan rekam medis di rumah sakit.

Perpustakaan perguruan tinggi merupakan unsur penunjang perguruan tinggi bersama-sama dengan unsur penunjang lainnya, yang berperan serta dalam melaksanakan tercapainya visi dan misi perguruan tingginya. Tugas perpustakaan adalah memberi layanan, mengembangkan koleksi, mengolah dan merawat bahan perpustakaan, serta melaksanakan administrasi perpustakaan. Kelima tugas tersebut dilaksanakan dengan sistem administrasi dan organisasi yang berlaku bagi penyelenggaraan sebuah perpustakaan di institusi pendidikan. Dengan adanya perpustakaan diharapkan peserta didik diberi kesempatan ikut aktif membuka dan mengembangkan pemikiran serta potensi yang dimilikinya dengan menggunakan koleksi yang terdapat di perpustakaan Seiring dengan tuntutan tersebut di atas dalam rangka peningkatan mutu dan akuntabilitas pendidikan tenaga kesehatan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan nasional dan global perlu disiapkan acuan Perpustakaan yang mempunyai koleksi mendekati Standar Perpustakaan Perekam Medik dan Informasi Kesehatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2010, agar perpustakaan di institusi pendidikan terstandar sebagai unsur menunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan aktivitas ilmiah lainnya.

Menurut Dikti (1994) Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah: Merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bersama-sama dengan unit lain turut melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan cara memilih, merawat serta melayani sumber informasi kepada lembaga induknya pada khususnya dan masyarakat akademis pada umumnya.

Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo telah menempati gedung baru yang lebih aman pada awal tahun 2015, perpustakaan menyediakan bahan literatur, fasilitas penggunaan literatur untuk pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar mahasiswa dan dosen di lingkungan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo. Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo adalah perpustakaan yang selalu memperhatikan penambahan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, memperhatikan mutu pelayanan bagi para pengguna serta melakukan perawatan yang baik terhadap koleksi perpustakaan yang tersedia demi kenyamanan pengguna perpustakaan.

Tenaga Perpustakaan ada 2 (dua) orang: Kepala Perpustakaan dengan pendidikan S1 Perpustakaan, 1 (satu) orang staf.

Pemanfaatan koleksi perpustakaan oleh mahasiswa memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu pendidikan dan perpustakaan hendaknya dikelola, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut bisa tercapai bila mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya dengan hasil yang baik. Keberhasilan seseorang ditentukan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Demikian pula pemanfaatan koleksi perpustakaan oleh dosen STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo memegang peranan penting untuk mempersiapkan bahan ajar sehingga menghasilkan mahasiswa yang berkualitas. Dosen juga dituntut untuk melaksanakan penelitian, perpustakaan mempunyai peranan yang sangat penting baik bagi dosen dan mahasiswa.

Salah satu faktor yang ada adalah tersedianya bahan ajar yang memberi kemudahan mahasiswa untuk mempelajarinya, sehingga dapat mendukung mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikannya. Pada penelitian terdahulu Sri R. 2014, kesesuaian koleksi perpustakaan terhadap Standar Perpustakaan Perkam Medis dan Informasi Kesehatan Pendidikan Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, Tahun 2010, koleksi perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo masih di bawah standar tersebut, selain judul buku wajib dan buku penunjang yang masih belum memenuhi standar juga jumlah ratio kebutuhan dengan jumlah mahasiswa yang dalam standar 1: 10 masih belum memenuhi syarat. Jumlah buku wajib dan buku penunjang yang ada pada Koleksi Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo masih dalam jumlah 1–5 eksemplar.

Berdasarkan data, latar belakang, maka masalah penelitian ini adalah: Kepuasan Pengguna Potensial Terhadap Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo

Responden pada penelitian ini adalah Mahasiswa dan Dosen STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo Surabaya, yang berjumlah 100 orang Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner yang ditujukan kepada para responden. Dalam penelitian ini digunakan kuesioner pada dosen dan mahasiswa.

#### KAJIAN PUSTAKA

##### *Service Quality (Mutu Pelayanan) dan Library Quality*

Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Bery terdapat lima dimensi utama kualitas jasa alat ukur kualitas pelayanan *Service Quality* mempunyai 5 (lima) dimensi yang disusun sesuai tingkat kepentingan relatifnya sebagai berikut (Fandy Tjiptono, 2005):

##### 1. Bukti fisik (*tangibles*),

Penampilan fasilitas dapat dalam pelayanan perpustakaan adalah kebersihan tempat pelayanan, dan kebersihan serta

kenyamanan ini harus terlihat di mata para pengguna perpustakaan, peralatan, penampilan karyawan, dan bahan komunikasi,

2. Reliabilitas (*reliability*), berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasa sesuai dengan waktu yang disepakati. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik dengan akurasi yang tinggi. Memberikan pelayanan kepada pengguna seperti yang diinformasikan kepada penggunanya. Misal jam buka pukul 07.00–16.00 maka perpustakaan tersebut tidak boleh terlambat dalam membuka layanan dan menutup sesuai jam yang telah dijanjikan tersebut.
3. Daya tanggap (*responsiveness*), berkaitan dengan kesediaan dan kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan merespons permintaan mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan kemudian memberikan jasa secara cepat.
4. Jaminan (*assurance*), yakni perilaku para karyawan mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi pelanggannya. Jaminan dapat berupa:
  - a. Kompetensi (*competence*)  
Dapat dilakukan dengan cara setiap orang pada perusahaan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan jasa tertentu.
  - b. Kesopanan (*courtesy*)  
Meliputi sikap santun, perhatian dan keramahan yang dimiliki para karyawan.
  - c. Keamanan (*security*)  
Dapat diartikan sebagai aman dari risiko, bahaya dan keragu-raguan. Aspek ini meliputi keamanan secara fisik, keamanan financial dan keamanan kerahasiaan.
5. Empati (*empathy*), berarti perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman. Hal ini dapat berupa:
  - a. Akses (*access*)  
Meliputi kemudahan untuk ditemui atau dihubungi. Hal ini berupa lokasi fasilitas yang mudah dijangkau, saluran komunikasi yang mudah dihubungi dan waktu menunggu yang tidak terlalu lama.
  - b. Pemahaman (*understanding*)  
Yaitu usaha memenuhi kebutuhan pelanggan.
  - c. Komunikasi (*communication*).  
Memberikan komunikasi kepada pelanggan dalam bahasa yang mudah dipahami, serta mendengarkan saran dan keluhan pelanggan.

Berdasarkan kelima dimensi utama kualitas jasa yang telah diungkapkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Bery selanjutnya dijadikan sebagai variabel-variabel yang mandiri dan akan digunakan sebagai variabel penelitian yang mempengaruhi kepuasan pelanggan.

### Pemustaka

Pada dasarnya perpustakaan tidak akan ada artinya apabila tidak ada pengunjung yang memanfaatkan atau menggunakan bahan pustaka/koleksinya yang diistilahkan dengan *user*/pemustaka/pemakai Perpustakaan. Pemustaka merupakan salah satu komponen yang menopang keberhasilan perpustakaan.

Dalam Undang-undang No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan muncul istilah baru tentang pengguna perpustakaan yaitu pemustaka. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Dalam hal ini peneliti tidak menggunakan istilah ini sesuai dengan Undang-undang tersebut, digunakan istilah pengguna perpustakaan.

Secara umum pengguna Perpustakaan (pemustaka) dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

#### 1. Pengguna potensial (potential users)

Pengguna potensial adalah pengguna yang ditargetkan dan seharusnya menjadi pengguna. Misalnya pada perpustakaan sekolah sebagai pengguna potensialnya adalah semua guru dan siswa, pada perpustakaan perguruan tinggi pengguna potensialnya adalah dosen dan mahasiswa, sedangkan pada perpustakaan umum pengguna potensialnya adalah warga masyarakat yang tinggal di wilayah dimana perpustakaan tersebut berada.

#### 2. Pengguna actual (*actual users*)

Pengguna actual adalah mereka yang telah menggunakan perpustakaan, baik pengguna actual aktif yaitu pengguna yang secara teratur (regular) berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan, maupun pengguna actual pasif yaitu pengguna yang menggunakan perpustakaan ketika ada kebutuhan atau mendapat tugas dari guru, dosen ataupun pihak lain.

### Koleksi

Koleksi perpustakaan harus lengkap dalam arti beragam subjeknya dan memadai besarnya agar dapat menunjang tujuan dan Program Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat.

#### 1. Jenis Koleksi

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi

Ruang perpustakaan dengan buku pustaka:  
Program Diploma dan Program S1

1. Buku mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) 1 judul. permata kuliah;
2. Buku mata kuliah keterampilan dan keahlian (MKK) 2 judul per mata kuliah;
3. Jumlah buku sekurang-kurangnya 10% dari jumlah mahasiswa dengan memperhatikan komposisi jenis judul;
4. Berlangganan jurnal ilmiah sekurang-kurangnya 1 judul untuk setiap program studi;

Menurut Standar Perpustakaan Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Pendidikan Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Tahun 2010

Ragam koleksi yang selayaknya tersedia di perpustakaan adalah:

#### 1. Bahan ajar

Berfungsi untuk memenuhi tujuan kurikulum. Bahan ajar/buku wajib untuk setiap mata kuliah dapat lebih dari satu judul karena cakupan isinya yang berbeda sehingga bahan yang satu dapat melengkapi bahan yang lain. Selain itu ada pula bahan ajar/buku penunjang yang dianjurkan untuk memperkaya wawasan.

#### 2. Koleksi Rujukan

Merupakan tulang punggung perpustakaan dalam menyediakan informasi yang akurat. Berbagai bentuk dan jenis informasi seperti data, fakta dan lain-lain. Jenis koleksi rujukan seperti ensiklopedi umum dan khusus, kamus umum dan khusus, buku pegangan, direktori, berbagai standar baik dalam bentuk buku atau non buku (*e-lib, e-journal, dll.*)

##### a. Terbitan Berkala

Untuk melengkapi informasi yang tidak terdapat di dalam bahan ajar dan bahan rujukan, perpustakaan berlangganan bermacam-macam terbitan berkala seperti jurnal dan surat kabar. Perpustakaan seyogianya berlangganan majalah ilmiah.

##### b. Terbitan Pemerintah

Berbagai terbitan pemerintah yang berkaitan dengan masalah kesehatan seperti lembaran negara, himpunan peraturan negara, kebijakan, laporan tahunan, pidato resmi, dsb dapat dimanfaatkan para peneliti atau dosen dalam menyiapkan kuliahnya.

##### c. Bidang Khusus

Koleksi khusus masalah kesehatan lainnya yang juga perlu diperhatikan seperti sejarah daerah, budaya daerah dan sebagainya. Berbagai macam pustaka ini memuat kekayaan informasi yang penting, tidak saja untuk memenuhi kurikulum atau penelitian tetapi untuk pengembangan ilmu. Koleksi ini harus selalu disesuaikan dengan perkembangan program studi.

##### d. Koleksi *Gray Literature*

Memuat hasil karya tulis mahasiswa (skripsi dan atau tugas akhir), hasil penelitian dosen, makalah dosen, modul pengajaran dll.

- e. Koleksi Non Cetak  
Selain koleksi bahan cetak, perpustakaan dapat menghimpun koleksi AVA seperti film, slide, kaset, video, kaset audio, dan serta koleksi media elektronika seperti compact disc dan online database.
- f. Bahan Bacaan untuk rekreasi intelektual

## 2. Jumlah Koleksi

Banyaknya koleksi ditentukan oleh berbagai faktor antara lain:

1. Jumlah program studi
2. Jumlah mata kuliah yang ditawarkan
3. Tingkat pendidikan
4. Kegiatan penelitian
5. Banyaknya buku ajar per mata kuliah
6. Jumlah dosen dan mahasiswa

Perpustakaan wajib menyediakan 100% dari bahan bacaan wajib mata kuliah yang ditawarkan di Institusi Diknakes. (Standar Perpustakaan Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Pendidikan Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Tahun 2010).

## 3. Penataan koleksi

Koleksi dapat ditata sebagai berikut:

1. Sistem terbuka, yaitu pengguna dapat langsung mendatangi rak untuk memilih dan mengambil sendiri bahan perpustakaan yang dikehendaki.
2. Ada dua macam pengaturan dan sistem terbuka yaitu tempat koleksi terpisah dari ruang baca (tata parak) dan tempat koleksi berbaur dengan ruang baca (tata baur).
3. Sistem tertutup, yaitu pengguna tidak dapat memilih dan mengambil sendiri bahan perpustakaan yang dibutuhkan, tetapi dilakukan oleh petugas perpustakaan.
4. Untuk mengembangkan koleksi, diperlukan pustakawan yang mampu:  
Bekerja sama dengan pustakawan lain dan civitas akademika
5. Memahami kecenderungan dan perubahan program institusi
6. Memahami dan tanggap akan inovasi teknologi yang berkaitan dengan pengembangan koleksi.

(Standar Perpustakaan Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Pendidikan Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Tahun 2010)

## METODE

Lokasi penelitian ini dilakukan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Rumah Sakit Dr. Soetomo, penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2014 s.d. Pebruari 2015.

## Analisis Data

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu: Kepuasan Pemakai dan Layanan Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistik deskriptif Dalam mendeskripsikan data, setiap hasil pertanyaan akan diolah sehingga menghasilkan deskripsi jawaban yang akan diolah dalam bentuk tabulasi.

Data yang dikumpulkan dari wawancara diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan bahwa pertanyaan dalam kuesioner sudah terjawab semua. Kemudian dilakukan editing, pemberian kode data dilakukan analisis data dengan teknik sebagai berikut:

1. Menganalisis Koleksi Perpustakaan.
2. Menganalisis Layanan Perpustakaan
3. Menganalisis Sikap Petugas Perpustakaan
4. Menganalisis Kepuasan Pemakai Perpustakaan berdasarkan Koleksi, Layanan dan Sikap Petugas Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo.

## HASIL

Beberapa Aspek yang dilihat pada penelitian Kepuasan Pengguna Potensial Terhadap Koleksi dan Layanan Perpustakaan STIKES Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo, dengan yang berjumlah sampel 100 orang dan juga dilibatkan Kepala dan Staf Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo, dapat dilihat dengan hasil:

1. Kepuasan Pengguna Potensial Perpustakaan Terhadap Keadaan Koleksi Perpustakaan pada bulan Desember 2014 s.d. Pebruari tahun 2015. Kepuasan Pengguna Potensial Perpustakaan Terhadap
  - a. Koleksi Perpustakaan Responden cukup puas (54%)
  - b. Koleksi Jurnal Majalah Dalam Negeri, Puas dan Sangat Puas (59%)
  - c. Keadaan Koleksi Jurnal Majalah Luar Negeri, puas dan Sangat Puas (28%)
  - d. Keadaan Koleksi Rujukan, Puas dan sangat puas (41%).
  - e. Kemutakhiran Koleksi-koleksi Rujukan di Perpustakaan sudah tercukupi meskipun ada cukup puas dengan nilai yang sama (43%).
  - f. Jumlah Koleksi, Puas dan Sangat Puas (38%),
  - g. Penyusunan Koleksi di Rak Perpustakaan Puas dan Sangat (58%).
  - h. Koleksi Bahan Ajar di Rak Perpustakaan Puas dan Sangat Puas (45%).
  - i. Kepuasan Pemakai Perpustakaan Terhadap Koleksi *Gray Literature* Puas dan Sangat Puas sebesar (49%).
  - j. Koleksi Bidang Khusus, Puas dan Sangat Puas (44%).
2. Kepuasan Pengguna Potensial Perpustakaan Terhadap Layanan Perpustakaan STIKES Yayasan Rumah Sakit

Dr. Soetomo pada bulan Desember 2014 s.d. Pebruari tahun 2015.

- a. Layanan Terbuka, Puas dan Sangat Puas (71%)
  - b. Syarat untuk menjadi Anggota Perpustakaan, Puas dan Sangat Puas (74%).
  - c. Layanan Sirkulasi, Puas dan Sangat Puas (58%).
  - d. Kecepatan Proses Peminjaman(%), Puas dan Sangat Puas (79%).
  - e. Kecepatan Proses Pengembalian, (%), Puas dan Sangat Puas (72%).
  - f. Layanan Internet, Puas dan Sangat Puas (43%).
  - g. Kondisi Peralatan Perlengkapan, Ketatausahaan, dan Ruangan yang memadai memberikan Kemudahan, Kenyamanan, serta berbagai Fasilitas, Puas dan Sangat Puas (42%).
  - h. Layanan Informasi Aktual, Puas dan Sangat Puas (48%).
  - i. Kemudahan Penelusuran, Puas dan Sangat Puas (50%).
  - j. Terhadap Jam Operasional, Puas dan Sangat Puas (57%).
3. Kepuasan Pengguna Potensial Perpustakaan Terhadap Sikap Petugas Perpustakaan.
- a. Sikap Petugas, Puas dan Sangat Puas (85%).
  - b. Penampilan dan Kerapian Petugas, Puas dan Sangat Puas (81%).
  - c. Keramahan dan Kesopanan Petugas, Puas dan Sangat Puas (81%).
  - d. Keterampilan Petugas, Puas dan Sangat Puas (75%).
  - e. Ketepatan Petugas, Puas dan Sangat Puas (77%).
  - f. Kecepatan Petugas, Puas dan Sangat Puas (79%).
  - g. Sikap Petugas untuk Memberikan Perhatian atas masalah yang dihadapi dalam pencarian koleksi, Puas dan Sangat Puas (72%).
  - h. Terhadap Sikap Petugas dalam Memberikan Penjelasan dan Berkomunikasi dengan baik, Puas dan Sangat Puas (76%).

#### ANALISIS

1. Analisis Hasil Tanggapan Kepuasan Responden terhadap Koleksi  
Kepuasan Responden terhadap Koleksi Perpustakaan STIKES Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo pada bulan Desember 2014 s.d. Pebruari tahun 2015 sebesar 3.38 dengan Kriteria Cukup Puas, hasil tersebut menunjukkan bahwa Koleksi Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo masih cukup memuaskan pengguna potensial perpustakaan. Meskipun ada yang mempunyai nilai kriteria di bawah nilai tersebut yaitu pada Koleksi Jurnal Majalah Luar Negeri (3), Jumlah Koleksi (3,19), Koleksi Umum (3,29), dan Kemutakhiran Koleksi

(3,37), nilai yang didapat masih dalam kriteria Cukup Puas. Dalam hal ini Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo masih harus meningkatkan jumlah dan macam jenis Koleksi yang dibutuhkan oleh pengguna Perpustakaan.

2. Analisis Hasil Tanggapan Kepuasan Responden terhadap Layanan  
Kepuasan Responden terhadap Layanan Perpustakaan sebesar 3.68 dengan Kriteria Puas, hasil tersebut menunjukkan bahwa Layanan Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo dapat memuaskan pengguna potensial perpustakaan. Meskipun ada yang mempunyai nilai kriteria di bawah nilai tersebut yaitu pada Layanan Internet (3,38), dan Layanan Terhadap Kondisi Peralatan Perlengkapan, Ketatausahaan, dan Ruangan yang memadai memberikan Kemudahan, Kenyamanan, serta berbagai Fasilitas (3,38), nilai yang didapat masih dalam kriteria Cukup Puas. Dalam hal ini Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo harus meningkatkan Layanan Internet dan Layanan Terhadap Kondisi Peralatan Perlengkapan, Ketatausahaan, dan Ruangan yang memadai memberikan Kemudahan, Kenyamanan, serta berbagai Fasilitas pada pengguna potensial di Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo.
3. Analisis Hasil Tanggapan Kepuasan Responden terhadap Sikap Petugas Perpustakaan  
Kepuasan Responden terhadap Sikap Petugas Perpustakaan sebesar 4,02 dengan Kriteria Puas, hasil tersebut menunjukkan bahwa Sikap Petugas Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo dapat memuaskan pengguna potensial perpustakaan. Nilai kriteria pada tabel di atas keseluruhan dalam kriteria Puas.
4. Analisis berdasarkan hasil Tanggapan Kepuasan Responden terhadap Koleksi, Layanan dan Sikap Petugas. Nilai Kriteria Kepuasan Responden terhadap Koleksi, Layanan dan Sikap Petugas Perpustakaan STIKES Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo pada bulan Desember 2014 s.d. Pebruari tahun 2015 sebesar 3,69 dengan Kriteria Puas, hasil tersebut menunjukkan bahwa Layanan dan Sikap Petugas Perpustakaan STIKES Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo dapat memuaskan pengguna potensial perpustakaan. Sedangkan Kepuasan terhadap Koleksi cukup puas disebabkan karena ada koleksi yang masih perlu dikembangkan.

#### PEMBAHASAN

Pengguna Potensial Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo adalah mahasiswa dan dosen di 2 (dua) Prodi yaitu: D-III Prodi RMIK dan S1 Administrasi Rumah Sakit (ARS). Dengan jumlah mahasiswa sebesar 480 mahasiswa. Dosen D-III Prodi RMIK dan S1 Administrasi Rumah Sakit (ARS) berjumlah 20 orang, dalam penelitian ini digunakan 100 sampel (dosen dan mahasiswa).

Sistem Layanan Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo

Dalam sistem layanan sudah mempunyai sistem yang baik, perlu ditingkatkan agar mendekati/sesuai dengan Standar Perpustakaan Perkam Medis dan Informasi Kesehatan Pendidikan Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, Tahun 2010, baik dalam sistem layanan Demikian pula pada jenis layanan perpustakaan masih ada yang harus ditingkatkan yaitu pada layanan rujukan (kegiatan untuk membantu pengguna menelusur informasi dengan cepat, menelusur informasi dengan lebih spesifik). Layanan serial/terbitan berseri (kegiatan untuk membantu pengguna mendapatkan informasi tentang suatu terbitan seperti surat kabar, jurnal, buku tahunan atau buletin, yang diterbitkan dengan nomor yang berurutan dan terbit secara berseri dan terus-menerus, waktu yang tidak terbatas. Termasuk didalamnya adalah: 1) Terbitan berkala (periodicals), 2) Koran, 3) Buku tahunan dan 4) Seri monografi yang bernomor. Silang layan (kerjasama antara sejumlah perpustakaan dalam bentuk saling memanfaatkan sumber daya dan layanan informasi semua perpustakaan yang terlibat. Cara silang layan yang dapat ditempuh adalah: 1) perpustakaan menghubungi langsung perpustakaan lain, 2) perpustakaan menghubungi pusat jaringan informasi. Dan adanya networking antar Perpustakaan Institusi sejenis dalam rangka pengadaan dan pengembangan koleksi perpustakaan.

SOP (Standar Operasional Prosedur) Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo harus dibuat, karena dengan adanya SOP akan mempermudah pelayanan Perpustakaan.

Struktur organisasi minimal berdasarkan fungsi Pada umumnya perpustakaan perguruan tinggi tersusun berdasar fungsi. Struktur organisasi perpustakaan dapat berkembang sesuai dengan besarnya perpustakaan.

Menurut Standar Perpustakaan Perkam Medis dan Informasi Kesehatan Pendidikan Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, Tahun 2010,

1. Kepala Perpustakaan/ penanggung jawab langsung perpustakaan
2. Bagian Layanan Teknis, tugasnya adalah:
  - Mengusulkan pengembangan koleksi
  - Mengusulkan pengadaan bahan perpustakaan yang tepat
  - Mengolah bahan perpustakaan dengan melakukan registrasi, katalogisasi, klasifikasi, dsb.
  - Menyimpan bahan perpustakaan dalam rak untuk dimanfaatkan oleh pengguna.
3. Bagian Layanan Pengguna terdiri atas Layanan Sirkulasi, Layanan Rujukan, dan layanan serial.
4. Bagian layanan pengguna merupakan bagian yang langsung berhubungan dengan pengguna, tugasnya adalah:
  - Mencarikan informasi
  - Melayani peminjaman dan pengembalian bahan pustaka.

- Memberikan konsultasi dsb.
- Mengawasi aktivitas pengguna perpustakaan

Menurut Standar Perpustakaan Perkam Medis dan Informasi Kesehatan Pendidikan Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, Tahun 2010, Kualifikasi tenaga perpustakaan

- a. Pustakawan, termasuk kepala perpustakaan, dengan pendidikan Strata 1 Perpustakaan atau Strata 1 bidang kesehatan dan telah mengikuti pelatihan di bidang perpustakaan dengan masa kerja di Perpustakaan minimal 5 (lima) tahun.
  - b. Pustakawan tingkat terampil dengan pendidikan tingkat Diploma III atau yang sederajat dalam bidang ilmu Perpustakaan, dokumentasi dan informasi
  - c. Tenaga fungsional lain dengan pendidikan kejuruan atau keahlian tingkat kesarjanaaan, seperti pranata komputer, ahli arsip dan teknologi informasi
  - d. Tenaga administrasi perpustakaan, dengan pendidikan dapat sarjana berbagai bidang ilmu untuk ditempatkan di bagian pengolahan bahan perpustakaan
5. Kunjungan Perpustakaan Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo tahun 2014.

Berdasarkan hasil penelusuran data yang peneliti telah lakukan bahwa kunjungan 3 (tiga) tahun pada tahun 2012 s.d. Nopember 2014 ada peningkatan dengan rerata perhari yaitu sekitar 18 orang. Kunjungan perpustakaan ini masih kecil untuk pendidikan

Pemakai Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo tahun 2014.

Berdasarkan hasil penelusuran data yang peneliti telah lakukan bahwa peminjam 3 (tiga) tahun pada tahun 2012 s.d. Nopember 2014 ada peningkatan dengan rerata perhari yaitu sekitar 3 orang. Peminjam di Perpustakaan STIKES Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo masih sangat kecil untuk pendidikan mahasiswa.

Sarana dan Prasarana Perpustakaan berdasarkan hasil penelusuran data yang peneliti telah dilakukan pada sarana dan prasarana Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo, Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo mempunyai Luas:  $10,36 \times 10,30$  m, merupakan 1 (satu) ruangan, tanpa ada pembagian baik untuk ruangan Kepala Perpustakaan, Staf Perpustakaan, ruangan komputer, ruang baca.

Menurut Standar Perpustakaan Perkam Medis dan Informasi Kesehatan Pendidikan Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2010, luas lantai perpustakaan yang standar adalah 1,6 meter<sup>2</sup> per pemustaka perpustakaan, dan jumlah pemustaka dihitung sebesar 25 % dari jumlah total pemustaka.

Idealnya Luas Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo, dengan jumlah pemustaka (pengguna potensial) sebesar 500 orang:

$$1,6 \times 25\% \times 500 = 200 \text{ m}^2$$

Luas Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo  $10,36 \times 10,30 = 106,76 \text{ m}^2$

Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo masih sangat perlu dikembangkan dengan luas perpustakaan yang masih di bawah Standar Perpustakaan Pererekam Medis dan Informasi Kesehatan Pendidikan Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, Tahun 2010.

Pada Koleksi Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo masih di bawah standar tersebut, selain judul buku wajib dan buku penunjang yang masih belum memenuhi standar juga jumlah ratio kebutuhan dengan jumlah mahasiswa yang dalam standar 1:10 masih belum memenuhi syarat. Jumlah buku wajib dan buku penunjang yang ada pada Koleksi Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo masih dalam jumlah 1 s.d. 5 eksemplar.

Dengan hasil penelitian tersebut tentang sarana dan prasarana yang menunjang perpustakaan pada kenyataannya masih di bawah Standar Perpustakaan Pererekam Medis dan Informasi Kesehatan Pendidikan Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, Tahun 2010.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dalam penelitian ini, maka dapat diberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepuasan Pemakai Terhadap Koleksi dengan kriteria cukup puas masih ada yang perlu ditingkatkan yaitu Koleksi Jurnal Majalah Luar Negeri, Jumlah Koleksi, Koleksi Umum, dan Kemutakhiran Koleksi.
2. Kepuasan Pemakai Terhadap Layanan dengan kriteria puas, ada yang mempunyai kriteria cukup puas yaitu pada Layanan Internet dan Layanan terhadap Kondisi Peralatan Perlengkapan, Ketatausahaan, dan Ruang yang memadai memberikan Kemudahan, Kenyamanan, serta berbagai Fasilitas hal ini perlu ditingkatkan layanannya.
3. Kepuasan Pemakai Terhadap Sikap Petugas Perpustakaan dengan kriteria puas.

4. SOP (Standar Operasional Prosedur) Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo belum ada.
5. Sarana dan prasarana di Perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo masih perlu dikembangkan, yaitu: luas perpustakaan, jumlah judul buku, ratio buku dengan mahasiswa.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Alma B. 2004. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Cetakan keenam, Edisi Revisi, Alfabeta-IKAPI Jawa Barat.
2. *American Library association, 1990. Guidelines for Branch Libraries in College and Universities.* <http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/guidelinebranch.htm>. Akses tanggal 10 Desember 2014.
3. Colleen Cook, et al., 2001. 4 (empat) dimensi dalam *Library Quality*, [www.kc.tsukuba.ac.jp/div-comm/pdf/report0403.pdf](http://www.kc.tsukuba.ac.jp/div-comm/pdf/report0403.pdf) Akses tanggal 7 Desember 2014.
4. Departemen Pendidikan Nasional RI. 2004. *Perpustakaan Perguruan Tinggi: Buku Pedoman*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional. 2004.
5. Departemen Pendidikan dan Budaya, 1994. *Perpustakaan Perguruan Tinggi: Pedoman Umum*. Jakarta: Depdikbud RI. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
6. Kementerian Kesehatan RI, 2010. *Standar Perpustakaan Pererekam Medis dan Informasi Kesehatan Pendidikan Tenaga Kesehatan*, Jakarta: Badan PPSDM Kesehatan Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan.
7. Kolter, Armstrong, 2001. *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Edisi Kedelapan, Jilid 1, Erlangga, Jakarta.
8. Kolter, Armstrong, 2001. *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Edisi Kedelapan, Jilid 2, Erlangga, Jakarta.
9. Riduwan, 2008. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung. Penerbit Alfabeta Bandung.
10. Sufren, Yonathan Natanael, 2013. *Mahir Menggunakan SPSS Secara Otodidak*. Jakarta. Penerbit PT Flex Media Komputindo Kompas Gramedia Jakarta.
11. Sugiyono, 2010, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
12. Suharsini, A. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta, Penerbit Rineka Cipta Jakarta.
13. Tjiptono, F. 2005. *Pemasaran Jasa*, Edisi 1, Cetakan 1, Bayu Media Publishing, IKAPI Malang Jawa Timur.
14. Zainuddin, 2003. *Metodologi Penelitian, Program Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Program Pascasarjana*, Universitas Airlangga, Surabaya.
15. Umar, H. 2003. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Edisi 1, Cetakan Ketiga, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
16. Windu Purnomo, 2002. *Handout*, Bahan Kuliah Statistika dan Statistika, Program Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya Pendidikan merupakan wahana yang penting dalam rangka menciptakan.

# Gambaran Pelaksanaan JKN Melalui Cara Pembayaran, Asal Rujukan dan Jumlah Kunjungan Pasien (Studi di Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo Tahun 2014)

## Overview of JKN Through Payment, Origin, Reference Number of Visits (Study in Outpatient Dr. Soetomo Hospital 2014)

Anif Prasetyorini  
anifrini@gmail.com

### ABSTRAK

RSUD Dr. Soetomo khususnya antrian pasien JKN cenderung meningkat jika dibandingkan dengan sebelum diresmikannya BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran pelaksanaan JKN melalui cara pembayaran, asal rujukan dan jumlah kunjungan pasien Rawat Jalan. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif yang dilakukan di Unit Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo Surabaya dari bulan Oktober s/d Desember 2014. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data sekunder dan studi literature. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Pelaksanaan JKN di instalasi rawat jalan RSUD Dr. Soetomo mulai bulan Januari sampai Desember tahun 2014 mengalami peningkatan. Menurut cara pembayaran, pasien membayar melalui JKN sebesar 57,39% dan masih ada pasien yang membayar secara langsung yaitu sebesar 22,97%. Menurut asal rujukan, pasien berasal dari Rumah Sakit lain sebesar 50,82% dan yang berasal dari Puskesmas sebesar 45,46%. Jumlah kunjungan pasien rawat jalan RSUD Dr. Soetomo mengalami penurunan hanya sebesar 3,27% antara sebelum pelaksanaan JKN dan sesudah pelaksanaan JKN. Untuk meningkatkan jumlah peserta JKN dan mengurangi jumlah rujukan dari Puskesmas di Instalasi Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo maka perlu dilakukan peningkatan sosialisasi tentang JKN kepada masyarakat serta penerapan regulasi dan mekanisme kontrol di sisi permintaan dan penyediaan pelayanan kesehatan.

**Kata kunci:** Cara Pembayaran, Asal Rujukan, Jumlah Kunjungan

### ABSTRACT

Dr. Soetomo Hospital, especially patients queue JKN tends to increase when compared with before the inauguration BPJS. The purpose of this study was to describe the implementation of JKN through the method of payment, referral source and number of patient visits Outpatient. This was an description observational research design. This research was conducted from October to December 2014. Data was collected by the collection of secondary data and literature studies. This was an descriptive analysis method. Implementation of JKN from January to December 2014 had increased. According to the method of payment, patients pay through JKN amounted to 57.39% and there are still patients who pay directly in the amount of 22.97%. According to the origin of a referral, patients coming from other hospitals amounted to 50.82% and those from the health center by 45.46%. The number of outpatient visits Dr. Soetomo Hospital decreased only by 3.27% between before and after the implementation JKN. To increase the number of participants JKN and reduce the number of referrals from health centers, it was necessary to increase the socialization of JKN to the community as well as the application of regulations and control mechanisms on the demand and supply of health care services.

**Key words:** Method of Payment, Referral Origin, Number of Visits

### PENDAHULUAN

Berdasarkan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 tentang Hak Azasi Manusia, pasca Perang Dunia II beberapa negara mengambil inisiatif untuk mengembangkan jaminan sosial, antara lain jaminan kesehatan bagi semua penduduk (*Universal Health Coverage*).

Cakupan semesta (*universal coverage*) merupakan sistem kesehatan di mana setiap warga masyarakat memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang bermutu dan dibutuhkan, dengan biaya yang terjangkau. Cakupan semesta mengandung

dua elemen inti: (1) Akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga; dan (2) Perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan (Kemenkes RI, 2013).

Indonesia berada pada tahap transisi menuju cakupan semesta. Pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan primer di puskesmas dan pelayanan sekunder di rumah sakit pemerintah.

Dalam kurun satu bulan terakhir, JKN masih menjadi sorotan publik hingga kini. Di RSUD Dr. Soetomo khususnya, antrian pasien JKN cenderung meningkat jika dibandingkan dengan sebelum diresmikannya BPJS (Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial). “Pasien Instalasi Rawat Jalan (IRJ) yang biasanya tercatat sebanyak 3000 pasien” tutur Direktur RSUD Dr. Soetomo, dr. Dodo Anondo, MPH. Seperti kita ketahui, JKN menerapkan sistem pelayanan kesehatan berjenjang atau distem rujukan. Di mana dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari primer, sekunder, dan tersier.

Dengan sistem rujukan ini maka masyarakat yang terdaftar dalam JKN diarahkan untuk diperiksa terlebih dulu ke fasilitas pelayanan kesehatan primer yakni puskesmas atau klinik pratama terdekat. Jika perlu dirujuk maka ke fasilitas pelayanan kesehatan sekunder yakni RS tipe D dan C dahulu baru kemudian ke RS tipe B dan A.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan JKN melalui cara pembayaran, asal rujukan dan jumlah kunjungan pasien Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo tahun 2014.

#### METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Unit Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo Surabaya dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2014.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Unit Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu pengumpulan data sekunder dan studi literature.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu cara merumuskan dan

menafsirkan data yang ada sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan JKN secara umum melalui frekuensi, persentase, crosstabulasi, grafik dan table.

#### HASIL

##### Distribusi Cara Pembayaran Pasien Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo Selama 3 Tahun Terakhir

Jenis pembayaran yang dilakukan oleh pasien rawat jalan dapat menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap cara pembayaran sebelum dan sesudah pelaksanaan JKN. Distribusi cara pembayaran pasien rawat jalan RSUD Dr. Soetomo dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dapat dilihat pada table 1.

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2012, sebagian besar pasien rawat jalan di RS Dr. Soetomo adalah pasien umum sebesar 27,85%. Sedangkan yang paling sedikit membayar melalui KLB yaitu sebesar 0,0004%. Pada tahun 2013, sebagian besar pasien rawat jalan di RS Dr. Soetomo adalah pasien umum sebesar 27,42%. Sedangkan yang paling sedikit membayar melalui *in health* yaitu sebesar 0,30%. Antara tahun 2012 sampai tahun 2013, pasien rawat jalan RS Dr. Soetomo membayar melalui umum atau *out of pocket*. Akan tetapi mulai tahun 2014 pasien rawat jalan RSUD Dr. Soetomo sebagian besar sudah membayar melalui JKN yaitu 57,39%, akan tetapi masih ada pasien yang membayar melalui umum sebesar 22,96%.

Distribusi Asal Rujukan Pasien Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo Selama 3 Tahun Terakhir

Jenis rujukan dibagi menjadi dua jenis, yaitu rujukan horizontal dan rujukan vertikal. Rujukan horizontal

**Tabel 1.** Distribusi Cara Pembayaran Pasien Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo Tahun 2012–2014

No	Cara Pembayaran	Tahun						Jumlah	
		2012		2013		2014		n	%
		n	%	n	%	n	%		
1	Umum	156.190	27,85	155.722	27,42	126.157	22,965	438.069	26,11
2	Askes	147.819	26,36	132.594	23,35	1.167	0,212	281.580	16,78
3	Jamsostek	17.992	3,21	21.704	3,82	327	0,060	40.023	2,39
4	Ikatan kerja sama	16.218	2,89	16.369	2,88	14.904	2,713	47.491	2,83
5	Jamkesmas	79.029	14,09	81.603	14,37	1.878	0,342	162.510	9,68
6	KLB	2	0,0004			1	0,0001	3	0,0002
7	Program Khusus	11.502	2,05	14.410	2,54	13.996	2,548	39.908	2,38
8	JPKTH	2.387	0,43	3.047	0,54	1.651	0,301	7.085	0,42
9	In health	1.842	0,33	1.691	0,30	1.336	0,243	4.869	0,29
10	Jamkesda	63.731	11,36	54.818	9,65	27.665	5,036	146.214	8,71
11	SKM	64.056	11,42	85.966	15,14	44.973	8,187	194.995	11,62
12	Jaminan GRIU					3	0,001	3	0,0002
13	JKN Non PBI					5	0,001	5	0,0003
14	JKN					315.273	57,392	315.273	18,79
	Jumlah	560.768	100	567.924	100	549.336	100	1.678.028	100

Sumber: Laporan Statistik Registrasi Masuk Berdasarkan Cara Bayar Instalasi Rawat Jalan Tahun 2012–2014

merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan. Rujukan tersebut dilakukan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap. Sedangkan rujukan vertikal dilakukan dari tingkat pelayanan yang lebih rendah ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya. Distribusi asal rujukan pasien rawat jalan RSUD Dr. Soetomo dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.

Menurut tabel 2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 rujukan terbesar berasal dari Puskesmas sebesar 49,68%, tahun 2013 dan tahun 2014 rujukan terbesar berasal dari Rumah sakit lain yaitu 63,42% (tahun 2013) dan 50,82% (tahun 2014).

Gambaran Pelaksanaan JKN menurut bulan dalam tahun 2014 di Bagian Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo.

Jumlah kunjungan rawat jalan menurut bulan dalam tahun 2014 dapat menunjukkan gambaran pelaksanaan JKN di Bagian Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo. Distribusi jumlah kunjungan rawat jalan RSUD Dr. Soetomo menurut bulan dalam tahun 2014 dapat dilihat pada gambar 1.

Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan menurut cara pembayaran dengan JKN di instalasi

rawat jalan RSUD Dr. Soetomo mulai bulan januari sampai desember mengalami peningkatan.

#### Gambaran Pelaksanaan JKN menurut cara pembayaran di Bagian Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo Tahun 2014

Cara pembayaran yang dilakukan oleh pasien rawat jalan dapat menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap cara pembayaran yang direkomendasikan oleh pemerintah terkait pelaksanaan JKN. Gambaran Pelaksanaan JKN menurut cara pembayaran di Bagian Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo dapat dilihat pada gambar 2.

Berdasarkan gambar 2 menunjukkan bahwa pasien yang berkunjung ke rawat jalan RSUD Dr. Soetomo sebagian besar berasal dari pasien yang membayar melalui JKN yaitu sebesar 57,39%, akan tetapi masih ada pasien yang membayar langsung yaitu sebesar 22,97%.

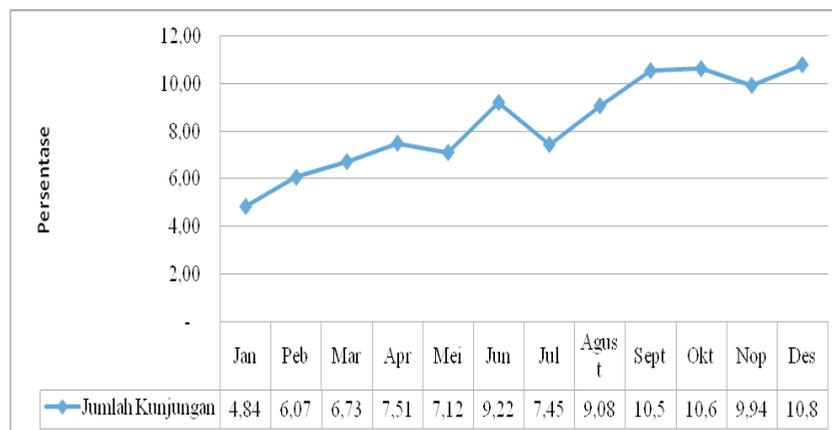
#### Gambaran Pelaksanaan JKN menurut asal rujukan di Bagian Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo Tahun 2014

Pelaksanaan sistem rujukan yang seharusnya diterapkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan adalah sistem rujukan berjenjang. Gambaran Pelaksanaan JKN menurut asal

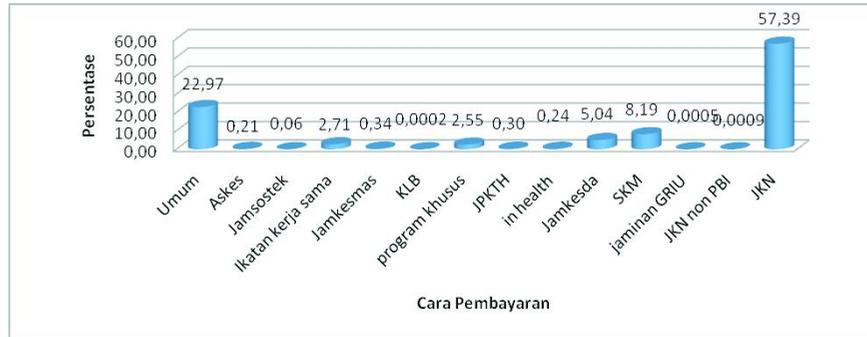
**Tabel 2.** Distribusi Asal Rujukan Pasien Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo Tahun 2012–2014

No.	Asal Rujukan	Tahun						Jumlah	
		2012		2013		2014		n	%
		n	%	n	%	n	%		
1	Puskesmas	134.569	49,68	84.596	36,03	110.040	45,46	329.205	44,03
2	Fasilitas Kesehatan Lain	4.980	1,84	1.285	0,55	9.010	3,72	15.275	2,04
3	Rumah Sakit Lain	131.315	48,48	148.896	63,42	123.020	50,82	403.231	53,93
Jumlah		270.864	100	234.777	100	242.070	100	747.711	100

Sumber: Laporan Statistik Registrasi Masuk Berdasarkan Asal Rujukan Instalasi Rawat Jalan Tahun 2012–2014



**Gambar 1.** Distribusi Pelaksanaan JKN menurut Jumlah Kunjungan di Instalasi Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo Tahun 2014



**Gambar 2.** Distribusi Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo berdasarkan Cara Pembayaran Tahun 2014.

rujukan di Bagian Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo dapat menunjukkan apakah pelaksanaan rujukan sudah dilakukan melalui sistem berjenjang atau belum. Gambaran Pelaksanaan JKN menurut asal rujukan di Bagian Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo dapat dilihat pada gambar 3.

Menurut gambar 3 menunjukkan bahwa pasien rawat jalan RSUD Dr. Soetomo sebagian besar berasal dari Rumah Sakit lain yaitu sebesar 50,82%, akan tetapi masih ada pasien yang berasal dari Puskesmas sebesar 45,46%.

**Perbandingan Jumlah Kunjungan sebelum dan sesudah Pelaksanaan JKN di Bagian Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo**

Salah satu tujuan Pelaksanaan JKN adalah mengurangi jumlah kunjungan di Rumah Sakit tipe A. Jumlah Kunjungan di RSUD Dr. Soetomo dapat menggambarkan pelaksanaan system rujukan di suatu wilayah. Sistem rujukan adalah sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap satu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal (dari unit yang lebih mampu menangani) atau secara horizontal (antar unit yang setingkat kemampuannya).

Berdasarkan gambar 4 dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan pasien rawat jalan RSUD Dr. Soetomo mengalami

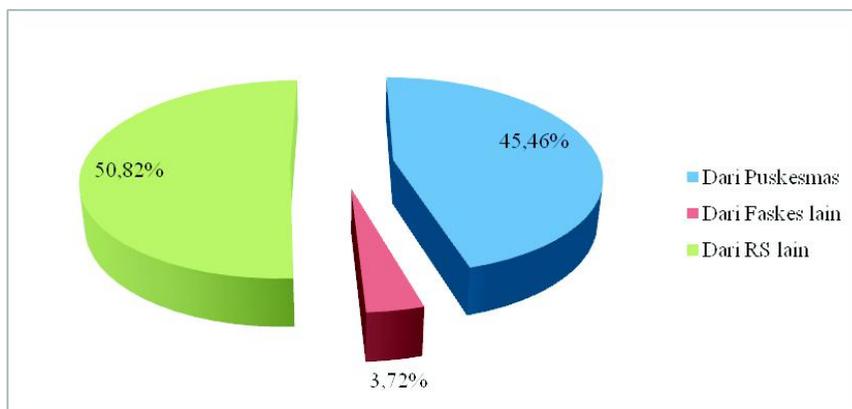
penurunan hanya sebesar 3,27 % antara sebelum pelaksanaan JKN yaitu tahun 2013 dan sesudah pelaksanaan JKN yaitu tahun 2014.

**PEMBAHASAN**

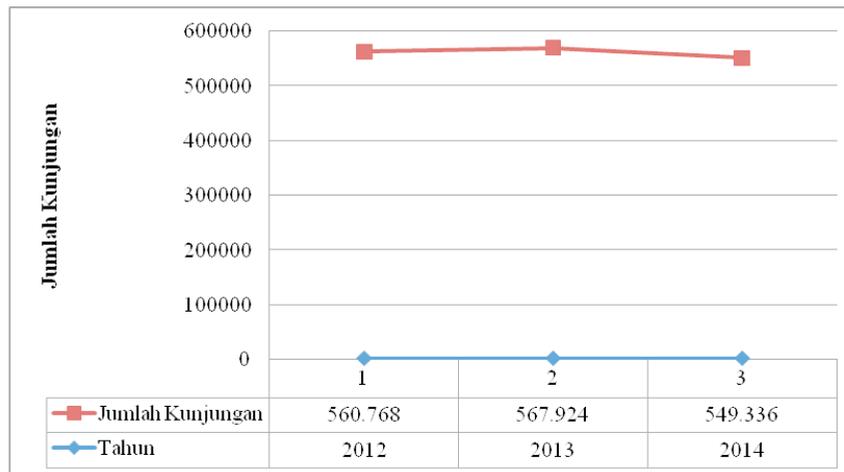
Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2012, sebagian besar pasien rawat jalan di RSUD Dr. Soetomo adalah pasien umum sebesar 27,85%, tahun 2013 sebesar 27,42%. Pasien rawat jalan RSUD Dr. Soetomo tahun 2014 sebagian besar sudah membayar melalui JKN yaitu 57,39 %, akan tetapi masih ada pasien yang membayar melalui umum sebesar 22,96%. Tahun pertama pelaksanaan JKN ini menunjukkan bahwa pasien rawat jalan di RSUD Dr. Soetomo sudah beralih ke JKN yang semula banyak yang berasal dari pasien yang membayar melalui *out of pocket*.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan menyebutkan bahwa Pembiayaan pada Pasal 18 ayat:

- (1) Pembiayaan rujukan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan.



**Gambar 3.** Distribusi Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo berdasarkan Asal Rujukan Tahun 2014



**Gambar 4.** Kecenderungan Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo Tahun 2012–2014

- (2) Pembiayaan rujukan bagi pasien yang bukan peserta asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan menjadi tanggung jawab pasien dan/atau keluarganya.

Sistem pembiayaan yang tepat untuk suatu negara adalah sistem yang mampu mendukung tercapainya cakupan semesta. Cakupan semesta (universal coverage) merupakan sistem kesehatan di mana setiap warga masyarakat memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang bermutu dan dibutuhkan, dengan biaya yang terjangkau. Cakupan semesta mengandung dua elemen inti: (1) Akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga; dan (2) Perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan (WHO, 2005).

Menurut Murti (2011) menunjukkan bahwa akses pelayanan kesehatan yang adil menggunakan prinsip keadilan vertikal. Prinsip keadilan vertikal menegaskan, kontribusi warga dalam pembiayaan kesehatan ditentukan berdasarkan kemampuan membayar (*ability to pay*), bukan berdasarkan kondisi kesehatan/ kesakitan seorang. Dengan keadilan vertikal, orang berpendapatan lebih rendah membayar biaya yang lebih rendah daripada orang berpendapatan lebih tinggi untuk pelayanan kesehatan dengan kualitas yang sama. Dengan kata lain, biaya tidak boleh menjadi hambatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan (*needed care, necessary care*).

Pelaksanaan rujukan dibagi menjadi dua jenis, yaitu rujukan horizontal dan rujukan vertikal. Rujukan horizontal merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan. Rujukan tersebut dilakukan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap. Sedangkan rujukan vertikal dilakukan dari tingkat pelayanan yang lebih rendah ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya.

Rujukan terbesar di rawat jalan RSUD Dr. Soetomo pada tahun 2012 banyak berasal dari Puskesmas. Tahun 2013 berasal dari Rumah Sakit, akan tetapi masih ada pasien yang dirujuk dari Puskesmas sebesar 36,03%. Tahun 2014, rujukan terbesar pertama berasal dari Rumah Sakit, akan tetapi masih ada rujukan yang berasal dari Puskesmas sebesar 45,46%. Hal ini menunjukkan selama pelaksanaan JKN, rujukan berjenjang belum dapat terealisasi secara optimal. Rujukan vertikal dari tingkat pelayanan yang lebih rendah ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi dilakukan apabila pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialisik atau sub spesialisik; perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan Pasal 4 yaitu pada ayat berikut:

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, sesuai kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama.

Akan tetapi ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di RSUD Dr. Soetomo.

Menurut Setiap warga negara berhak untuk memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang bermutu dan dibutuhkan, dengan biaya yang disampaikan pada Seminar Nasional “Revitalisasi Manajemen Puskesmas di Era Desentralisasi” di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 26 April 2011 12 terjangkau. Untuk memastikan cakupan semesta,

dengan UU SJSN No. 4/ 2004, penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang bertujuan memperluas cakupan sistem pra-upaya (*pre-paid system*) dan mengurangi dengan secepat mungkin ketergantungan kepada sistem membayar langsung (*out-of-pocket*).

Mayoritas karakteristik warga bekerja di sektor informal dengan penghasilan tidak menentu dan sebagian lainnya formal, tujuan itu bisa diwujudkan dengan mengembangkan sistem pembiayaan pra-upaya yang lebih luas dan adil melalui pajak umum dan memperluas cakupan asuransi kesehatan sosial berbasis *payroll-tax (dual health care system)*. Pemerintah dan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) perlu menerapkan elemen-elemen positif dari “*managed care*”, dengan menerapkan regulasi dan mekanisme kontrol di sisi permintaan dan penyediaan pelayanan kesehatan, dalam rangka untuk mengontrol biaya, kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negara (Murti, 2011).

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Cara Pembayaran pasien rawat jalan di RS Dr. Soetomo pada tahun 2012 yang menggunakan pembayaran umum (*out of pocket*) sebesar 27,85%, tahun 2013 juga menggunakan pembayaran umum sebesar 27,42%, tahun 2014 menggunakan JKN yaitu 57,39%.
2. Rujukan terbesar di Instalasi Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo tahun 2012 berasal dari Puskesmas sebesar 49,68%, tahun 2013 rujukan terbesar berasal dari Rumah sakit lain sebesar 63,42% dan tahun 2014 rujukan terbesar berasal dari Rumah sakit lain sebesar 50,82%.
3. Pelaksanaan JKN di instalasi rawat jalan RSUD Dr. Soetomo mulai bulan januari sampai desember tahun 2014 mengalami peningkatan.
4. Pelaksanaan JKN di instalasi rawat jalan RSUD Dr. Soetomo menurut cara pembayaran menunjukkan bahwa pasien membayar melalui JKN yaitu sebesar 57,39% dan masih ada pasien yang membayar secara langsung yaitu sebesar 22,97%.
5. Pelaksanaan JKN di instalasi rawat jalan RSUD Dr. Soetomo menurut asal rujukan menunjukkan bahwa pasien berasal dari Rumah Sakit lain sebesar 50,82% dan masih ada pasien yang berasal dari Puskesmas sebesar 45,46%.
6. Jumlah kunjungan pasien rawat jalan RSUD Dr. Soetomo mengalami penurunan hanya sebesar 3,27 % antara sebelum pelaksanaan JKN yaitu tahun 2013 dan sesudah pelaksanaan JKN pada tahun 2014.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kemenkes RI, 2013. *BUKU PEGANGAN SOSIALISASI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta: Kemenkes.
- Murti, Bhisma. 2011. Asuransi Kesehatan Berpolo Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat di Era Desentralisasi Menuju Cakupan Semesta. file:///JPKM%20Desentralisasi%20Prof%20Bhisma%20Murti.pdf. Diakses tanggal 11 April 2015.
- Notoatmodjo, S., 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan .
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014.
- WHO, 2005. Achieving universal health coverage: Developing the health financing system. Technical brief for policy-makers. Number 1, 2005. World Health Organization, Department of Health Systems Financing, Health Financing Policy.
- Xu K, Evans DB, Kawabata K, Zeramdini R, Klavus J, Murray CJL (2003). Household catastrophic health expenditure: a multicountry analysis. *Lancet*; 362: 111–17.

# Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Masa Tugas Kepala Sekolah Setelah Ditetapkan di Kabupaten Lumajang

## Implementation of Regulation of the Minister of National Education Number 28 of 2010 Concerning the Duration of Principal Duties after Set District Lumajang

Titik Sri Astutik

Universitas Lumajang, Jl. Musi No. 12 Lumajang  
Email: titik\_sriastutik@yahoo.com

### ABSTRAK

*Upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu dan standart pendidikan di Indonesia diantaranya yaitu menjadi kepala sekolah diharuskan ada syarat khusus yang telah diatur dengan jelas dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 yang bertujuan mendapatkan kepala sekolah dengan kemampuan memimpin, memajukan sekolah, perbaikan pendidikan apalagi orang yang memimpin sebuah sekolah harus memiliki kompetensi serta professional yang memadai, baik kepala sekolah tingkat SD, SMP maupun SMA sederajat. Dengan adanya pasal 10 Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 merupakan pengaturan pembatasan masa tugas kepala sekolah supaya tidak terjadi kepala sekolah sampai tua, kejenuhan dan memberikan kesempatan terhadap guru lain yang memiliki kompetensi menjadi kepala sekolah oleh karena itu ada periodisasi Kepala Sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan menunjukkan fakta bahwa di Lumajang implementasi ketentuan-ketentuan dalam Permendiknas ini mengalami kendala, telah ditetapkan tanggal 27 Oktober 2010 tetapi berusaha diimplementasi tahun 2015. Hasil analisis berkesimpulan: sampai September 2015 masih banyak Kepala Sekolah yang masa tugasnya melebihi 12 tahun bahkan sampai 37 tahun tidak sesuai dengan periodisasi atau regulasi, tetapi masih tetap menjalankan tugas sebagai kepala sekolah. Peraturan tersebut tidak seluruhnya dapat menjadi acuan dalam pembuatan aturan pelaksanaan untuk penilaian kepala sekolah yang telah memiliki masa tugas 4 tahun atau lebih, apalagi dengan otonomi daerah, yang memberikan kewenangan dan keleluasaan pengangkatan kepala sekolah ada di tangan Pemerintah Daerah.*

**Kata kunci:** guru, kepala sekolah, kompetensi, implementasi

### ABSTRACT

*The government's efforts in improving the quality and standard of education in Indonesia among which became the principal required no special requirements that have been set out clearly in the Ministerial Regulation No. 28 of 2010 which aims to get the principal with the ability to lead, promote school, improvement of education especially those who lead a school must have adequate competence and professional, both heads of elementary school, junior high or high school equivalent. With the article 10 Permendiknas No. 28 of 2010 is setting a task the principal limitation period that does not happen until the old headmaster, saturation and provides an opportunity for other teachers who have the competence to become principals therefore there periodization Principal. This research is a legal approach to legislation point to the fact that in Lumajang implementation of the provisions of this Permendiknas experiencing problems, has set the date of October 27, 2010, but tried to be implemented in 2015. The results of the analysis concluded: until September 2015 many times Headmaster duties exceed 12 years even 37 years is not in accordance with the periodicity or regulation, but still stints as principal. These rules are not entirely to be a reference in the manufacture of implementation rules for the assessment of the principal who has had a period of 4 years or more tasks, especially with regional autonomy, which authorizes the appointment of principals and flexibility in the hands of local governments.*

**Key words:** teachers, principals, competence, implementation

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

UU 1945 pasal 31, ayat 3 menyebutkan, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang."

serta pasal 5 ayat 1 Bab IV UU no. 20 tahun 2003 menyebut bahwa, "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu", dan pasal 6 ayat 2 "Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan". Dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah khususnya melalui Depdiknas terus menerus berupaya melakukan berbagai perubahan dan pembaharuan

sistem pendidikan, salah satu upaya yang dilakukan, yaitu kebijakan pemerintah yang memuat masa tugas guru sebagai kepala sekolah dalam Permendiknas No 28 Tahun 2010 selain bertujuan memberikan penilaian dan bimbingan terhadap kepala sekolah, juga bertujuan untuk memberikan kesempatan terhadap guru lainnya yang memiliki kompetensi menjadi kepala sekolah sesuai Permendiknas No 13 Tahun 2007, melalui peningkatan kualitas guru serta kualitas manajemen kepala sekolah.

Prestasi yang diraih di sekolah-sekolah akan meningkatkan mutu pendidikan daerah yang akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, baik prestasi akademis maupun non akademis juga dibutuhkan kompetensi kepala sekolah yang memadai, dengan kompetensi tersebut kepala sekolah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, apa yang diinginkan masyarakat dan orang tua atau wali murid, yaitu tercapainya keberhasilan pendidikan, berkembangnya sekolah juga dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah yang berkewajiban memahami serta dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai kepala sekolah yaitu *educator, manager, administrator, supervisor, leader, innovator, motivator*.

Kepemimpinan kepala sekolah sangat menunjang tercapainya pengelolaan sekolah yang efektif dan efisien, untuk menciptakan sekolah yang efektif dan efisien, kepala sekolah sebagai manajer pendidikan di tingkatan sekolah, ujung tombak utama dalam mengelola pendidikan diharapkan mampu memegang tugas dan bertanggung jawab memegang peran aktif dalam memajukan sekolah / lembaga pendidikan, sebaliknya kepala sekolah yang tidak berkompeten dan yang habis masa tugasnya perlu diadakan pergantian demi penyegaran dan regenerasi.

Permendiknas No 28 Tahun 2010 pasal 10 tentang Masa Tugas Kepala Sekolah, bertujuan untuk kebaikan pendidikan tapi realitanya kurang kesiapan dalam mengimplementasi, banyak faktor penghambat dalam mencapai peningkatan mutu pendidikan antara lain: aspek sosial, budaya, ekonomi, pertahanan keamanan, ideologi, politik yang dapat berpengaruh terhadap berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan. Kepala sekolah enggan turun dari jabatannya, kompetensi kepala sekolah masih beragam, rendahnya mental kepala sekolah yang ditandai dengan kurangnya motivasi dan semangat serta kurangnya disiplin dalam melakukan tugas, kinerja kepala sekolah belum sepenuhnya ditopang oleh derajat penguasaan kompetensi yang memadai, wawasan kepala sekolah yang masih sempit, keterbatasan kesiapan daerah menerapkan seluruh aturan tersebut, serta banyak faktor penghambat lainnya yang dapat mengimplementasikan ketidaktaatan pada aturan yang telah diberlakukan yang berimplikasi pada kaburnya tujuan pendidikan nasional.

Upaya untuk memajukan pendidikan Indonesia akan terwujud apabila semua pihak, bekerja keras dengan komprehensif guna meningkatkan, mengembangkan

kompetensi kepala sekolah yang bertujuan agar kualitas keprofesionalan dalam menjalankan dan memimpin segala sumber daya yang ada pada sekolah, mampu memegang tugas dan bertanggung jawab memegang peran aktif dalam memajukan sekolah/lembaga pendidikan, mampu melihat adanya perubahan terhadap regulasi pendidikan dan kehidupan globalisasi. Mau berkolaborasi, bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan visi misi dari pembuatan permendiknas tersebut.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Mengapa ada pengaturan masa tugas kepala sekolah dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 ?; (2) Bagaimana implementasi pengaturan masa tugas kepala sekolah dalam Permendiknas nomor 28 tahun 2010 di Lumajang ?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan masa tugas kepala sekolah dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 dan untuk mengetahui implementasinya pengaturan masa tugas kepala sekolah dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 di kabupaten Lumajang?

#### TINJAUAN PUSTAKA

##### Guru dan Kepala Sekolah

Menurut falsafah Jawa Guru diartikan sebagai sosok tauladan yang harus di gugu lan ditiru. Dalam konteks falsafah jawa ini guru dianggap sebagai pribadi yang tidak hanya bertugas mendidik dan mentransformasi pengetahuan di dalam kelas saja, melainkan lebih dari itu Guru dianggap sebagai sumber informasi bagi perkembangan kemajuan masyarakat ke arah yang lebih baik.<sup>1</sup> Menurut Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan menurut Mulyasa, istilah guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi para peserta didik dan lingkungannya, karena itulah guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin.<sup>2</sup> Dalam proses pendidikan guru adalah orang dewasa yang bertanggung jawab membimbing menuju kepada situasi pendidikan.<sup>3</sup>

Kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar-mengajar atau tempat terjadi

<sup>1</sup> Center of Education and History, 2014, Zona Ilmu pendidikan, dari <http://zonainfosemua.blogspot.com/2014/03/pengertian-guru-menurut-pakar-pendidikan.html> diakses tanggal 12/8/ 2015

<sup>2</sup> Mulyasa E, 2006, Menjadi Guru Profesional, PT Rosda Karya, Bandung, 2006, hlm. 37.

<sup>3</sup> Ahmad D. Marimba, 2006, Pengantar Filsafat Pendidikan, PT Almaarif, Bandung, hlm. 38.

interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.<sup>4</sup> Kepala sekolah terdiri dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Menurut Wahjosumidjo kepala sekolah dapat didefinisikan “sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.”<sup>5</sup> Pengertian kepala sekolah menurut pasal 1 Bab I Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah bahwa,

“Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman Kanak-kanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI) sekolah sasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah Pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah pertama luarbiasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah atas/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI)”<sup>6</sup>

Pengertian kepala sekolah secara umum “pemimpin sekolah atau suatu lembaga di mana tempat menerima dan memberi pelajaran”.<sup>7</sup> Dengan demikian kepala sekolah punya peran ganda yaitu guru dan seorang tenaga fungsional yang diberi tugas untuk memimpin sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Untuk itu kepala sekolah wajib memiliki kompetensi-kompetensi minimal yang telah diatur dalam Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

Menurut teori kepemimpinan situasional yang dikembangkan oleh Hersey dan Kenneth Blanchard “adalah didasarkan pada saling berhubungannya di antara hal-hal berikut: jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan dan tingkat kesiapan atau kematangan para pengikut yang ditujukan dalam melaksanakan tugas khusus, fungsi atau tujuan tertentu”.<sup>8</sup> Dari berbagai pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepemimpinan kepala sekolah adalah kemampuan untuk menggerakkan

sumber daya yang ada pada suatu sekolah dan digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan pendidikan.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa “penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi”.<sup>9</sup> Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan sebagaimana menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa, “Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan”.<sup>10</sup>

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah: Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel, internet dan wawancara yang terkait dengan permasalahan yang diteliti penulis. Pengumpulan bahan dalam penelitian hukum normative ini yang dilakukan peneliti dengan mencari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan isu tersebut dengan merujuk pada UUD 1945, Undang-undang No. 14 Tahun 2005, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, permendiknas dan kebijakan di daerah. Adapun teknik analisis yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah teknis analisis deduksi yang mengambil kesimpulan berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor.

#### PEMBAHASAN

##### Masa Tugas Kepala Sekolah

Lembaga sekolah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan baik prestasi akademis maupun non akademis, dibutuhkan kompetensi kepala sekolah karena berkembang tidaknya sekolah akan dipengaruhi oleh kepemimpinan dari kepala sekolah untuk dapat mengemban tanggung jawab dengan baik dan benar. Kepala Sekolah hendaknya memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan kepemimpinan yang akan dipegangnya, memiliki sifat-sifat jujur, adil dan dapat dipercaya, suka menolong dan membantu guru dalam menjalankan tugas dan mengatasi kesulitan-kesulitan, bersifat supel dan ramah mempunyai sifat tegas dan konsekuen yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional

<sup>4</sup> Wikipedia, 2015, *Kepala Sekolah*, dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala\\_sekolah](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_sekolah) diakses tgl. 24/7/2015

<sup>5</sup> Wahjosumidjo, 2007, *Kepemimpinan Kepala Sekolah Raja Grafindo Persada*, Jakarta, hlm. 83

<sup>6</sup> Kemenag Jatim, *Permendiknas no. 28 tahun 2010*, dari [http://jatim.kemenag.go.id/file/file/peraturan\\_tentang\\_PNS/dxoc1413864218.pdf](http://jatim.kemenag.go.id/file/file/peraturan_tentang_PNS/dxoc1413864218.pdf) diakses tgl. 24/7/2015

<sup>7</sup> Agus Salim, 2015, cetakan I, *Memimpin dengan Human Touch*, Mahamedia Cipta Sarana, Lumajang, hlm. 11.

<sup>8</sup> Thohadan Mifta, 1983, *Kepemimpinan dalam manajemen*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 65.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

Indonesia. Punya visi masa depan dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman serta mampu mengaktualisasikan seluruh potensi yang ada menjadi suatu kekuatan yang bersinergi guna mencapai tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan pada pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945.

Pelayanan pendidikan tidak terlepas dari organisasi dan sumber daya manusia penyelenggaranya walau peran dewan guru pada suatu sekolah telah ditingkatkan dengan adanya standar pengelolaan yang baru, tetap saja kelangsungan dan kemajuan sebuah sekolah sangat ditentukan oleh kualitas kepala sekolah dalam memimpin anak buahnya. Kepala Sekolah dalam tingkatan sekolah, mempunyai peran sebagai figur kunci dalam mendorong perkembangan dan kemajuan sekolah. Kepala Sekolah tidak hanya meningkatkan tanggung jawab dan otoritasnya dalam program-program sekolah, kurikulum dan keputusan personel, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas keberhasilan siswa dan program. Seperti yang dikatakan oleh Nur Kholis dalam bukunya *Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model dan Aplikasi*, bahwa peran kepala sekolah memiliki banyak fungsi antara lain: bahwa,

- a. Sebagai evaluator seorang Kepala Sekolah harus melakukan langkah awal, yaitu melakukan pengukuran seperti kehadiran, kerajinan dan pribadi para guru, tenaga kependidikan, administrator sekolah dan siswa.
- b. Sebagai manager, seorang Kepala Sekolah harus memerankan. Fungsi manajerial dengan melakukan proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan mengkoordinasikan.
- c. Sebagai administrator, seorang Kepala Sekolah memiliki dua tugas utama. *Pertama*, sebagai pengendali struktur organisasi. *Kedua* melaksanakan administrasi substantif yang mencakup administrasi kurikulum, kesiswaan, personalia, keuangan, sarana, hubungan dengan masyarakat, dan administrasi umum.
- d. Sebagai supervisor, seorang Kepala Sekolah berkewajiban untuk memberikan pembinaan atau bimbingan kepada para guru dan tenaga kependidikan.
- e. Sebagai leader, seorang Kepala Sekolah harus mampu menggerakkan orang lain agar secara sadar dan sukarela melaksanakan kewajibannya secara baik sesuai dengan yang diharapkan pimpinan dalam rangka mencapai tujuan.
- f. Sebagai innovator, seorang Kepala Sekolah melaksanakan pembaruan-pembaruan terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah yang dipimpin berdasarkan prediksi-prediksi yang telah dilakukan sebelumnya.
- g. Sebagai motivator, maka Kepala Sekolah harus selalu memberikan motivasi kepada guru dan tenaga kependidikan.<sup>11</sup>

Kepala Sekolah profesional tidak saja dituntut untuk melaksanakan berbagai tugas di sekolah, tetapi ia juga

harus mampu menjalin hubungan atau kerja sama dengan masyarakat dalam rangka membina pribadi peserta didik secara optimal.<sup>12</sup> Guna mendukung pelaksanaan reformasi di bidang pendidikan yang berlandaskan amanat para pendiri bangsa. Seorang kepala sekolah, punya kewajiban menjadi salah satu penyelenggara pendidikan. Kepala sekolah perlu memiliki multi kecerdasan baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual dengan demikian diharapkan mereka dapat melaksanakan tugasnya sebagai kepala sekolah secara baik, figur kepala sekolah juga harus baik, supaya dapat membawa pengaruh baik terhadap proses belajar mengajar di sekolah yang dipimpinnya. Namun realitasnya sekarang tidak semua kepala sekolah memiliki hal tersebut secara seimbang. Oleh karena itu, perlu segera diadakan periodisasi kepala sekolah yang tidak berkompeten dan habis masa tugasnya sebagai kepala sekolah demi penyegaran dan regenerasi.

Periodisasi kepala sekolah dapat dilakukan setelah mencapai 2 kali masa jabatan (8 tahun), dan dapat menjadi kepala sekolah lagi apabila telah menjalani sebagai guru selama 4 tahun, serta selama menjadi guru memiliki prestasi baik dan istimewa. “Pelaksanaan periodisasi kepala sekolah bukan berarti semata-mata mengganti Kepala Sekolah, sebab periodisasi lebih pada ukuran masa tugas dari pengangkatan seorang guru menjadi kepala sekolah dalam kriteria tugas tambahan”.<sup>13</sup> Saat ini, masa jabatan kepala sekolah dibatasi, bahkan secara yuridis masa tugas Kepala Sekolah telah diatur dalam pasal 10 Bab V Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 bahwa,

- (1) Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya, apabila:
  - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas atau
  - b. memiliki prestasi yang istimewa.

<sup>11</sup> Nukolis, 2003, *Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model dan Aplikasi*, Grasindo, Jakarta, hlm. 119–121.

<sup>12</sup> Mulyasa E., 2006, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 187.

<sup>13</sup> Deni Ranoptri, 2015, *Jutaan Kepsek Bakal Lengser Periodisasi Kepala Sekolah*, Kabar Guru, 3 April 2015, dari <http://kkgjaro.blogspot.com/2015/04/jutaan-kepsek-bakal-lengser-tergeser.html#ixzz3hVDSYTGp> diakses pada tgl 6-9-2015

- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kabupaten/kota/provinsi/nasional.
- (5) Kepala sekolah/madrasah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

Pada pasal 10 Permendiknas No. 28 Tahun 2010 disebutkan bahwa, "Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan". Yaitu tanggal 27 Oktober 2010. Pada pasal 18 juga telah mengamanatkan bahwa,

- "(1) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah wajib melaksanakan program penyiapan calon kepala sekolah/madrasah.
- (2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah wajib melaksanakan Peraturan Menteri ini dalam penugasan guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah paling lambat tahun 2013".

Sesuai UU nomor. 5 tahun 2014 tentang ASN berkaitan dengan periodisasi jabatan kepala sekolah guru hanya bisa menjabat 2 kali periode atau  $2 \times 4$  tahun. Apabila kinerjanya buruk dan melampaui masa tugas yang telah ditentukan dengan aturan yang diberlakukan sekarang, maka dapat diberhentikan dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Tidak perlu lama mengambil waktu untuk merealisasikan implementasi periodisasi jabatan kepala sekolah, karena aturannya sudah jelas juga sesungguhnya sekolah-sekolah membutuhkan perombakan sehingga dapat bersaing untuk dapat menjadi lebih baik dengan sekolah-sekolah lain. Apabila regenerasi kepala sekolah berjalan baik, tentu dapat menumbuhkan semangat guru untuk meningkatkan kinerja serta ikut berkompetisi secara sehat supaya dapat terpilih menjadi kepala sekolah, dan dapat melahirkan kepala sekolah yang memiliki potensi serta kinerja yang memuaskan sehingga berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.

### Masa Tugas Kepala Sekolah di Lumajang

Sebenarnya pengangkatan, promosi, pindah tugas, mutasi dan pemberhentian tugas seseorang dalam suatu instansi bukanlah hal yang luar biasa dan termasuk di dalamnya saat menyikapi atau menanggapi keputusan atas proses tersebut. Hal yang wajar terjadi, dapat dengan beberapa alasan seperti pengembangan profesi, pengembangan organisasi atau optimalisasi pendayagunaan aparatur, menambah pengalaman dalam tugas, mempererat sinergi, pemerataan dan lain-lain. Tetapi dapat diakui realitasnya banyak kepala sekolah yang kurang siap mental untuk kembali mengajar

menjadi guru. Di samping karena aturannya masih tergolong baru, juga mungkin sulit mengubah paradigma lama, di mana kepala sekolah seolah-olah pimpinan yang tak bisa dibantah dan seolah-olah tidak ada guru lain yang bisa menjadi kepala sekolah, bahkan lamanya seorang guru menjadi kepala sekolah beragam, lamanya guru dapat menjadi kepala sekolah tidak mudah ditebak,

"Pada sisi yang berbeda Kepala Sekolah seakan menjadi jabatan seumur hidup tanpa mengingat lagi regenerasi. Bila tidak ada pengaturan pembatasan masa tugas kepala sekolah akan terjadi kepala sekolah sampai tua, kepala sekolah seumur hidup, akan terjadi kejenuhan, sehingga dimungkinkan menurunnya prestasi dan kinerja. Memberi kesempatan kepada guru sebagai generasi penerus yang lebih enerjik dalam suasana baru, berkompetisi, setidaknya dalam setiap akhir periodisasi ada seleksi calon kepala sekolah baru".<sup>14</sup>

Faktanya platform sentralistik tidak mampu mengakomodir secara efektif, efisien perubahan-perubahan dinamis di daerah, tidak semua dapat siap menerapkan seluruh Permendiknas No 28 Tahun 2010 regulasi baru yang ditetapkan pada tanggal 27 Oktober 2010, terutama pasal 10, kebijakan di daerah tidak sesuai dengan Permendiknas tersebut. Sesuai asas yang berlaku asas *lex superior derogate lex inferiori* serta sesuai tata urutan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh dan tidak dibenarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berarti kebijakan yang dikeluarkan oleh daerah yang berkaitan dengan masa tugas kepala sekolah tidak boleh bertentangan dengan peraturan menteri maupun UU.

Penyimpangan yang ada dapat menimbulkan kesalahan persepsi dan ketidakpuasan di kalangan kepala sekolah sehingga ada keengganan eks-kepala sekolah untuk kembali mengajar, seharusnya kepala sekolah selesai menjabat siap kembali untuk menjadi guru, lantaran jabatan kepala sekolah merupakan tugas sampingan yang diberikan guru. Akibat kurang jelasnya periodisasi masa jabatan kepala sekolah, pemahaman kebijakan kewenangan institusi yang ada atau tergantung pada kebijakan pembuat kebijakan di daerah /kabupaten serta kondisi daerah masing-masing, dengan keterbatasan kesiapan daerah membuat implementasi permendiknas tersebut tertunda bahkan sampai tahun 2015.

Menurut surat dari Pemkab Lumajang melalui Dinas Pendidikan Lumajang nomor: 800/2839/427.34/2015 tanggal 13 Juli 2015 Jabatan Kepala Sekolah karena tidak sesuai dengan ketentuan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

<sup>14</sup> *Ibid*

1. TK : 14 orang
  2. SD : 38 orang
  3. SMP : 17 orang
  4. SMA : 2 orang
  5. SMK : 1 orang
- Jumlah : 172 orang

Dari surat tersebut menunjukkan bahwa di Dinas Pendidikan kabupaten Lumajang para Kepala Sekolah/ Madrasah telah banyak yang masa tugasnya sudah tidak sesuai dengan ketentuan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 bahkan ada 172 orang.” Di Lumajang banyak Kepala Sekolah yang menjabat sebagai kepala sekolah melebihi 12 tahun bahkan, ada juga Kepala Sekolah yang telah menjabat selama 37 tahun”.<sup>15</sup> Menurut bupati Lumajang As’at Malik bahwa, “Saat ini banyak kepala sekolah yang menjabat hingga 37 tahun dan jumlahnya sangat banyak sekali”.<sup>16</sup> Ketika wawancara pada tanggal 8 Juli 2015 dengan Wakil Ketua Komisi D DPRD kabupaten Lumajang juga menjelaskan bahwa, “10 kepala sekolah SKTPnya hangus diupdate data di dapodik belum valid”. Kalau dibiarkan kepala sekolah yang masa tugasnya melebihi 4 tahun tersebut sangat mungkin terjadi validasi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dalam validasi tidak valid berwarna merah tidak diakui pada Lembar Info PTK maka tidak menutup kemungkinan SK Kepsek yang kadaluarsa/expired berdasar ketentuan yang tidak mengenal lagi ada periode ke empat dan kalau tidak valid kemungkinan besar dapat dipastikan SKPT tidak terbit dan sertifikasi tidak cair, sehingga banyak Kepala Sekolah yang tidak bisa diterbitkan SK Tunjangan Profesi karena "SK Kepala Sekolah Kadaluarsa."

Tidak dapat diselesaikan kecuali ada kebijakan para pengambil keputusan/kebijakan di kabupaten Lumajang. Untuk itu Bupati Lumajang berusaha mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 secara bertahap bahkan, “Bupati Lumajang, Drs. H. As’at, M. Ag, telah mempersiapkan SK pencopotan ratusan kepala sekolah yang masa bhaktinya sudah mencapai 12 tahun atau tiga periode.<sup>17</sup> Persiapan implementasi Permendiknas tersebut melibatkan birokrat dalam bidang pendidikan yaitu Dinas Pendidikan Lumajang sebagai pelaksana, mulai tahun 2015 melakukan antara lain: sosialisasi serta koordinasi masing-masing pihak yang berkaitan dengan implementasi pasal 10 permendiknas tahun 2010; pendataan kepala sekolah yang masa jabatannya telah melebihi 12 tahun; rekrutmen calon kepala sekolah, mutasi dalam jabatan dari kepala sekolah menjadi guru, sebanyak 153 guru mendapat surat

perintah sebagai Plt kepala sekolah sesuai surat pemerintah kabupaten Lumajang khususnya dinas pendidikan Lumajang nomor: 800/4394/427.34/2015 tertanggal 15 September 2015. Sehingga saat ini di Lumajang banyak kepala sekolah yang kemudian dikembalikan sesuai fungsi awalnya menjadi guru terutama yang telah memiliki masa tugas 12 tahun. Menurut Permendiknas No 28 tahun 2010 masa tugas kepala sekolah dibatasi hanya empat tahun dimungkinkan dapat dikembalikan menjadi guru, masa jabatannya hingga 12 tahun memang seperti ada penilaian istimewa, seharusnya mempertimbangkan penilaian kinerja sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 ayat 1,2,3 Permendiknas no. 28 tahun 2010 bahwa,

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun
- (2) *Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah/madrasah*
- (3) *Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah di mana yang bersangkutan bertugas”.*

Dengan adanya regulasi tersebut para kepala sekolah seharusnya menyiapkan mental, teguh jika dikembalikan menjadi guru, dan dapat memotivasi kerja guru walaupun jadi mantan kepala sekolah.

Implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor, apabila implementasi dipaksakan pengangkatan kepala sekolah baru dalam jumlah banyak asal memenuhi jumlah pengganti kepala sekolah yang habis masa tugasnya dapat tidak memenuhi standart atau persyaratan yang ditetapkan perundang-undangan yang berlaku. ”Bagi yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan jangan dipaksakan, sebab nantinya akan mengacaukan kualitas pendidikan itu sendiri”.<sup>18</sup> Meskipun demikian kekhawatiran tersebut tidak harus menghentikan langkah pemangku kebijakan untuk merancang rumusan serta memutuskan dan menetapkan produk hukum atau peraturan yang secara filosofis telah memenuhi pesan-pesan suci yang diamanatkan oleh produk hukum di atasnya. Apabila periodisasi masa jabatan kepala sekolah dilaksanakan secara konsisten dengan penilaian kinerja yang akuntabel, transfaran dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan di sekolah-sekolah dan akhirnya meningkatkan mutu pendidikan nasional. Para guru dan kepala sekolah utamanya yang bersertifikasi seharusnya bertanggung jawab secara moral menjadikan

<sup>15</sup> Yd/red, 2015, *Bupati Lumajang Segera Ganti Kepala Sekolah Yang Habis Masa Jabatannya*, Lumajang Satu.com, 2 Juni 2015, dari <http://lumajangsatu.com/berita-bupati-lumajang-segera-ganti-kepala-sekolah-yang-habis-masa-jabatannya.html> diakses pada tgl 10/9/2015.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Syamsudin, 2015, *Bupati Siapkan SK Pencoporan 245 Kasek*, Pedomannusantara.com, 11/7/2015, dari <http://pedomannusantara.com/berita-bupati-siapkan-sk-pencoporan-245-kasek.html> diakses pada tgl 2/9/2015

<sup>18</sup> Mendiknas, 2010, *Mutasi Kepala Sekolah Kewenangan Kepala Daerah*, republika. Id. Malang, 14/11/2010, dari <http://www.co.id/berita/pendidikan/berita/10/11/14/146632-mendiknas> diakses pada tgl 28/8/2015

Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 sebagai dasar dalam melaksanakan tugas maupun kebijakan pendidikan bahkan di seluruh wilayah NKRI, Karena Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah baik tingkat SD, SMP maupun SMA sederajat telah di disain untuk jangka panjang dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan, perbaikan pendidikan di Indonesia.

## PENUTUP

### Simpulan

Peran kepala sekolah sangat penting bagi kemajuan pendidikan di sekolah sebagai kekuatan sentral, kekuatan penggerak kehidupan sekolah. Sebagai pemimpin kepala sekolah memiliki tanggung jawab atas keberlangsungan organisasi sekolah yang dipimpinnya, dibutuhkan kompetensi tinggi untuk membangun sekolah berkualitas dan sekolah yang efektif, dengan ditetapkannya periodisasi masa tugas kepala sekolah dalam pasal 10 Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 diharap akan memaksa kepala sekolah memaksimalkan kinerjanya sehingga proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat berjalan sesuai dengan upaya-upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Setiap peraturan seharusnya dilaksanakan sebaik-baiknya, konsisten dan tidak dilanggar. Namun, faktanya masih ada masa jabatan kepala sekolah yang diperpanjang melebihi maksimal dua periode atau delapan tahun banyak kepala sekolah yang menjabat sampai 12 tahun lebih bahkan ada yang menjabat sampai 37 tahun, tidak sesuai dengan pasal 10 Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010, permendiknas tersebut ditetapkan tanggal 27 Oktober 2010 tetapi implementasinya baru mulai tahun 2015 jelas melanggar peraturan yang ada.

### Saran

Janganlah ada kebijakan-kebijakan Kepala Daerah yang mengutamakan kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan, atau di luar kepentingan tujuan pendidikan dan perundang-undangan yang telah di disain untuk jangka panjang atau kebijakan di luar kepentingan untuk bangsa dan negara karena akan berakibat kaburnya tujuan pendidikan.

Janganlah jabatan Kepala Sekolah dianggap sebagai jabatan seumur hidup, merasa frustrasi, marah apabila masa jabatannya selesai dan harus menjadi guru lagi. Jabatan merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab bukan dipertahankan untuk kepentingan pribadi, Oleh karena itu, harus dilaksanakan dengan ikhlas, *legowo* jika suatu saat jabatan yang dipegangnya diambil oleh yang berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agus Salim, 2015, cetakan I, *Memimpin dengan Human Touch*, Mahamedia Cipta Sarana, Lumajang.
- Ahmad D. Marimba, 2006, *Pengantar Filsafat Pendidikan*, PT Almaarif, Bandung.
- Mulyasa E, 2006, *Menjadi Guru Profesional*, PT Rosda Karya, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Nukolis, 2003, *Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model dan Aplikasi*, Grasindo, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta.
- Thoha, Mifta, 1983, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wahjosumidjo, 2007, *Kepemimpinan Kepala Sekolah Raja Grafindo Persada*, Jakarta.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Permendiknas nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.
- Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standart Kepala Sekolah/Madrasah.

### Internet/Media

- Center of Education and History, 2014. *Zona Ilmu pendidikan*, <http://zonainfosemua.blogspot.com/2014/03/pengertian-guru-menurut-pakar-pendidikan.html>.
- Wikipedia, 2015. *Kepala Sekolah*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala\\_sekolah](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_sekolah).
- Kemenag Jatim, *Permendiknas no.28 tahun 2010*, <http://jatim.kemenag.go.id/file/file/peraturantentangPNS/dxoc1413864218.pdf>.
- Deni Ranoptri, 2015. *Jutaan Kepsek Bakal Lengser Perodesasi Kepala Sekolah*.
- Kabar Guru, 3 April 2015, <http://kkjaro.blokspot.com/2015/04/jutaan-kepsek-bakal-lengser.-tergeser.html#ixzz3hVDSYTGp>.
- Yd/red, 2015. *Bupati Lumajang Segera Ganti Kepala Sekolah Yang Habis Masa Jabatannya*, Lumajang Satu.com, 2 Juni 2015, <http://lumajangsatu.com/hberita-bupati-lumajang-segera-ganti-kepala-sekolah-Yang-habis-masa-jabatannya.html>.
- Syamsudin, 2015. *Bupati Siapkan SK Pencoporan 245 Kasek*, *Pedomanusantara.Com*, 11/7/2015, <http://pedomannusantara.com/berita-bupati-siapkan-sk-pencoporan-245-kasek.html>.
- Mendiknas, 2010. *Mutasi Kepala Sekolah Kewenangan Kepala Daerah*, *Republika*. Id. Malang, 14/11/2010, <http://www.co.id/berita/pendidikan/berita/10/11/14/146632-mendiknas>.

# Penerapan HAPA dan Dimensi Mutu (RATER) Dalam Rangka Evaluasi Nilai IPK Mahasiswa (Studi di Prodi S1 ARS Stikes Yayasan RS Dr. Soetomo)

## Implementation of HAPA and RATER in Order to Evaluation GPA Students

Muhammad Risya Rizki

STIKES Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo, Jl. Karangmenjangan 12 Surabaya 60286

Surel: mrrizki49@gmail.com

### ABSTRACT

*GPA (Grade Point Average) student S1 ARS STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo which had a value of less than 3 is 25.3% by class in 2012 and 41.8% in class in 2013. The objective of this study is to analyze the factors that affect the value of grade point average (GPA) of students in study program S1 STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo based on approach of the Health Action Process Approach (HAPA) and student's satisfaction with the services provided. This study was survey research. The samples in this study was 109 students S1 who has been studying for at least 1 year. The results showed that there were several factors based on RATER dimensions that respondents had bad experience such as timeliness faculty, academic staff ability, KHS timeliness, clarity of information lectures, politeness of staff, complete infrastructure facilities, lecture room noise, attentive staff, the ease of getting info/contact faculty and academic staff. Based on HAPA the obstacles of respondents during the undergoing lectures, among others, is a family concern, timeliness pay tuition and attention of friends. On the Action Planning known respondents lacked the intention to learn every day. The result On Coping Planning respondents could not manage to anticipate the obstacles during the lectures. On Maintenance the respondents had not made maximum effort to maintain learning in the face of obstacles that arose. And respondents chose to study harder in an effort to improve value.*

### ABSTRAK

*Nilai IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) mahasiswa S1 ARS STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo yang memiliki nilai kurang dari 3 ada 25,3% pada angkatan tahun 2012 dan pada angkatan tahun 2013 ada 41,8%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa di Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit STIKES Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo berdasarkan pendekatan Health Action Process Approach (HAPA) dan kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan yang diberikan. Penelitian ini adalah penelitian survey. Sampel dari penelitian ini adalah 109 mahasiswa yang telah menempuh studi minimal selama 1 tahun. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpuasan responden/mahasiswa terhadap kualitas kegiatan proses belajar di Prodi S1 ARS STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo berdasarkan dimensi kepuasan RATER diantaranya adalah ketepatan waktu dosen, kemampuan staf akademik, ketepatan waktu KHS, kejelasan info materi kuliah, kesopanan staf, kejelasan info PBM, kelengkapan fasilitas sarana, kebisingan ruang perkuliahan perhatian staf, kemudahan mendapatkan info/menghubungi dosen dan staf akademik. Berdasarkan pendekatan HAPA hambatan responden selama menjalani perkuliahan antara lain adalah perhatian keluarga, ketepatan waktu membayar SPP dan perhatian teman. Pada Action Planning diketahui responden kurang memiliki niat untuk belajar setiap hari. Pada Coping Planning responden dapat dikatakan tidak memiliki usaha untuk mengantisipasi hambatan yang timbul selama perkuliahan. Pada Maintenance responden belum memiliki usaha yang maksimal untuk mempertahankan pembelajaran dalam menghadapi hambatan yang timbul. Dan responden memilih untuk lebih giat belajar sebagai usaha untuk memperbaiki nilai.*

**Key words:** GPA (Grade Point Average), satisfaction, RATER, HAPA

### PENDAHULUAN

Perguruan tinggi sebagai Human Resource Development Agent memainkan peran kunci dalam pembangunan, khususnya sumber daya manusia. Perubahan tatanan pergaulan ekonomi dan politik internasional yang terus berubah dengan cepat, menempatkan posisi perguruan tinggi pada tantangan sekaligus peluang untuk memainkan peran strategisnya dalam menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi. Mengandalkan kekayaan sumber daya alam, ternyata tidak

cukup memadai lagi untuk mengangkat kesejahteraan rakyat, sehingga terjadi pergeseran prioritas untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai faktor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Strategi pembangunan komunitas masyarakat bangsa berbasis ilmu pengetahuan memerlukan respons cepat, tepat dan strategis.

STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo membuka program studi Administrasi Rumah Sakit karena nantinya Sarjana Administrasi Rumah Sakit adalah tenaga kesehatan yang

mempunyai peran strategis untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan pengelolaan RS di era persaingan global. Pendidikan S-1 administrasi rumah Sakit didesain untuk menyiapkan lulusan yang memiliki kualifikasi manajerial di bidang manajemen dan rekam medis di Rumah Sakit.

Kebutuhan tenaga bidang manajemen di Rumah Sakit tidak kalah pentingnya dengan kebutuhan tenaga medis karena organisasi rumah sakit merupakan organisasi yang unik dan kompleks. Unik karena di rumah sakit terdapat suatu proses yang menghasilkan jasa perhotelan sekaligus jasa medik dalam bentuk pelayanan kepada pasien yang rawat inap maupun yang berobat jalan. Kompleks karena terdapat permasalahan yang sangat rumit di mana rumah sakit merupakan suatu organisasi padat karya dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, didalamnya terdapat berbagai macam fasilitas pengobatan, berbagai macam peralatan, dan yang dihadapi pun adalah orang-orang yang beremosi labil, tegang emosional, karena sedang dalam keadaan sakit, termasuk keluarga pasien. Oleh karena itu dapat dikatakan pelayanan rumah sakit jauh lebih kompleks daripada sebuah hotel.

Program Studi S1 Administrasi Rumah Sakit baru dibuka pada tahun 2012 dan pada saat ini masih terdapat dua tahun angkatan yaitu tahun angkatan 2012 pada semester IV dan tahun angkatan 2013 pada semester II dan masih belum memiliki lulusan karena baru berjalan 2 tahun. Nilai IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) mahasiswa S1 ARS dapat dilihat pada tabel berikut:

**Table 1.** Data Nilai IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) Mahasiswa S1 ARS Tahun Angkatan 2012 dan 2013 Pada Tahun 2014

IPK	Tahun Angkatan				Rata-rata persentase
	2012		2013		
	n	%	n	%	
< 3	20	25,3	33	41,8	33,55
≥ 3	59	74,7	40	50,6	62,65
Total	79	100	73	100	

Sumber: Data IPK Prodi S1 ARS

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) mahasiswa S1 angkatan tahun 2012 yang memiliki nilai kurang dari 3 ada sebanyak 20 mahasiswa atau 25,3% dari seluruh kelas dan IPK mahasiswa S1 angkatan tahun 2013 yang memiliki nilai kurang dari 3 ada sebanyak 33 mahasiswa atau 41,8% dari seluruh kelas. Hal ini berarti IPK mahasiswa Prodi S1 ARS masih banyak yang memiliki nilai rendah, padahal saat ini beberapa instansi baik swasta maupun negeri atau syarat untuk menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) memasang standar minimal IPK 3,00.

Berdasarkan data diatas, maka masalah pada penelitian ini adalah masih banyaknya Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

mahasiswa S1 ARS yang di bawah 3,00 sebesar 33,55% di STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo, sehingga disusun analisis faktor yang mempengaruhi nilai IPK mahasiswa.

Penelitian ini berfokus pada teori *Health Action Process Approach* (HAPA) dan kepuasan RATER, maka variabel yang diteliti dalam penelitian ini dibatasi hanya pada *Barriers and resources, Intention, Planning, Action* Pembelajaran. Sedangkan faktor organisasi, faktor mahasiswa, *Risk perception, Outcome Expectancies, Task Self-Efficacy, Maintenance Self-Efficacy* dan *Recovery Self-Efficacy* tidak diteliti karena penelitian ini hanya ingin memotret pola perilaku mahasiswa pada saat mengikuti perkuliahan di samping itu prodi S1 ARS baru berdiri pada tahun 2012 sehingga masih belum ada lulusan yang dapat menjadi parameter.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa di Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit STIKES Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo berdasarkan pendekatan *Health Action Process Approach* (HAPA) dan kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan yang diberikan.

## METODE

Jenis dan rancang bangun penelitian ini adalah penelitian survei. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masih banyaknya nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa kurang dari 3,00 pada mahasiswa Prodi S1 ARS STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo. Pengumpulan data dilakukan secara *cross sectional*.

Penelitian ini dilaksanakan di STIKES Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret 2015.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang menjalani studi di Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit STIKES Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo tahun 2015. Sampel dari penelitian ini adalah 109 mahasiswa S1 Program Studi Administrasi Rumah Sakit STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo yang telah menempuh studi minimal selama 1 tahun. Karena mahasiswa yang telah menempuh studi minimal 1 tahun diharapkan lebih dapat mengetahui kondisi yang ada.

Pengambilan data dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner. Data primer yang diambil melalui kuesioner dilakukan dengan cara menyerahkan kuesioner langsung kepada responden dan mendampingi saat mengisi kuesioner untuk menghindari adanya kesalahan pengisian.

Teknis analisis data dalam penelitian ini yaitu pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

### 1. Editing

Data atau keterangan yang sudah dikumpulkan dari daftar pertanyaan perlu di periksa kembali dan diperbaiki

dengan tujuan untuk melengkapi atau menyempurnakan data, memperjelas jawaban pasien dan melakukan koreksi terhadap jawaban yang tidak konsisten.

## 2. Coding

*Coding* data, yaitu menghitung jawaban responden untuk memperoleh informasi frekuensi dan jumlah jawaban tiap item pertanyaan. Hal ini digunakan untuk memudahkan analisis dan mengklasifikasikan jawaban menurut kriteria tertentu.

## 3. Tabulasi

Mengelompokkan data sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian dimasukkan ke dalam tabel yang sudah disiapkan. Untuk variabel *Initiative* dan *Recovery* dilihat frekuensi setiap jawaban responden. Sedangkan untuk variabel yang lain setiap atribut pertanyaan dikelompokkan yaitu rating 1 dan 2 serta rating 3 dan 4. Selanjutnya menggunakan konsep pareto 80/20, yaitu menjadi masalah atau perhatian bila penjumlahan rating 1 dan 2 sama dengan atau lebih dari 20% (Supriyanto, Djohan, 2011:169).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Karakteristik Responden

Karakteristik responden pada penelitian ini meliputi daerah asal responden, pendidikan terakhir responden dan jenis kelamin responden di STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo.

#### 1. Daerah asal responden

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mayoritas asal responden berasal dari kota-kota di Jawa Timur dan terbesar berasal dari kota Surabaya yaitu ada 50 mahasiswa (45,9%). Menurut Slameto (2003) lingkungan belajar siswa yang berpengaruh terhadap prestasi belajar terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Mayoritas responden berasal dari kota tempat STIKES YRSDS berada maka siswa diasumsikan tidak akan kesulitan dalam beradaptasi dengan kehidupan kampus.

#### 2. Pendidikan terakhir responden

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa mayoritas responden yang menuntut ilmu di STIKES Yayasan RS. Dr Soetomo berpendidikan akhir Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 84,4%, kemudian disusul dengan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 14,7%. Walaupun ada responden yang lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tetapi karena persentase kecil jadi tidak terlalu berpengaruh pada karakteristik responden.

Karakteristik jenis kelamin responden yang sedang menuntut ilmu di STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan sebesar

83 responden (76,1%) dan jenis kelamin laki-laki ada sebesar 26 responden (23,9%).

### B. Kepuasan Responden/Mahasiswa berdasarkan Dimensi Mutu RATER

Kepuasan adalah perbandingan antara apa yang diterima atau dirasakan (*perceived performance*) sama atau melebihi apa yang diharapkan. Loyalitas terjadi bila konsumen sangat puas (*elated, surprise*) atau apa yang diterima lebih besar dari harapan (Supriyanto S, 2005). Dimensi mutu pelayanan pada RATER terdiri dari *Reability, Assurance, Tangible, Emphaty, dan Responsiveness* (Supriyanto S, 2005).

Ketidakpuasan responden / mahasiswa terhadap kualitas kegiatan proses belajar dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.** Ketidakpuasan Responden terhadap kualitas Kegiatan Proses Belajar Mengajar Berdasarkan Dimensi Mutu RATER di Prodi S1 ARS STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo Tahun 2015

No	Dimensi Mutu	Pengalaman Kurang Baik/ Tidak Puas
1	<i>Reability</i>	Ketepatan waktu dosen dalam memulai dan mengakhiri perkuliahan Kemampuan staf akademik dalam menyiapkan fasilitas perkuliahan Ketepatan waktu staf akademik dalam memberikan KHS
2	<i>Assurance</i>	Kejelasan informasi tentang susunan materi perkuliahan yang akan diberikan Kesopanan staf akademik Kejelasan informasi tentang kegiatan akademik/PBM yang diberikan oleh staf akademik
3	<i>Tangible</i>	Kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana dalam perkuliahan Kebisingan di ruang perkuliahan
4	<i>Emphaty</i>	Perhatian staf akademik terhadap pertanyaan/keluhan mahasiswa
5	<i>Responsiveness</i>	Kemudahan menghubungi/ mendapatkan informasi dari dosen Kemudahan menghubungi/ mendapatkan informasi dari staf akademik

Berdasarkan tabel 2 diketahui beberapa aspek yang membuat mahasiswa/responden selama menjalani proses belajar mengajar di Prodi S1 ARS STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo antara lain adalah ketepatan waktu dosen, kemampuan staf akademik, ketepatan waktu KHS, kejelasan info materi kuliah, kesopanan staf, kejelasan info PBM, kelengkapan fasilitas sarana, kebisingan ruang perkuliahan perhatian staf, kemudahan mendapatkan info/menghubungi dosen dan staf akademik. Menurut Kotler P 2005 kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja hasil yang diharapkan, Jika kinerja di bawah harapan, pelanggan tidak puas. Bila responden tidak puas akan berdampak pada niat responden dalam menuntut ilmu di Prodi S1 ARS STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Abdullah dan Hanifah, 2001:63–86 bahwa lingkungan belajar seperti: cara memberi pelajaran, kurangnya bahan pelajaran, kurangnya alat-alat, bahan pelajaran tidak sesuai dengan kemampuan dan penyelenggaraan kuliah terlalu padat akan mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa.

### C. Pendekatan HAPA

*Health Action Process Approach* (HAPA) adalah pendekatan sosial kognisi dari perilaku kesehatan yang menunjukkan bahwa perubahan perilaku kesehatan merupakan suatu proses dari fase motivasi dan kehendak. *Variable Health Action Process Approach* (HAPA) pada penelitian ini terdiri dari:

#### 1. *Intention* Responden/Mahasiswa

Berdasarkan hasil penelitian *intention* atau niat responden atau mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di Prodi S1 ARS STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo sudah cukup baik, hal ini dapat diketahui dengan penjumlahan rating 1 dan 2 pada indikator pertanyaan *intention* kurang dari 20%. Dengan konsep pareto 80/20 maka artinya responden memiliki niat yang baik dalam menempuh/menjalani studi di Prodi S1 ARS STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo sampai lulus nanti. Menurut Bandura, 1997 menyatakan bahwa *intention* merupakan suatu kebulatan tekad untuk melakukan aktivitas tertentu atau menghasilkan suatu keadaan tertentu di masa depan. Menurut Abdullah dan Hanifah, 2001 faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa salah satunya adalah diri sendiri Seperti: tidak mempunyai tujuan yang jelas, kurang minat terhadap bahan pelajaran, kesehatan yang sering terganggu, kecakapan mengikuti pelajaran, kebiasaan belajar, dan kurangnya penguasaan bahan dan menurut Winkel, 1997:168–591 secara garis besar faktor yang mempengaruhi belajar dan prestasi belajar salah satunya adalah motivasi belajar.

#### 2. *Action Planning* Responden/Mahasiswa

*Action Planning* yaitu rencana penyusunan kegiatan yang akan dilakukan seperti kapan, di mana dan bagaimana cara belajar agar mendapat Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

lebih dari 3,00 atau sesuai dengan niat. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa responden kurang memiliki rencana untuk belajar setiap malam selama 1 jam, sedangkan kemauan responden dalam meningkatkan pengetahuan dinilai sudah baik. Niat yang baik tidak selalu menjamin terhadap tindakan yang sesuai. Hubungan antara niat dan perilaku sangat bervariasi (Schwarzer, 2014).

#### 3. *Initiative* Responden/Mahasiswa

Pada hasil penelitian diketahui bahwa *Initiative* responden yang memiliki niat/setuju untuk belajar setiap malam 1 jam paling banyak memilih tindakan melihat jadwal kuliah esok hari sebesar 55 responden dan kemudian yang memilih tindakan mulai membaca catatan/materi bila ada tugas ada sebesar 43 responden. Sedangkan responden yang tidak memiliki niat/tidak setuju untuk belajar setiap malam 1 jam paling banyak memilih tindakan melihat jadwal kuliah esok hari sebesar 33 responden dan kemudian yang memilih tindakan mulai membaca catatan/materi bila ada tugas ada sebesar 26 responden. Dan untuk *Initiative* responden yang memiliki niat/setuju untuk mencari berbagai sumber/media belajar selama mengikuti perkuliahan di Prodi S1 ARS STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo banyak memilih tindakan browsing di internet untuk meningkatkan pengetahuan sebesar 81 responden dan kemudian yang memilih tindakan mengajak teman berdiskusi/belajar kelompok untuk meningkatkan pengetahuan ada sebesar 51 responden. Sedangkan responden yang tidak memiliki niat/tidak setuju untuk mencari berbagai sumber/media belajar paling banyak memilih tindakan browsing di internet untuk meningkatkan pengetahuan sebesar 17 responden dan kemudian yang memilih tindakan akan meningkatkan pengetahuan saya bila ada teman yang mengajak diskusi ada sebesar 15 responden. Menurut Abdullah dan Hanifah, 2001:63–86 faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa salah satunya adalah diri sendiri Seperti: tidak mempunyai tujuan yang jelas, kurang minat terhadap bahan pelajaran, kesehatan yang sering terganggu, kecakapan mengikuti pelajaran, kebiasaan belajar, dan kurangnya penguasaan bahan dan menurut Winkel, 1997 motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non intelektual. Peranan yang khas yaitu dalam hal gairah atau semangat belajar, mahasiswa yang termotivasi kuat akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar, jadi tindakan belajar mahasiswa tergantung pada motivasinya.

#### 4. *Coping Planning* Responden/Mahasiswa

*Coping Planning* adalah penyesuaian diri mahasiswa untuk mengantisipasi hambatan yang timbul selama perkuliahan di Prodi S1 ARS STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa responden dapat dikatakan tidak memiliki usaha untuk mengantisipasi hambatan yang timbul selama perkuliahan di Prodi S1 ARS STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo sampai lulus nanti. Teori *Health Action Process Approach* (HAPA) menggambarkan serta menjelaskan bagaimana dan mengapa

seseorang menahan diri dari perilaku yang berisiko dan mengadopsi perilaku kesehatan, oleh karena itu *Health Action Process Approach* (HAPA) dapat diterapkan untuk meningkatkan kesehatan dan pencegahan perilaku, gaya hidup berisiko dan perilaku adiktif (Schwarzer, 2014). Jadi penyesuaian diri digunakan untuk mencegah diri dari perilaku yang berisiko. Sedangkan menurut Winkel (1997:168–591) hakikat inteligensi adalah kemampuan untuk menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan, untuk mengadakan suatu penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan itu dan untuk menilai keadaan diri secara kritis dan obyektif. Taraf inteligensi ini sangat mempengaruhi prestasi belajar seseorang mahasiswa yang memiliki taraf inteligensi tinggi mempunyai peluang lebih besar untuk mencapai prestasi belajar yang lebih tinggi.

#### 5. *Maintenance* Responden/Mahasiswa

*Maintenance* usaha untuk mempertahankan pembelajaran dalam menghadapi hambatan yang timbul selama masa pemeliharaan sesuai dengan rencana yang akan dilakukan mahasiswa selama perkuliahan. Menurut Abdullah dan Hanifah, 2001:63–86 faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa salah satunya adalah lingkungan belajar seperti: cara memberi pelajaran, kurangnya bahan pelajaran, kurangnya alat-alat, bahan pelajaran tidak sesuai dengan kemampuan dan penyelenggaraan kuliah terlalu padat. Sedangkan menurut Winkel (1997:168–591) secara garis besar faktor yang mempengaruhi belajar dan prestasi belajar salah satunya sarana dan prasarana lingkungan sekolah karena kelengkapan fasilitas sekolah, seperti papan tulis, ohp akan membantu kelancaran proses belajar mengajar di sekolah itu. Selain itu bentuk ruangan, sirkulasi udara, ketenangan, serta pencahayaan lingkungan sekitar sekolah juga dapat mempengaruhi proses belajar mengajar. Menurut Abdullah dan Hanifah (2001), dalam proses belajar diperlukan perilaku belajar yang sesuai dengan tujuan pendidikan, sehingga prestasi akademik dapat ditingkatkan. Perilaku belajar, sering juga disebut kebiasaan belajar, merupakan dimensi belajar yang dilakukan individu secara berulang, sehingga menjadi perilaku yang otomatis atau spontan. Hal inilah yang mempengaruhi prestasi belajar. Berdasarkan hasil penelitian diketahui responden belum memiliki usaha yang maksimal untuk mempertahankan pembelajaran dalam menghadapi hambatan yang timbul selama masa pemeliharaan sesuai dengan rencana yang akan dilakukan mahasiswa selama perkuliahan di Prodi S1 ARS STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo. Kurangnya *Maintenance* yang dilakukan responden bisa juga karena suasana dan sarana yang kurang mendukung di kampus atau di rumah atau di tempat kos.

#### 6. *Recovery* Responden/Mahasiswa

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa mayoritas sebesar 99 responden memilih untuk lebih giat belajar sebagai usaha untuk memperbaiki nilai, mayoritas sebesar 67 responden memilih untuk berdiskusi dengan pembimbing akademik sebagai usaha untuk memperbaiki

nilai bila ada mata kuliah yang tidak lulus dan mayoritas responden yaitu 89 mahasiswa memilih untuk belajar lebih giat sebagai usaha yang dilakukan responden bila tidak dapat lulus tepat waktu karena ada mata kuliah yang harus diulang selama perkuliahan di Prodi S1 ARS STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo.

Menurut Abdullah dan Hanifah (2001:63–86), proses belajar akan selalu berawal dari adanya motivasi dan tujuan, baik dinyatakan secara eksplisit maupun implisit, yang dimaksud untuk memberi arah bagi pencapaian yang ingin diperoleh pada rentang waktu tertentu. Sedangkan menurut Winkel (1997:168–591) sikap yang pasif, rendah diri dan kurang percaya diri dapat merupakan faktor yang menghambat mahasiswa dalam menampilkan prestasi belajarnya. Sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal tertentu. Sikap mahasiswa yang positif terhadap mata pelajaran merupakan langkah awal yang baik dalam proses belajar mengajar di sekolah.

#### 7. *Barriers and resources*

*Barriers and resources* adalah dukungan dari keluarga dan teman untuk mencapai niat mahasiswa melalui perhatian dan motivasi yang diberikan keluarga dalam menuntut ilmu di Prodi S1 ARS STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo dan perhatian dan motivasi yang diberikan teman dalam menuntut ilmu di Prodi S1 ARS STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa yang menjadi hambatan responden selama menjalani perkuliahan di Prodi S1 ARS STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo antara lain adalah perhatian keluarga, ketepatan waktu membayar SPP dan perhatian teman.

Menurut Abdullah dan Hanifah, 2001: 63–86 faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa diantaranya diri sendiri seperti: tidak mempunyai tujuan yang jelas, kurang minat terhadap bahan pelajaran, kesehatan yang sering terganggu, kecakapan mengikuti pelajaran, kebiasaan belajar, dan kurangnya penguasaan bahan. Lingkungan keluarga seperti: masalah kemampuan ekonomi, masalah *broken home* dan kurangnya kontrol orang tua. Serta masyarakat seperti: gangguan dari jenis kelamin, bekerja sepulang sekolah, berorganisasi, dan tidak dapat mengatur waktu rekreasi dan waktu istirahat.

#### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Barriers and resources* responden/mahasiswa selama menuntut ilmu di Prodi S1 ARS STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo menunjukkan bahwa yang menjadi hambatan responden selama menjalani perkuliahan di Prodi S1 ARS STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo antara lain adalah perhatian keluarga, ketepatan waktu membayar SPP dan perhatian teman.

2. Niat (*Intention*) mahasiswa untuk mengerjakan segala aktivitas perkuliahan di Prodi S1 ARS STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo menunjukkan bahwa responden memiliki niat yang baik dalam menempuh/menjalani studi di Prodi S1 ARS STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo sampai lulus nanti.
3. *Action Planning* responden selama mengikuti perkuliahan di Prodi S1 ARS STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo kurang memiliki rencana untuk belajar setiap malam selama 1 jam, sedangkan kemauan responden dalam meningkatkan pengetahuan dinilai sudah baik. Dan *Initiative* responden yang memiliki niat/setuju untuk belajar setiap malam 1 jam paling banyak memilih tindakan melihat jadwal kuliah esok hari sebesar 55 responden dan kemudian yang memilih tindakan mulai membaca catatan/materi bila ada tugas ada sebesar 43 responden. Sedangkan responden yang tidak memiliki niat/tidak setuju memilih tindakan melihat jadwal kuliah esok hari sebesar 33 responden dan kemudian yang memilih tindakan mulai membaca catatan/materi bila ada tugas ada sebesar 26 responden. Dan untuk *Initiative* responden yang memiliki niat/setuju untuk mencari berbagai sumber/media belajar selama mengikuti perkuliahan di Prodi S1 ARS STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo banyak memilih tindakan browsing di internet untuk meningkatkan pengetahuan sebesar 81 responden dan kemudian yang memilih tindakan mengajak teman berdiskusi/belajar kelompok untuk meningkatkan pengetahuan ada sebesar 51 responden. Sedangkan responden yang tidak memiliki niat/tidak setuju paling banyak memilih tindakan browsing di internet untuk meningkatkan pengetahuan sebesar 17 responden dan kemudian yang memilih tindakan akan meningkatkan pengetahuan saya bila ada teman yang mengajak diskusi ada sebesar 15 responden.
4. *Coping Planning* mahasiswa selama perkuliahan di Prodi S1 ARS STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo diketahui bahwa responden dapat dikatakan tidak memiliki usaha untuk mengantisipasi hambatan yang timbul selama perkuliahan di Prodi S1 ARS STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo sampai lulus nanti.
5. *Maintenance* mahasiswa selama perkuliahan di Prodi S1 ARS STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo menunjukkan bahwa responden belum memiliki usaha yang maksimal untuk mempertahankan pembelajaran dalam menghadapi hambatan yang timbul selama masa pemeliharaan sesuai dengan rencana yang akan dilakukan mahasiswa selama perkuliahan di Prodi S1 ARS STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo.
6. *Recovery* responden menunjukkan mayoritas sebesar 99 responden memilih untuk lebih giat belajar sebagai usaha untuk memperbaiki nilai, mayoritas sebesar 67 responden memilih untuk berdiskusi dengan pembimbing akademik sebagai usaha untuk memperbaiki nilai bila ada mata kuliah yang tidak lulus dan mayoritas responden yaitu 89 mahasiswa memilih untuk belajar lebih giat sebagai usaha yang dilakukan responden bila tidak dapat lulus tepat waktu karena ada mata kuliah yang harus diulang selama perkuliahan di Prodi S1 ARS STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo.
7. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpuasan responden/mahasiswa terhadap kualitas kegiatan proses belajar di Prodi S1 ARS STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo diantaranya adalah ketepatan waktu dosen, kemampuan staf akademik, ketepatan waktu KHS, kejelasan info materi kuliah, kesopanan staf, kejelasan info PBM, kelengkapan fasilitas sarana, kebisingan ruang perkuliahan perhatian staf, kemudahan mendapatkan info/menghubungi dosen dan staf akademik.

#### SARAN

1. Manajemen dan stakeholders Prodi S1 ARS STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo perlu melakukan evaluasi secara teratur/berkala pada pengelolaan proses belajar mengajar (PBM) dan manajemen serta organisasi.
2. Dosen diharapkan bukan hanya memberikan pengetahuan kognitif tetapi juga harus memotivasi mahasiswa untuk meraih/meningkatkan prestasinya.
3. Dosen dan dosen pembimbing akademik mahasiswa diharapkan lebih memberikan perhatian pada mahasiswa dan masalah mahasiswa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Winkel WS. **Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar**. Jakarta. Gramedia. 1997. 168–591.
- Bandura A. **Self-Efficacy: The exercise of control**. New York. Freeman. 1997.
- Supriyanto S. **Pemasaran Jasa Industri Kesehatan**. Surabaya. Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. 2005.
- Kotler P. **Marketing Management Edisi Kesebelas Jilid 1. Edisi Bahasa Indonesia**. Jakarta. Indeks. 2005.
- Supriyanto S, Djohan AJ. **Metodologi Riset Bisnis dan Kesehatan**. Banjarmasin. PT Grafika Wangi Kalimantan. 2011. 169.
- Abdullah S, Hanifah. **Pengaruh Perilaku Belajar Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Akutansi**. Jurnal Media Riset Akutansi, Auditing dan Informasi. Desember 2011 Vol. 1, No. 3. Hal. 63–86.
- Schwarzer R. **The Health Action Process Approach (HAPA)** Available from: <http://userpage.fu-berlin.de/health/hapa.htm>. Accessed September 7, 2014.

# Perdagangan Bebas dan Kesenjangan Kelas Sosial di Indonesia (Fokus Kajian Kerja Sama AFTA, IJEPA dan CAFTA)

**Robby Darwis Nasution**

Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
darwisnasution69@gmail.com

## ABSTRAK

*Era-Globalisasi sedikit demi sedikit sudah mulai merubah wajah dunia saat ini mulai dari politik, ekonomi maupun budaya. Efek dari globalisasi sendiri telah membawa sistem perdagangan bebas di mana setiap Negara di dunia bebas memasarkan produknya ke negara mana pun di dunia. Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang di kawasan ASEAN juga dihadapkan dalam fenomena perdagangan bebas ini, sejak tahun 2014 pemerintah sudah mensosialisasikan AFTA (ASEAN Free Trade Area). Bukan hanya AFTA saja, Indonesia juga sudah menjalin kerja sama dengan China (CAFTA -China Asean Free Trade Agreement ) serta Jepang (IJEPA -Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement) dan Dalam jalinan kerja sama ini tentunya akan semakin banyak barang atau jasa yang akan masuk ke Indonesia serta para investor yang menginvestasikan modalnya ke negara ini. Era-perdagangan bebas ini tentunya akan menarik bagi para pemilik modal dan bukan bagi masyarakat kelas bawah. Hal ini akan memunculkan sistem kapitalisme yang berujung pada timbulnya jarak pemisah yang semakin besar antara si-kaya dan si-miskin. Ketimpangan atau kesenjangan yang ditimbulkan dari sistem perdagangan bebas ini akan memunculkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya akan berujung pada konflik kelas sosial di Indonesia.*

**Kata kunci:** Perdagangan Bebas, Konflik Sosial, Kesenjangan Kelas Sosial, Kemiskinan

## ABSTRACT

*Globalization era has begun to gradually change the face of the current world ranging from political, economic and cultural. The effects of globalization has brought free trade system in which every country in the free trade their products anywhere in the world. Indonesia as a developing country in the ASEAN region is also faced with the phenomenon of free trade, since 2014 the government has been disseminating the AFTA (ASEAN Free Trade Area). Not only AFTA, Indonesia has also formed a partnership with CAFTA (China Asean Free Trade Agreement) and IJEPA (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement) and in the fabric of this cooperation will certainly be more and more goods or services that will go to Indonesia as well as investors who invest for this country. These free-trade era will certainly appeal to the owners of capital and not for the lower classes. This will bring up the system of capitalism that led to the emergence of an increasingly large gap between rich and poor. Inequality or inequality arising from this free trade system will bring social jealousy that ultimately will lead to social conflict and social stratification.*

**Key words:** Free Trade, Social Conflict, Social Stratification, Poverty

## PENDAHULUAN

Asian Free trade Area (AFTA) akan mulai dilaksanakan di kawasan ASEAN pada tahun 2015, peserta dari AFTA sendiri merupakan sekumpulan Negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Indonesia harus bersiap-siap dalam menghadapi AFTA ini selain itu Indonesia juga harus menghadapi era-implementasi IJEPA (*Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*) yaitu mulai Juli 2008. Selain kedua kerja sama tersebut, Indonesia juga telah menjalin kerja sama dengan China (*CAFTA -China Asean Free Trade Agreement*) mulai 2010 di mana dalam perjanjian kerja sama dengan China tersebut akan menghilangkan bea masuk produk-produk baik dari China ke Indonesia ataupun sebaliknya.

Dalam penerapan IJEPA, seyogyanya Indonesia secara berkesinambungan mencermati gerak langkah diplomasi dan strategi ekonomi Jepang ke ASEAN, demikian

juga mencermati diplomasi ekonomi China ke ASEAN dalam rangka realisasi CAFTA (*China Asean Free Trade Agreement*) mulai 2010.<sup>1</sup> Jika dihadapkan dengan kenyataan AFTA, Indonesia pun sepertinya masih bisa mampu untuk berkompetisi dalam perdagangan bebas ini, tetapi IJEPA dan CAFTA sudah diterapkan jauh-jauh hari sebelum AFTA dimulai. Hal ini bisa dilihat dengan merebaknya barang China yang berupa barang elektronik, buah bahkan beras, serta ditambah Jepang dengan produk utama yaitu otomotif.

Dalam beberapa kesempatan kunjungan keluar negeri, Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin dari beberapa Negara seperti China, Rusia dan Negara-negara anggota APEC untuk bisa berinvestasi ke Indonesia. Presiden Joko Widodo juga menajjikan kemudahan pengurusan perijinan

<sup>1</sup> <http://www.antaranews.com/berita/186931/kerjasama-ekonomi-china-dan-jepang-dengan-asean> Diakses tanggal 17 Desember 2014 Pukul 09.38

jika para investor tersebut memang berniat berinvestasi ke Indonesia, hal ini tentu mendapat respons yang positif dari Negara-negara tersebut. Hal ini mengisyaratkan akan masuknya banyak investasi maupun produk-produk asing kedalam negeri, kelemahan daya saing untuk menghadapi kekuatan ekonomi dari Negara maju seperti Jepang, China maupun Korea Selatan tentu akan mengakibatkan kita digempur oleh produk-produk dan investasi asing tanpa bisa menggerakkan atau memunculkan produk-produk kita sendiri (produk dalam negeri). Bukan hanya itu saja, gempuran ini akan merubah pola kehidupan kita lebih konsumtif karena barang-barang dari luar negeri dengan pajak hampir 0% membuat harga jual di dalam negeri akan ikut rendah. Dengan kerendahan harga tersebut maka industri-industri lokal kita akan semakin sulit untuk mengejar ketertinggalan di era-pedagangan ini.

Pertanyaannya lalu bagaimana peran perdagangan bebas dalam memperbesar tingkat kesenjangan sosial di Indonesia? Untuk mencari jawaban atas kedua pertanyaan diatas maka dalam tulisan ini akan membahas beberapa bab yaitu, *pertama*, pengaruh kapitalisme terhadap kesenjangan kelas sosial, *kedua*, masuknya investasi asing ke Indonesia, dan yang *ketiga* adalah kesenjangan kelas sosial di Indonesia akibat dari munculnya perdagangan bebas.

#### LANDASAN TEORI

Kapitalisme dan kesenjangan kelas sosial merupakan istilah yang sering digunakan oleh para tokoh penganut Marxisme. Ide pemikiran dari Marxisme adalah perjuangan kelas sosial dalam perekonomian kapitalis yang didasarkan pada dua kelas sosial yang bertentangan yaitu kaum borjuis (pemilik alat-alat produksi) dan kelas proletar (kelas pekerja). Perbandingan kelas buruh dan borjuis dalam sistem ekonomi kapitalis adalah kelas buruh pasti memiliki jumlah yang lebih besar jika dibandingkan kaum borjuis, hal ini yang menjadi keuntungan kapitalis karena mendapat keuntungan besar dari eksploitasi tenaga kerja.<sup>2</sup>

Dominasi ekonomi oleh kaum borjuis melalui kendali alat produksi juga akan cenderung mendominasi bidang politik, hal ini akan membuat berapa kerangka kerja kaum Marxis yaitu *pertama*, Negara tidak otonom. Mereka digerakkan oleh kepentingan kelas yang berkuasa dan Negara kapitalis terutama digerakkan oleh kepentingan kaum borjuisnya. Hal ini akan merubah konteks perang antar Negara (perang konvensional) menjadi perang ekonomi yaitu dari kelas kapitalis dari Negara yang berbeda. Bagi kaum Marxis, konflik kelas lebih mendasar dibandingkan konflik antar Negara. *Kedua*, sebagai suatu sistem ekonomi, karena kapitalis bersifat ekspansif maka kecenderungan untuk selalu mencari pasar baru yang lebih menguntungkan. Hal

ini disebabkan karena kelas-kelas sosial tidak terbatas oleh kelompok dalam sebuah Negara tetapi sudah melampaui kelas sosial antar Negara dan memperluas untuk membentuk globalisasi ekonomi yang dipimpin oleh perusahaan transnasional raksasa.<sup>3</sup>

Di dalam Marxis sendiri membagi Negara dalam tiga kelas yaitu *core*, *semi periphery*, dan *periphery* atau bisa dikatakan Negara dunia pertama, Negara dunia kedua dan Negara dunia ketiga. Negara dunia pertama yaitu meliputi Negara Amerika, China, Korea Selatan, Jepang, Eropa Barat. Negara dunia ketiga yaitu Negara berkembang seperti Indonesia. Penentuan kelas-kelas ini didasarkan atas kemajuan sebuah Negara dalam bidang ekonomi dan tergabungnya dalam G20 untuk Negara maju dan BRICS serta *The Next Eleven* bagi Negara sedang berkembang. Dengan melihat hal ini maka ada tiga Negara *core* (Negara maju) yaitu Jepang, Korea Selatan dan China yang akan melebarkan sayapnya ke Negara yang memiliki buruh murah (negara berkembang), hal ini akan sangat tidak menguntungkan bagi Negara-negara sedang berkembang di wilayah ASEAN jika perjanjian kerja sama dijalankan sehingga rawan terjadinya konflik sosial baik antar Negara maupun antar kelas sosial dalam sebuah Negara kapitalis.

#### METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini akan menggunakan Penelitian perpustakaan (*library research*) sebagai teknik pengumpulan datanya. *Library research* ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya. Pada hakikatnya data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan. Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian yang membahas data-data sekunder.

#### PEMBAHASAN

##### Masuknya Investasi Asing ke Indonesia

Dalam beberapa kesempatan kunjungan keluar negeri, Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin dari beberapa Negara seperti China, Rusia dan Negara-negara anggota APEC untuk bisa berinvestasi ke Indonesia. Presiden Joko Widodo juga menjajikan kemudahan pengurusan perijinan jika para investor tersebut memang berniat berinvestasi ke Indonesia, tawaran ini tentunya mendapatkan respon yang positif dari Negara-negara tersebut.

Menurut survey PwC yang dilakukan terhadap 600 pimpinan perusahaan (CEO) dari seluruh perusahaan di

<sup>2</sup> Jackson, R., & Sorensen, G., 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Diterjemahkan dari Bahasa Inggris oleh D. Suryadipura. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 239.

<sup>3</sup> Ibid. Hal. 239-240

dunia, sebanyak 46% atau bisa dikatakan sebagian besar dari koresponden menganggap prediksi optimis akan pertumbuhan yang signifikan bisa disimak pada negara-negara di Asia Pasifik, dan hasilnya sebanyak 67% justru memiliki rencana untuk meningkatkan investasi di wilayah APEC selama satu tahun ke depan.<sup>4</sup> Rencana investasi tersebut konon bakal tersebar di masing-masing 21 negara anggota APEC, di mana Indonesia menjadi tujuan investasi yang paling populer nomor tiga di bawah Tiongkok dan Amerika Serikat. Rencana investasi ini juga didasarkan oleh Indonesia merupakan Negara dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia.

Sektor finansial hanya dimasuki 311.000 pemain yang artinya, sektor ini tidak berhubungan langsung dengan rakyat jelata. Ancaman nyata terhadap ekonomi nasional justru berasal dari dampak kerja sama FTA dengan China di mana sektor industri kehilangan 20% lapangan kerja serta kapasitas produksi nasional menurun 25%. Data Investor Daily menunjukkan bahwa empat bulan setelah FTA dengan China diberlakukan, impor mainan anak-anak dari China meningkat 952%. Kemudian impor tekstil meningkat menjadi 225% yang berarti meningkatnya pengangguran dari Indonesia.<sup>5</sup>

Selain transformasi fiskal dan politik yang luar biasa selama dekade terakhir, Indonesia juga mengalami pergeseran struktural utama dalam hal demografi. Ini memberikan partisipasi pasar tenaga kerja yang dinamis, tumbuh 2,3 juta per tahun. Sebuah populasi urbanisasi pesat juga menyediakan untuk kolam strategis angkatan kerja di pusat-pusat investasi. Keuntungan demografis dari 251 juta orang antara lain:<sup>6</sup>

- a. Lebih dari 50% penduduk berusia di bawah 29 tahun
- b. 60% dari populasi di bawah usia 39
- c. Sekitar 52% dari penduduk yang tinggal di daerah perkotaan
- d. penduduk Indonesia mencakup lebih dari 39% dari total penduduk 10 negara Asia Tenggara.

Pada periode 2020–2030, indeks ketergantungan akan mencapai titik terendah yaitu dalam artian bahwa negara Indonesia sudah bisa menjadi negara produsen. Selain itu, lebih dari 60% dari populasi penduduk Indonesia adalah dalam usia kerja, menyediakan tenaga kerja yang dinamis yang merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan ini.<sup>7</sup> Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi investor untuk lebih memilih Indonesia sebagai tujuan investasi mereka di mana penduduk dengan usia produktif mengalami masa puncaknya.

Di kawasan ASEAN, Indonesia muncul sebagai pemain kunci dalam isu-isu kebijakan internasional lintas sektoral

perubahan iklim dan arsitektur keuangan global, yang akan memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap keputusan bisnis dan investasi. Sejumlah investor asing telah menyiapkan investasi baru maupun tambahan di Indonesia. Dalam beberapa tahun ke depan, setidaknya ada sekitar US\$ 75 miliar investasi langsung asing (FDI) yang siap masuk ke Indonesia. Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Chatib Basri menjelaskan, rencana modal asing sebesar US\$ 75 miliar itu menunjukkan bahwa investasi akan menjadi pendorong perekonomian Indonesia ke depan. Rencana investasi US\$ 75 miliar tersebut merupakan bagian dari rencana investasi yang dijanjikan sejumlah investor kepada pemerintah Indonesia, seperti Foxconn Technology Group, pemasok Apple Inc, yang akan berinvestasi sekitar US\$ 5–10 miliar. Pada kuartal III-2012, BKPM mencatat realisasi investasi asing langsung ke Indonesia mencapai US\$ 5,9 miliar (Rp 56,6 triliun, tumbuh 32,6% dibanding periode sama 2011 yang tercatat Rp 46,4 triliun. Kuatnya investasi ini ikut membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga di atas 6% di tengah penurunan kinerja ekspor.<sup>8</sup>

Ada banyak peluang investasi di Indonesia, termasuk infrastruktur, perekonomian ramah lingkungan, jasa dan manufaktur. Indonesia telah memperkirakan jumlah kebutuhan infrastrukturnya adalah sebesar US\$ 21 miliar dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Selain itu, berbagai peluang juga ada di sektor ramah lingkungan terkait dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kacanya sebesar 26% pada tahun 2020 dengan sumber dayanya sendiri dan sebesar 41% dengan bantuan dari dunia internasional.<sup>9</sup>

Dengan melihat data-data di atas maka bisa dilihat bahwa ketertarikan para pemilik modal (investor) untuk menanamkan investasinya di Indonesia sangat besar sekali. Pada tahun 2015 bukan tidak mungkin para investor di kawasan ASEAN akan menyerbu Indonesia demi mendapatkan pundi-pundi keuntungan. Dengan masuknya para pemilik modal dari luar negeri dengan modal besar tentunya akan menjadi ancaman bagi para pengusaha (UMKM) yang hanya mempunyai modal kecil dari Indonesia, dan hal ini akan berpengaruh terhadap daya saing produk kita di dalam era perdagangan bebas ini.

### Ancaman Kapitalisme terhadap Negara Dunia Ketiga

Dalam ranah ekonomi, kapitalisme memisahkan intervensi negara dengan perekonomian seperti halnya ada sekuler yang memisahkan agama dengan negaranya. Dalam perjalanannya, kapitalisme telah memberikan efek buruk bagi perekonomian dan kesenjangan sosial yang semakin menganga, terjadinya gap (jurang pemisah) antara

<sup>4</sup> <http://dailysocial.net/post/investasi-industri-teknologi-indonesia> Diakses tanggal 17 Desember 2014 Pukul 10.05

<sup>5</sup> <http://www.berdikarionline.com/lipsus/20111015/krisis-kapitalisme-dan-dampaknya-di-indonesia.html#ixzz3IOMRjzv9> Diakses tanggal 11 September 2015 Pukul 09.09

<sup>6</sup> <http://www.bkpm.go.id/contents/general/8/demographics#.VJD1uMIwHIV> Diakses tanggal 17 Desember 2014 Pukul 10.10

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> [http://kemenperin.go.id/artikel/4931/Enam-Investor-Asing-Perkuat-Bisnis-Investasi-US\\$-75-Miliar-Siap-Masuk-Indonesia](http://kemenperin.go.id/artikel/4931/Enam-Investor-Asing-Perkuat-Bisnis-Investasi-US$-75-Miliar-Siap-Masuk-Indonesia) Diakses tanggal 17 Desember 2014 Pukul 10.06

<sup>9</sup> Ibid

si kaya dan si miskin. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, dan menurut Karl Marx negara demokrasi adalah negara kapitalis karena negara dikontrol oleh logika ekonomi kapitalis yang percaya bahwa kebanyakan keputusan politik harus menguntungkan kepentingan kapitalis. Dalam hal ini yang diuntungkan adalah para pemilik modal (kapitalis), sedangkan masyarakat kecil tetap berada dalam bingkai kemiskinan akibat kapitalisme.

Dalam konteks Indonesia, sudah banyak perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia seperti Freeport yang mengeksploitasi hasil bumi di Papua dan Exxon Mobil di Aceh, tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat di sekitarnya. Bahkan pemerintah cenderung berpihak pada investor ketika terjadi sengketa antara pihak perusahaan dan masyarakat sekitar. Keberpihakan kepolisian pada perusahaan asing di Indonesia seperti dalam tragedi Mesuji maupun Bima merupakan bukti nyata bahwa republik ini penganut kapitalis. Karena salah satu ciri negara kapitalis adalah berpindahnya peran pemerintah yang semula melayani rakyat berubah menjadi pelayan investor atau pemilik modal. Menurut AM Saefuddin, kapitalisme merupakan suatu istilah luas yang meliputi, cara produksi kapitalis, kerangka sosio-ekonomi kapitalis, mentalitas kapitalis di mana kesemuanya ini hanyalah merupakan tiga segi dari gejala yang sama.<sup>10</sup>

Kontrol perusahaan transnasional (MNC) atas teknologi dan keuangan memungkinkan negara-negara maju untuk mendominasi industri manufaktur selain itu maka mereka dengan angkuh akan menggunakan blok-blok perdagangan dan kekuatan militer untuk memaksakan kehendak. Ekonomi Dunia Ketiga seperti Indonesia menyediakan buruh dan bahan mentah murah, dan mengonsumsi apa yang dijual oleh perusahaan-perusahaan multinasional tersebut. Untuk tetap kompetitif, perusahaan-perusahaan itu semakin membayar murah untuk Dunia Ketiga dan menuntut harga tinggi untuk bahan-bahan jadi yang mereka produksi sehingga wajar jika pendapatan perkapita penduduk sangat rendah. Ketika para kapitalis tidak bisa menjual produk-produk mereka dengan harga yang menghasilkan keuntungan banyak, maka mereka akan memotong produksi maka mereka hanya membutuhkan sedikit buruh. Selain itu, teknologi baru juga akan semakin meminimalisir jumlah kebutuhan tenaga kerja pada sektor produksi, sehingga semakin majunya alat produksi maka semakin besar jumlah pengangguran yang akan terjadi pada sebuah Negara.<sup>11</sup>

### Kesenjangan Kelas Sosial di Indonesia

Dengan dimulainya *AFTA*, *IJEPA* dan *CAFTA*, maka Negara dunia pertama dan Negara dunia kedua akan berlomba-lomba untuk masuk ke dalam Negara dengan sumber daya alam yang melimpah dan memiliki gaji buruh

rendah seperti Indonesia. Dalam perdagangan internasional yang termuat dalam perjanjian GATT, Negara dunia ketiga memiliki posisi yang sangat tidak menguntungkan karena tidak bisa leluasa untuk memasarkan produknya ke Negara dunia pertama dan Negara dunia ketiga. Hal ini yang pada akhirnya membuat penduduk di Negara dunia ketiga lebih cenderung menjadi konsumtif daripada produktif.

Selain itu, daya saing dari produk-produk dari Negara dunia ketiga sangat rendah sekali, ini berkaitan dengan perkembangan SDM dan teknologi di Negara dunia ketiga cenderung lambat jika dibandingkan dengan Negara dunia pertama dan kedua. Sesungguhnya di Indonesia juga terdapat industri-industri besar yang memiliki modal besar dan mendunia seperti Polygon dan Maspion, tetapi jumlah perusahaan yang besar dapat dihitung dengan jari sehingga hanya segelintir pemilik modal dari Indonesia saja yang bisa bertarung dalam era perdagangan bebas ini. Keterbatasan SDM, teknologi serta modal para UMKM Indonesia merupakan hambatan utama untuk bisa bersaing dalam perdagangan bebas ini. Hal ini akan semakin memperluas *gap* (jarak) antara pemilik modal besar (kelas atas) dan UMKM (kelas bawah) di Indonesia. Para pemilik modal akan mampu bersaing dengan produsen-produsen Negara lain, sedangkan UMKM akan semakin terpuruk di bawah sempurna produk asing.

Ketimpangan yang terjadi di Indonesia seperti apa yang telah diramalkan Karl Marx yaitu, dimana kapitalisme atau pemilik modal dari Negara dunia pertama menguasai pasar maka ketimpangan di Negara dunia ketiga akan semakin melebar. Hal ini akan mengakibatkan konflik kelas sosial antara kelas atas dan kelas bawah yang bersumber dari kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial ini terjadi karena sistem kapitalisme telah membuat *si-kaya* akan semakin kaya dan *si-miskin* akan semakin miskin.

Untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi di Indonesia, pemerintah telah melakukan reinvestasi dana kelompok atas (orang kaya) yang jumlahnya mencapai 20 persen. Jalan ini dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan pendapatan bagi masyarakat kelas bawah dan menengah dan mengurangi tingkat kesenjangan yang ada karena di Indonesia persentase ketimpangan mencapai 0,5 persen. Untuk kenaikan masyarakat kelas menengah menuju kelas atas tiap tahunnya mencapai 5 sampai 6 juta orang, hal ini juga didukung iklim investasi yang semakin meningkat di Indonesia.<sup>12</sup>

Bank Dunia membagi kemiskinan kepada dua kelompok kategori yaitu: Kemiskinan Absolut dan Kemiskinan Relatif. *Absolute Poverty* adalah kemiskinan yang standardnya konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat. Kemiskinan absolut adalah warga Negara yang hidup dengan

<sup>10</sup> <http://demokrasiindonesia.com/2011/01/21/kapitalisme-paham-ekonomi-dalam-dunia-demokrasi-modern/> Diakses tanggal 11 September 2015 Pukul 09.06

<sup>11</sup> <http://demokrasiindonesia.com/2011/01/21/kapitalisme-paham-ekonomi-dalam-dunia-demokrasi-modern/> Diakses tanggal 11 September 2015 Pukul 09.06

<sup>12</sup> <http://economy.okezone.com/read/2014/02/19/20/943566/perbedaan-kaya-dan-miskin-di-indonesia-melalui-penerapan-pajak> Diakses Tanggal 15 Desember 2014 Pukul 13.30

<sup>13</sup> <http://sosbud.kompasiana.com/2011/05/26/orang-miskin-di-indonesia-367572.html> Diakses Tanggal 15 Desember 2014 Pukul 13.32

pendapatan di bawah 1 USD (Rp.8,500) per hari. Kalau kemiskinan menengah adalah yang pendapatannya di bawah 2 USD (Rp. 17,000) per harinya.<sup>13</sup> Menurut data BPS jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 31,02 juta. Dengan pemetaan bahwa jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sebanyak 0,81 juta orang dibanding tahun 2009 yang berjumlah 11,91 juta dan di daerah pedesaan berkurang 0.69 juta orang dari jumlah 20,62 juta.<sup>14</sup>

Yang menjadi persoalan bukan hanya kemiskinan itu sendiri, tapi juga kesenjangan yang sangat terlihat dan sungguh menyakitkan hati antara yang kaya dan yang miskin (*gap*-nya terlalu besar). Ada jutaan rakyat yang untuk memperoleh 100 ribu per bulan saja begitu sulitnya, ada jutaan lainnya yang pengeluaran per bulan tidak lebih dari Rp211.726 (batas garis kemiskinan), sementara itu ada beberapa gelintir orang kredit macetnya saja puluhan triliun. Belum lagi yang melarikan uang negara (baca: uang rakyat) ke luar negeri. Korupsi uang negara dan masih banyak tindakan tidak terpuji lainnya.<sup>15</sup>

Angka pertambahan orang miskin di Indonesia dalam 3 tahun terakhir melonjak tajam, berdasarkan data terakhir Asian Development Bank (ADB), orang miskin di Indonesia bertambah 2,7 juta orang. Dari tahun 2008 angka kemiskinan di Indonesia mencapai 40,4 juta dan di 2010 mencapai 43,1 juta. Standar ADB mengukur angka kemiskinan adalah pendapatan per hari di bawah Rp 7.800 yaitu selisih 10 persen dari standar kemiskinan yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp 7.060 per hari. Angka ini adalah yang paling tinggi di antara negara-negara Asia Tenggara.<sup>16</sup>

Di bawah kepemimpinan Presiden SBY, Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,1% per tahunnya. Sementara presiden baru kita, Joko Widodo, menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%.<sup>17</sup> Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar itu ternyata Indonesia masih juga dikelompokkan menjadi Negara dengan jumlah ketimpangan yang besar, untuk mengukur hal tersebut maka bisa digunakan perhitungan Koefisien Gini yang didasarkan pada kurva Lorenz. Koefisien Gini yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai  $A/(A+B)$ , di mana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika A = 0 koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna,

sedangkan jika B = 0 koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna.<sup>18</sup>

Ketimpangan pendapatan di Indonesia juga meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi sehingga pada tahun 1999 misalnya, koefisien Gini Indonesia tercatat berada di angka 0,31. Di tahun 2009, Angka ini naik sebesar 0,06 ke 0,37 dan satu tahun setelahnya koefisien Gini Indonesia menunjukkan angka 0,38. Tahun 2011 kembali menunjukkan peningkatan koefisien Gini ke angka 0,41. Padahal, PBB menetapkan angka 0,4 sebagai “batas aman” koefisien Gini. Jika suatu negara melebihi angka tersebut, kondisi ekonominya bisa berakibat buruk bagi stabilitas sosial-politiknya.<sup>19</sup>

Pada Tahun 2011, Orang kaya menikmati hampir 50% dari pendapatan nasional. Ketika pendapatan nasional suatu negara meningkat, ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan masyarakatnya. *Pertama*, daya beli mereka akan meningkat. Contoh: orang yang tadinya hanya bisa membeli motor, sekarang sudah bisa menyicil mobil. *Kedua*, anggaran belanja negara tersebut pun meningkat. Pemerintah akan lebih giat membangun jalan raya, pembangkit listrik, dan infrastruktur lainnya. Gaji PNS pun jadi bisa dinaikkan. Pada tahun 1999, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa 20% orang dengan pendapatan tertinggi di Indonesia menikmati 40,57% dari keseluruhan pendapatan nasional. Di tahun 2011, angka ini mencapai 48,42% atau hampir setengah dari total pendapatan nasional negeri kita. Sebaliknya, 40% penduduk Indonesia dengan penghasilan terendah justru bernasib semakin buruk. Pada tahun 1999, mereka masih bisa “menikmati” 21,66% dari total pendapatan nasional. Di tahun 2011, mereka hanya bisa merasakan 16,85% dari keseluruhan pendapatan nasional di tahun tersebut.<sup>20</sup>

Jika perdagangan bebas ini sudah mulai berjalan di Indonesia, maka ketimpangan akan semakin besar karena kaum kelas bawah (UMKM) tidak bisa ikut bersaing dengan kaum kelas atas (pemilik modal). Selama pemerintah tetap mempersilahkan investor asing dengan FDI (*foreign direct investment*) yang tinggi untuk masuk ke Indonesia dan bukan melindungi produsen-produsen lokal yang dalam hal ini adalah UMKM, maka keterpurukan ekonomi akan terjadi akibat hancurnya ekonomi kelas bawah. Yang terjadi selanjutnya tentu adalah yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin, hal ini akan mengakibatkan timbulnya konflik-konflik sosial yang bisa berupa pemberontakan kaum kelas bawah terhadap kaum kelas atas.

## KESIMPULAN

Di dalam era perdagangan bebas, tidak ada satu negara pun yang bisa menolak masuknya investasi asing ke dalam

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> <http://forum.kompas.com/nasional/45278-pertambahan-orang-miskin-di-indonesia-tertinggi-di-asia-tenggara.html> Diakses Tanggal 15 Desember 2014 Pukul 13.40

<sup>17</sup> <http://www.hipwee.com/sukses/orang-kaya-makin-kaya-orang-miskin-malah-tambah-melarat-kenapa/> Diakses Tanggal 15 Desember 2014 Pukul 13.41

<sup>18</sup> <http://puncakkab.bps.go.id/ensiklopedia/72-koefisien-gini> Diakses Tanggal 15 Desember 2014 Pukul 17.35

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Ibid

negaranya. Kerja sama antar Negara baik perdagangan internasional maupun kerja sama bilateral merupakan kewajiban Negara dalam era sekarang ini. Dalam kerja sama perdagangan, Indonesia telah melakukan kerja sama baik dengan Negara-negara di kawasan Asia Tenggara maupun dengan Jepang dan China. Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan tenaga kerja murah, hal ini yang menjadikan Indonesia menarik bagi investor asing. Sebagai suatu sistem ekonomi, karena kapitalis bersifat ekspansif maka kecenderungan untuk selalu mencari pasar baru yang lebih menguntungkan. Hal ini disebabkan karena kelas-kelas sosial tidak terbatas oleh kelompok dalam sebuah Negara tetapi sudah melampaui kelas sosial antar Negara dan memperluas untuk membentuk globalisasi ekonomi yang dipimpin oleh perusahaan transnasional raksasa (*MNC-Multi National Corporation*).

Dengan masuknya investor asing ke Indonesia maka UMKM keberadaannya akan semakin terancam, hanya pemilik modal besar (kaum kelas atas) saja yang mampu bersaing dengan investor asing tersebut. Dengan hanya kaum kelas atas dari Indonesia saja yang mampu berkompetisi dalam era perdagangan bebas ini maka *gap* antara kelas atas dan kelas bawah akan semakin jauh. Para pemilik modal akan semakin kaya, dan UMKM (kaum kelas bawah) akan semakin miskin, selama pemerintah tetap mempersilahkan investor asing dengan FDI (*foreign direct investment*) yang tinggi untuk masuk ke Indonesia dan bukan melindungi produsen-produsen lokal yang dalam hal ini adalah UMKM,

maka keterpurukan ekonomi akan terjadi serta mengakibatkan hancurnya ekonomi kelas bawah. Ketimpangan ini akan memicu timbulnya konflik-konflik sosial yang bisa berupa pemberontakan kaum kelas bawah terhadap kaum kelas atas seperti demo-demo buruh yang menuntut kenaikan UMR demi kesetaraan hidup ataupun konflik-konflik kelas sosial yang lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- <http://www.antaranews.com/berita/186931/kerjasama-ekonomi-china-dan-jepang-dengan-asean> Diakses tanggal 17 Desember 2014 Pukul 09.38
- Jackson R & Sorensen G. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Diterjemahkan dari Bahasa Inggris oleh D. Suryadipura. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- <http://dailysocial.net/post/investasi-industri-teknologi-indonesia> Diakses tanggal 17 Desember 2014 Pukul 10.05
- <http://www.berdikarionline.com/lipsus/20111015/krisis-kapitalisme-dan-dampaknya-di-indonesia.html#ixzz3IOMRjZv9> Diakses tanggal 11 September 2015 Pukul 09.09
- <http://www.bkpm.go.id/contents/general/8/demographics#.VJD1uMlwHIV> Diakses tanggal 17 Desember 2014 Pukul 10.10
- [http://kemenperin.go.id/artikel/4931/Enam-Investor-Asing-Perkuat-Bisnis-Investasi-US\\$-75-Miliar-Siap-Masuk-Indonesia](http://kemenperin.go.id/artikel/4931/Enam-Investor-Asing-Perkuat-Bisnis-Investasi-US$-75-Miliar-Siap-Masuk-Indonesia) Diakses tanggal 17 Desember 2014 Pukul 10.06
- <http://demokrasiindonesia.com/2011/01/21/kapitalisme-paham-ekonomi-dalam-dunia-demokrasi-modern/> Diakses tanggal 11 September 2015 Pukul 09.06
- <http://economy.okezone.com/read/2014/02/19/20/943566/perbedaan-kaya-dan-miskin-di-indonesia-melalui-penerapan-pajak> Diakses Tanggal 15 Desember 2014 Pukul 13.30

## Model CSR Pariwisata di Surabaya

Agoes Tinus Lis Indrianto,<sup>1</sup> M.Tourism<sup>2</sup> dan I Dewa Gde Satrya, M.M<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Merupakan salah satu publikasi Hibah Bersaing Ditjen Dikti (2015)

<sup>2&3</sup> Dosen Bisnis Hospitaliti di Universitas Ciputra

### ABSTRAK

*Corporate social responsibility (CSR) dalam bidang pariwisata perlu dikenalkan dan digalakkan di berbagai daerah di Indonesia. Artikel ini mendeskripsikan model CSR bidang pariwisata di Surabaya, yang dalam penyusunannya juga terinspirasi dari pelaksanaan CSR di daerah-daerah lain. Dengan demikian, model CSR pariwisata di sini dimaksudkan untuk dapat diterapkan tidak hanya dalam konteks pariwisata Surabaya, tetapi diharapkan juga relevan di daerah lain. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan model CSR pariwisata di Surabaya. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, data sekunder diperoleh melalui desk review dokumen dan literatur yang terkait. Narasumber penelitian ini adalah stakeholder pariwisata Surabaya, dalam hal ini adalah Pemerintah, pelaku usaha dan unsur masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama, pelaksanaan CSR pariwisata di Surabaya belum banyak dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata, khususnya pemilik atau pengelola atraksi wisata. Sebagian besar atraksi wisata di Surabaya menjadi obyek CSR. Kedua, kegiatan CSR sebagai social response sebagai ungkapan terima kasih kepada pemerintah dan masyarakat. Ketiga, dampak pelaksanaan CSR di bidang pariwisata adalah menumbuhkan atraksi wisata baru yang berkualitas dan menumbuhkan pergerakan wisata di Surabaya.*

**Kata kunci:** CSR, pariwisata

### PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab V tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pasal 74 ayat (1) menyatakan, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Dan ayat (3) menyatakan, Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 butir (b) menyatakan, setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Melalui perundangan ini, maka CSR memiliki keterkaitan hukum. Meski demikian, melalui pemberitaan surat kabar kita mengetahui bahwa kesadaran dan implementasi akan pentingnya CSR belum banyak dilakukan oleh perusahaan. Di samping itu, tumbuhnya *awareness* CSR baru sebatas pada sektor-sektor tertentu, seperti pendidikan dan lingkungan hidup. Sementara, implementasi CSR sektor pariwisata minim.

Dalam artikel di harian *Republika* (28 April 2007), lima komponen CSR: (1) proteksi terhadap lingkungan, (2) hubungan manusiawi dengan pekerja, (3) komitmen pada HAM, (4) proses produksi yang bersih (sesuai etika bisnis),

dan (5) *community development* (aksi filantropis, sebagai aksi CSR paling sederhana). Dalam artikel lainnya yang berjudul "ISO 26000, supaya Perusahaan Lebih Peduli", menurut Timotheus Lesmana dari Badan Standardisasi Nasional, parameter yang akan digunakan dalam ISO 26000 terdiri dari tujuh hal, yaitu (1) lingkungan, (2) HAM, (3) tenaga kerja, (4) tata kelola, (5) isu-isu konsumen, (6) pelibatan masyarakat, dan (7) pelaksanaan bisnis secara adil (Mugnisjah, 2007).

Topik CSR sektor pariwisata sebagaimana dilakukan oleh perusahaan yang seluruhnya atau sebagian di antaranya dijadikan obyek penelitian ini – yaitu Telkom, Pertamina, Radio Suara Surabaya, Taxi Blue Bird, Air Minum Dalam Kemasan / AMDK merek "Cheers", Akzonobel, Pembangkit Jawa Bali, Phillips – erat kaitannya dengan salah satu komponen sebagaimana dituliskan di atas, yakni lingkungan. Melalui praktek CSR masing-masing perusahaan tersebut, perusahaan memberikan respons, dukungan dan kontribusi positif terhadap pembangunan pariwisata di kota Surabaya.

PT Telkom dan Pertamina membiayai revitalisasi Taman Kota. Telkom merupakan penyandang dana revitalisasi Taman Bungkul dan Pertamina membiayai revitalisasi Taman Bundaran Dolog di Jalan Ahmad Yani. Taxi Blue Bird berkontribusi terhadap penempelan logo *city branding* pariwisata Surabaya "Sparkling Surabaya" di kaca belakang ribuan armada taksinya. Demikian pula perusahaan AMDK dengan merek "Cheers", membubuhkan logo Sparkling Surabaya dalam setiap kemasan produk yang diluncurkan di pasaran. Sementara itu, Radio Suara Surabaya menerbitkan ribuan *free magazine* "Surabaya City Guide" yang terbit setiap bulan mengulas berbagai potensi, even dan atraksi wisata Surabaya secara menarik.

Peran serta dunia usaha dan dunia industri (selanjutnya disebut DUDI) dalam pembangunan pariwisata sebagaimana wujudnya masing-masing yang dijelaskan di atas, merupakan percepatan pemenuhan syarat *city branding* yang ideal. Secara internal, *city branding* haruslah menginspirasi (*internally inspiring*) semakin banyak kalangan perkotaan untuk memahami makna filosofis dari *city branding* tersebut untuk melakukan sesuatu yang positif dan kontributif sesuai dengan kapasitas dan latar belakang masing-masing. Dan secara eksternal, *city branding* tersebut haruslah menjadi pembeda yang khas, kompetitif dan unggul (*externally different*) dengan daerah lainnya (Satrya, 2008).

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model CSR untuk pariwisata perkotaan di Surabaya?
2. Apa dampak aksi CSR bagi pariwisata perkotaan di Surabaya?

#### KAJIAN PUSTAKA

##### Corporate Social Responsibility

Ide CSR awalnya adalah bagaimana perusahaan memberi perhatian kepada lingkungannya, terhadap dampak yang terjadi akibat kegiatan operasional perusahaan. Pada mulanya tidak banyak perusahaan, apalagi di Indonesia, yang memperhatikan hal tersebut. Umumnya perusahaan masih berfokus pada aspek finansial/ekonomis untuk menunjukkan keberhasilannya. Namun perusahaan di seluruh dunia kini sudah memperhitungkan aspek dampak lingkungan dan sosial dalam menjalankan operasi bisnis mereka untuk mempertahankan diri terhadap tekanan sosial melalui pengembangan program CSR.

Pengertian CSR adalah *open and transparent business practices that are based upon ethical values and respect for employees, communities and the environment (and) designed to deliver sustainable value to society at large, as well as to shareholders* (CSRwire, 2005).

Tanggung jawab sosial adalah penerimaan manajemen terhadap kewajiban untuk mempertimbangkan laba, kepuasan pelanggan, dan kesejahteraan sosial sebagai nilai yang sepadan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan (Boone & Kurtz, 2002).

Salah satu cara agar perusahaan dapat memperoleh simpati di bidang CSR adalah dengan melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh perusahaan atau pihak lain. Perusahaan tidak selayaknya hanya sekedar menyumbang dana atau menulis selembar cek, tetapi harus lebih dari itu, memberikan nilai lebih yang diakui oleh masyarakat luas.

Keterlibatan 5 perusahaan secara langsung dalam pembangunan pariwisata Surabaya, yaitu Telkom dan Pertamina dalam merevitalisasi Taman Kota (Taman Bungkul dan Taman Bundaran Dolog), Radio Suara Surabaya (*Free Magazine* "Surabaya City Guide"), Air Minum Dalam Kemasan "Cheers" dan Taksi Blue Bird dengan sukarela menempelkan logo "Sparkling Surabaya" pada kemasan

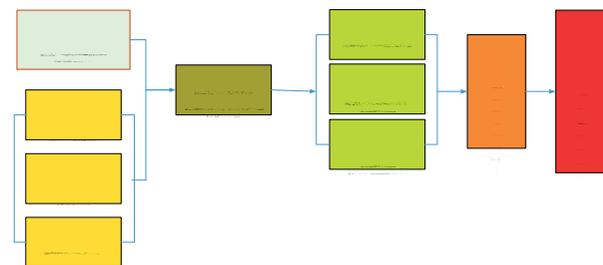
produk minuman dan kaca belakang armada taksi yang beroperasi di wilayah Surabaya dan sekitarnya, memberikan inspirasi adanya CSR sektor pariwisata yang tidak hanya berwujud bantuan materi, tetapi juga dukungan perusahaan untuk mensosialisasikan dan mempopulerkan pariwisata Surabaya kepada masyarakat luas.

Gambar di atas menunjukkan, konsep *bottom line* dari CSR mencakup aspek finansial, sosial dan lingkungan. CSR ditujukan pada *stakeholder*, fungsi perusahaan, fungsi manajemen dan terintegrasi di semua aspek. Keberhasilannya ditunjukkan dalam *corporate social performance* yang dapat membentuk citra / reputasi perusahaan. Citra positif akan menjadi aset yang berharga dan sulit ditiru yang menjadi kunci kelestarian perusahaan.

Kalau dicari akar teoritisnya, konsep CSR mendapatkan pijakan yang relatif kuat karena dua pertimbangan berikut ini. Pertama, dalam realitasnya agen pemerintah tidak selamanya bisa menjalankan kesejahteraan masyarakat secara memuaskan. Kedua, pasar terkadang gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien. Hal itu terjadi apabila salah satu tindakan agen pasar ternyata menimbulkan dampak bagi kesejahteraan atau kondisi pihak lainnya. Maka, moral utama dalam pelaksanaan CSR haruslah dilakukan secara profesional. Apabila tidak dilakukan secara profesional dan hati-hati, *non-targeted, non-affirmative development*, niscaya dana CSR itu akan dimanfaatkan oleh kaum pendatang yang lebih pintar menangkap *opportunity* (Djalil, 2003).

CSR adalah konsep yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan dan lingkungan. Pengertian lingkungan bisa sangat luas mulai dari pemerintah hingga masyarakat sekitar operasi perusahaan yang bersangkutan. Bentuk tanggung jawabnya bermacam-macam, seperti pemberdayaan ekonomi, hukum, berperilaku etis terhadap masyarakat sekitar hingga pada bentuk kegiatan-kegiatan filantropis (Susanto, 2003).

Dalam pelaksanaannya, CSR dikelompokkan menjadi 3 bagian. Pertama, CSR sebagai bentuk *social obligation*. Karena CSR dipandang sebagai suatu kewajiban, maka pelaksanaannya umumnya hanya mengikuti persyaratan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, korporasi menjalankan CSR sebagai bentuk *social reaction*. CSR tidak hanya dipandang sebagai kewajiban, namun sudah mulai



**Gambar 1.** Corporate Sustainability through Corporate Social Responsibility

Sumber: Budiarsi (2005: 122)

tumbuh kesadaran arti penting CSR. Ketiga, korporasi yang sudah mampu melakukan *social response*. Korporasi dan masyarakat mampu secara bersama-sama mencari peluang-peluang untuk memberikan kontribusi demi kepentingan masyarakat (*ibid*).

#### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah riset kualitatif deskriptif. Sesuai dengan tema yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin diraih dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi perusahaan terhadap CSR di bidang pariwisata perkotaan, pelaksanaan CSR di bidang pariwisata perkotaan, dan dampak pelaksanaan CSR di bidang pariwisata perkotaan.

Penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif merupakan metode yang memfokuskan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari satuan-satuan yang berkaitan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.

Sumber data dalam penelitian ini diambil dengan prosedur *purposive sampling*, di mana melalui *sampling* yang terpenting adalah bagaimana menentukan narasumber kunci atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. Narasumber kunci adalah pihak yang memiliki posisi sosial dalam pengaturan riset karena memiliki pengetahuan spesialis mengenai orang lain, proses, atau kejadian yang lebih ekstensif, detail atau lebih utama dari orang biasa, dan merupakan sumber informasi berharga bagi seorang peneliti, paling tidak pada tahap awal suatu proyek (Myers, 2009: 144).

Analisis data adalah proses yang mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan uraian dasar. Analisis data sebagai suatu proses yang merinci usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide sebagai yang disarankan oleh data, dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide tersebut (Aries, 2010: 56). Analisis data yang terkumpul dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif yang merupakan pendekatan spesifik terhadap analisis data kualitatif.

#### PEMBAHASAN

##### Pariwisata Surabaya

Surabaya semakin agresif membangun sektor pariwisatanya, hal ini terkait dengan perubahan visi-misi kota yang ditetapkan sejak 2005. Menyadari tentang arah perkembangan kota, pemerintah telah mengambil keputusan untuk mengubah kota Surabaya dari kota industri menjadi kota dagang dan jasa.

Terkait hal tersebut, pada tahun 2005 Surabaya memiliki *tagline* pemasaran “Sparkling Surabaya”. *Tagline* itu tidak saja menjadi sebuah *branding* baru Surabaya, tetapi juga

mencerminkan strategi pengembangan pariwisata. *Sparkling* berarti gemerlap dan bersinar, diharapkan seluruh sudut kota menjadi daya tarik pariwisata (Anshori & Satrya, 2008).

Logo “Sparkling Surabaya” ditulis dengan warna biru dan hijau menunjukkan bahwa Surabaya terletak di pinggir laut dan mengesankan bahwa Surabaya tidak panas sesuai dengan program pemerintah kota untuk mewujudkan Surabaya *Green and Clean*. Warna hijau juga berarti banyak lapangan golf di Surabaya.

Lima bintang yang ada di atas tulisan “Sparkling Surabaya” memiliki arti masing-masing, di mana bintang berwarna emas melambangkan kawasan Surabaya Selatan. Sebagai salah satu pintu masuk yang paling padat dan daerah industri di Surabaya, atraksi wisata yang ditawarkan di Surabaya Selatan di antaranya Kebun Binatang. Bintang berwarna biru menyimbolkan kawasan Surabaya Utara yang berdekatan dengan laut. Kawasan ini kental dengan nuansa kebudayaan, di antaranya bangunan-bangunan lama, House of Sampoerna, Pecinan, Kya-Kya, Klenteng, Kampung Arab, dan Masjid. Bintang berwarna kuning menunjukkan kawasan Surabaya Timur di mana matahari mulai menampakkan diri setiap hari. Di sana berada Pantai Kenjeran, Taman Hiburan Rakyat, Nuansa Budha (patung Budha empat wajah, patung Dewi Kwan Im). Bintang berwarna orange merepresentasikan matahari terbenam yang menandakan kawasan Surabaya Barat. Kawasan ini merupakan tempat tinggal yang nyaman, perumahan mewah, lapangan golf, pusat perbelanjaan, *water park*. Pusat kota dan *central business district* dilambangkan dengan bintang berwarna merah yang berarti jantung kota Surabaya. Ikon kota Surabaya lainnya yang paling menonjol pada kawasan ini adalah Sungai Kalimas dan Balai Pemuda.

Melalui peta kawasan wisata yang dibagi ke dalam lima kawasan (dilambangkan dengan lima bintang), menunjukkan makna “Sparkling Surabaya” sebagai kota yang nyaman untuk tinggal, baik pengunjung lokal maupun internasional, kota yang penuh dengan jadwal kegiatan, baik skala lokal, regional maupun internasional. Berbagai atraksi wisata dapat ditemui di setiap wilayah. Setiap orang dapat melakukan sesuatu mulai dari pagi hari hingga pagi berikutnya. Sparkling Surabaya menjadi slogan pemasaran untuk meningkatkan pariwisata kota Surabaya.

Pariwisata selalu menjadi bagian penting dari kota dagang dan jasa, di mana produk wisata Surabaya memiliki kekhasan *city tourism* dengan variasi produk antara lain, MICE (*meeting, incentive, conference, exhibition*), wisata belanja, golf, *culinary, heritage*, dan wisata sejarah. Secara geografis Surabaya berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Letak Surabaya yang berdekatan dengan kawasan timur Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sekitar 80 juta orang, memungkinkan untuk menjadi *hub* bagi kawasan tersebut.

Penggalan data penerapan CSR di Surabaya diawali dengan wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata

Pemerintah Kota Surabaya, Dra. Wiwiek Widayati. Melalui wawancara dengan narasumber tersebut, didapatkan informasi yang berharga yang berguna untuk mengembangkan atau memperdalam penelitian ini. Melalui informasi secara *snowball*, didapatkan beberapa informasi penting instansi / pihak yang menangani CSR di Surabaya.

Interaksi dengan Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya dilakukan secara intensif, tidak hanya wawancara dengan Kepala Dinas, tetapi juga beberapa *key person* lainnya di instansi tersebut, antara lain, Sekretaris dan Kepala Bagian. Demikian halnya interaksi dengan Badan Kerja sama Pemerintah kota Surabaya, sebagai perangkat pemerintahan yang secara khusus menangani program CSR, dalam keorganisasian Pemkot Surabaya dinamakan bagian kerja sama, dilakukan wawancara tidak hanya dengan Kepala Bagian, tetapi juga *key person* lainnya di instansi tersebut, yaitu Kepala Seksi Kerja sama Dalam Negeri.

Selain Dinas Pariwisata dan Bagian Kerja sama, narasumber lain di kalangan pemerintahan adalah Badan Perencana Pembangunan Kota (Bappeko) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemerintah Kota Surabaya. Informasi dari Bappeko membantu memperkaya tema penelitian dengan adanya dokumen rencana pembangunan di kota Surabaya, khususnya pembangunan sektor pariwisata. Sementara itu, kajian juga dilakukan di DKP, mengingat dinas tersebut merupakan ikon dan tergolong aktif dalam program CSR.

Di ranah implementasi CSR, studi dilakukan pada Kampung Wisata Jambangan, Museum House of Sampoerna, Kapal Wisata Arthama III milik Pelindo Marine Service yang merupakan anak usaha Pelindo, dan Perusahaan Taksi Blue Bird. Di Kampung Wisata Jambangan, Kepala Kelurahan setempat sangat kooperatif membantu kelancaran studi ini. Melalui penelusuran di destinasi wisata berbasis pemukiman tersebut, diketahui bahwa Pembangkit Jawa Bali (PJB) yang berada di area Ketintang, dekat Jambangan, pernah dan sedang menjalankan program CSR di sana. Selain itu, studi juga dilakukan di Perusahaan Taksi Blue Bird yang dengan caranya yang unik memaknai CSR melalui *campaign* merek kota Surabaya dalam bentuk stiker yang menempel dengan bagus di bagian belakang 5.000 armada taksi elit tersebut.

Situmorang (2011: 32), Cahyadi (2012: 2) dan Olendino (2009: 1) dalam Dartini (2013) mengemukakan model atau pola penyaluran dana CSR yang biasanya dilakukan oleh beberapa perusahaan meliputi:

1. Menjalankan CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan kepada masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, perusahaan bisa menugaskan salah satu staf, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas divisi *human resource development* atau *public relations*.

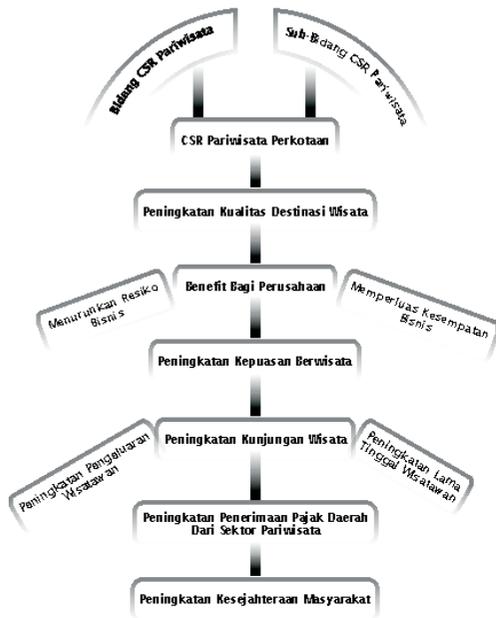
2. CSR bisa pula dilaksanakan oleh yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan atau groupnya. Perusahaan mendirikan yayasan yang terpisah dari organisasi induk perusahaan namun tetap harus bertanggung jawab kepada CEO atau dewan direksi. Model ini merupakan adopsi yang lazim dijalankan di negara maju. Perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin, atau dana abadi yang dapat digunakan untuk operasional yayasan.
3. Sebagian besar perusahaan di Indonesia menjalankan CSR melalui kerja sama atau bermitra dengan pihak lain, misalnya dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, LSM, atau lembaga konsultan baik dalam mengelola maupun dalam melaksanakan kegiatannya.
4. Beberapa perusahaan bergabung dalam sebuah konsorsium untuk secara bersama-sama menjalankan CSR. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota, atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pihak konsorsium yang dipercaya oleh perusahaan yang mendukungnya Akan secara proaktif menjalin kerjasama dengan berbagai kalangan dan kemudian mengembangkan program yang telah disepakati.

Jenis kegiatan CSR pariwisata perkotaan di Surabaya yang diusulkan di bawah ini disusun berdasarkan penggalian data yang diperoleh dari berbagai sumber, yakni, (1) observasi pelaksanaan CSR pariwisata di dalam dan luar Surabaya, (2) wawancara dan focus group discussion dengan pengelola obyek wisata, perusahaan yang beroperasi di ranah pariwisata, (3) desk review dari berbagai sumber terkait, khususnya, Laporan Penelitian “Fasilitasi Pemanfaatan CSR dalam rangka Pengembangan Desa Wisata”, PT Icons Laroiba Mitra, Jakarta, “CSR for Better Life: Indonesian Context CSR untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal” (Maria R. Nindita Radyati, 2008), dan Tesis Dartini (2013) tentang Pengembangan Model Pelaksanaan CSR bidang Pendidikan di Kabupaten Purbalingga.

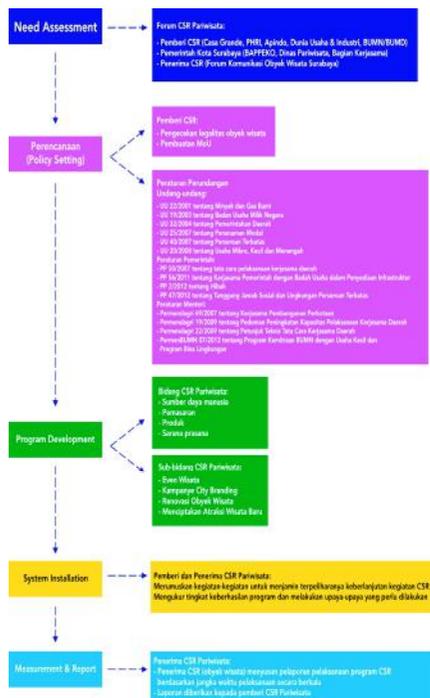
Beberapa bidang yang dapat menjadi fokus kegiatan CSR pariwisata perkotaan di Surabaya: sumber daya manusia, pemasaran, produk dan sarana prasana. Keempat bidang atau aspek tersebut diarahkan seluruhnya pada pengembangan sektor pariwisata. Maka CSR pariwisata perkotaan bertujuan memperkuat kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata, pengembangan strategi dan praktek pemasaran pariwisata, peningkatan kualitas produk dan sarana prasarana sektor pariwisata.

Beberapa prinsip penyaluran Dana CSR pariwisata perkotaan yang dapat diterapkan dalam konteks obyek wisata Surabaya, mengadopsi prinsip penyaluran dana CSR desa wisata adalah sebagai berikut:

1. Mendorong kemandirian penerima aksi CSR, baik obyek wisata maupun dalam bentuk penyelenggaraan suatu even wisata.



Gambar 2. Model CSR Pariwisata.  
Sumber: Data diolah



Gambar 3. Standard Operating Procedure CSR Pariwisata.  
Sumber: Data diolah

2. Berorientasi pada pengembangan SDM
3. Memberdayakan masyarakat
4. Menghindari bantuan secara tunai
5. Mempertimbangkan aspek kemanfaatan yang berkelanjutan
6. Bersifat komunal

7. Transparan, akuntabel dan partisipatif, dan
8. Diberikan melalui seleksi atau evaluasi oleh perusahaan.

Prinsip pelaksanaan CSR di atas sesuai dengan prinsip pelaksanaan CSR secara universal, terdiri dari: akuntabilitas, transparansi, perilaku etis, penghormatan kepada kepentingan *stakeholder*, kepatuhan kepada hukum, penghormatan kepada Norma perilaku internasional, dan penegakan HAM. Melalui studi literatur, wawancara dan observasi lapangan, ditemukan model CSR pariwisata (Gambar 2) dan *Standard Operating Procedure* (SOP) pelaksanaan CSR pariwisata (Gambar 3).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan CSR pariwisata di Surabaya belum banyak dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata, khususnya pemilik/pengelola obyek wisata. Sebagian besar obyek wisata di Surabaya menjadi obyek CSR. Hal ini disebabkan pola pikir bahwa CSR terbatas pada kontribusi dana/materi, keterbatasan dana sebagaimana dialami oleh obyek wisata yang dikelola masyarakat maupun milik Pemerintah Surabaya, dan fenomena empiris bahwa obyek wisata Surabaya lebih layak menjadi obyek daripada subyek CSR.
2. Ada kecenderungan perusahaan yang melakukan CSR di bidang pariwisata sebagai *social response*, karena semata-mata untuk berkontribusi kepada kota Surabaya sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada pemerintah dan masyarakat. Hal ini dapat menjadi modal penting dan contoh yang positif untuk menumbuhkembangkan kuantitas dan kualitas CSR di bidang pariwisata.
3. Dampak pelaksanaan CSR di bidang pariwisata adalah: (1) menumbuhkan atraksi wisata baru yang berkualitas, seperti bus Surabaya Heritage Track, Artama Cruise Ship, dan taman kota, (2) menumbuhkan pergerakan wisata di Surabaya dengan pola *city tourism*, yakni wisata perkotaan yang memadukan peradaban perkotaan dengan warisan sejarah, baik era kolonialisme, perjuangan kemerdekaan maupun kemaritiman.

Saran

Saran yang diajukan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya dibuat *standard operating procedure* (SOP) yang baku dalam proses CSR di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
2. Perlunya inisiatif yang tinggi, khususnya di tataran Kepala Dinas, untuk mengupayakan CSR di bidang pariwisata. Karena itu, perlu dibuat semacam Forum CSR yang beranggotakan perwakilan pemerintah, swasta (dunia usaha) dan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan CSR agar tepat sasaran.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anshori, Yusak & Satrya, Dewa Gde. 2008. *Sparkling Surabaya: Pariwisata dengan Huruf L*. Bayumedia. Malang
- Aries, Erna Febru. 2010. *Design Action Research*. Malang: Aditya Media Publishing
- Dartini. 2013. *Pengembangan Model Pelaksanaan CSR Bidang Pendidikan di Kabupaten Purbalingga*. Tesis. Program Studi Manajemen Pendidikan. Program Pascasarjana. IKIP PGRI Semarang.
- Sofyan, Djalil. *Konteks Teoritis dan Praksis Corporate Social Responsibility*. Jurnal Reformasi Ekonomi. Vol 4, No 1, Januari-Desember 2003. Hal. 3-7
- Kemenparekraf. 2012. *Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Pemanfaatan CSR dalam Rangka Pengembangan Desa Wisata*. PT. Icons Laroiba Mitra
- Myers, Michael D. (2009). *Qualitative Research in Business & Management*. London: SAGE Publication Ltd
- Sri Yunan Budiarsi. *Corporate Sustainability: Melalui Pendekatan Corporate Social Responsibility*. Majalah Ekonomi. Tahun XIV, No. 2 Agustus 2005. Hal.115-133
- Susanto, AB. *Mengembangkan Corporate Social Responsibility di Indonesia*. Jurnal Reformasi Ekonomi. Vol 4, No 1, Januari-Desember 2003. Hal. 8-12
- Radyati, Maria R. Nindita. 2008. *CSR for Better Life: Indonesian Context: CSR untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal (Buku 4)*. Jakarta: Indonesia Business Links

# Keberhasilan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Pacanggaan Kecamatan Pangarengan Sampang

**Triana Dianita Handayani**

STIA "Panglima Sudirman" Surabaya

Email: triana.dianita.h@gmail.com

## ABSTRAK

*Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Desa.*

**Kata kunci:** Kepala Desa, Desa

## ABSTRACT

*The village government is the implementation of government affairs by the Government of the Village and Village Consultative Body to regulate and manage the interests of the local community based on the origin and local customs that recognized and respected by the Government administration system of the Unitary Republic of Indonesia. The village government is the Head of the Village and the Village as an element of the village administration. Village Consultative Body or called by another name, hereinafter abbreviated BPD, is an institution that embodies democracy in village governance as an element of the village administration. To implement the provisions of Article 216 paragraph (1) of Law Number 32 Year 2004 on Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 125, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4437) as amended by Government Regulation in Lieu of Law Number 3 Year 2005 on the Amendment to Law Number 32 Year 2004 on Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2005 Number 38, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4493) that has been established by Act No. 8 of 2005 (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2005 Number 108, State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4548), should be of a Government Regulation On the Village.*

**Key words:** Village Chief, Village.

## LATAR BELAKANG

Desa pacanggaan di kabupaten Pangarengan, dahulu kala segala hasil pertanian seperti beras, jagung, kacang, dan hasil pertanian lainnya di bawa ke pasar untuk di tukar (*Barter*) karena masyarakat butuh kebutuhan lain selain beras seperti contoh ikan, baju serta kebutuhan lainnya.

Desa Pacanggaan merupakan tempat strategis untuk menuju pasar tradisional yaitu pasar Pangarengan, karena tempat lewat para pembawa hasil pertanian oleh para petani, orang Pacanggaan sendiri sering menyanggah mereka yang sedang lewat untuk menukar hasil pertanian mereka untuk menukar atau membeli hasil pertanian tersebut, lama kelamaan orang terbiasa menyebut Panyanggahan, dan pada

akhirnya orang biasa menyebut Pacanggaan karena kata itu lebih gampang disebutnya.

Asal Usul Desa Pacanggaan, kurang lebih 8 tahun yang lalu tergabung dalam wilayah Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang. Namun kira-kira pada tahun 2002 dengan berkembangnya penduduk di adakan pemekaran wilayah yang mana wilayah Pangarengan memiliki kecamatan sendiri.

Adapun desa Pacanggaan di bagi menjadi 4 (empat) dusun, yaitu:

1. Dusun Danan
2. Dusun Nanggung
3. Dusun Asemkerrep
4. Dusun Cangga

Adanya pemekaran wilayah ini, maka menimbulkan sebuah persoalan. Persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun dan menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya untuk mewujudkan pembangunan pemerintahan yaitu mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan. Selain untuk memelihara keabsahan (legitimasi), pemerintah juga akan dapat membawa kemajuan bagi masyarakatnya sesuai dengan perkembangan jaman. Terdapat dua hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. **Pertama**, perlu aspiratif terhadap aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya, dan perlu sensitif terhadap kebutuhan rakyatnya. Pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya serta mau mendengarkan apa kemauannya. **Kedua**, pemerintah perlu melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pemerintah yang efektif adalah pemerintahan yang mampu melibatkan rakyat dalam proses kebijakan publik dan menjadikan rakyat sebagai subjek dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu bentuk kesatuan sistem perencanaan nasional. Hal ini juga terdapat pada Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 33 yaitu:

1. Kepala daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerahnya.
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, kepala daerah dibantu oleh kepala Bappeda.
3. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
4. Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota.

Maka dalam perencanaan pembangunan daerah ini diperlukan adanya partisipasi masyarakat lokal dalam implementasi pembangunan daerahnya. Dengan cara ini pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang di laksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan

untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan.

Dalam perencanaan pembangunan sangat diperlukannya partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan jembatan antara kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat itu, sehingga perencanaan daerah harus dilakukan dengan model dari bawah (*bottom-up planning*) atau yang disebut sebagai perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik langsung maupun tidak langsung). Akan tetapi pada kenyataannya perencanaan itu sendiri masih banyak dilakukan dari atas (*top-down planning*).

Seiring dengan perkembangan jaman dan otonomi daerah, maka Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 33 telah mengalami perubahan menjadi Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2022.

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019.

Dalam Perpres ini disebutkan Pasal 2 Ayat (2), RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2014. RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai:

- a. Pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana strategis;
- b. Bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah;
- c. Pedoman pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- d. Acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJM Nasional.

Selain itu, menurut Perpres ini, RPJM Nasional juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam Perpres ini disebutkan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Nasional (Rencana Pembangunan Jangka

Menengah). Pasal 2 Ayat (2,3) Perpres menyebutkan bahwa Pemantauan dilaksanakan secara berkala, dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJM Nasional.

Demikian halnya dengan desa, pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dalam merencanakan program-program pembangunan. Masyarakat dibina dan dibimbing untuk menyusun rencana program-program pembangunan. Akan tetapi kesadaran masyarakat untuk mau berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan masih sangat kurang. Tidak tahu pasti, apakah dikarenakan kurangnya dukungan dari atas, atautah masyarakat sendiri yang tidak mau berpartisipasi. Dari informasi yang didapat, masih terlihat bahwa masih kurangnya masyarakat yang mau berpartisipasi dalam merencanakan program-program pembangunan. Butuhnya seorang pemimpin yang dapat mempengaruhi dan mengajak masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam merencanakan program-program pembangunan.

Masyarakat mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pembangunan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Peran serta kepala desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik didefinisikan sebagai suatu partisipasi seluruh anggota masyarakat, baik individu, keluarga ataupun kelompok, untuk bersama-sama mengambil tanggung jawab, mengembangkan kemandirian, menggerakkan, dan melaksanakan upaya penyelenggaraan pelayanan publik. Banyak hasil dari program-program penyelenggaraan pelayanan publik yang berlandaskan peran serta masyarakat termasuk program pemerintah desa kurang berkembang bahkan ada yang sudah tidak berlanjut. Hal ini disebabkan karena para petugas lapangan sebagai motivator dari program/proyek tersebut di atas kurang/tidak memberikan dorongan/motivasi kepada masyarakat khususnya kepada kepala desa lebih lanjut secara terus-menerus.

Pemerintah atau swasta yang mempengaruhi keberadaan peran serta masyarakat tidak satu pun yang dapat berkesinambungan. Demikian pula faktor demografi, seperti usia, agama, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan (tingkat ekonomi) dan sebagainya yang merupakan faktor yang tidak dianggap dapat mempengaruhi peran serta masyarakat. Satu-satunya faktor dari masyarakat yang masih mungkin dapat melakukan dorongan/motivasi secara berkesinambungan adalah faktor tokoh masyarakat yang dalam hal ini adalah Kepala Desa.

Peranan kepala desa akan sangat penting apabila mereka aktif untuk mendatangi masyarakat, sering menghadiri pertemuan-pertemuan, dan dalam setiap kesempatan selalu menjelaskan manfaat program pemerintah desa. Para pimpinan masyarakat ini aktif pula dalam mengajak warga masyarakat untuk mengelola kegiatan pemerintah desa.

## MATERI

### Kepemimpinan

Secara mendasar kepemimpinan berarti mempengaruhi orang lain. Ini merupakan definisi yang luas dan termasuk di dalamnya bermacam-macam perilaku yang diperlukan untuk mempengaruhi orang lain. Sebagian besar perspektif kepemimpinan memandang pemimpin sebagai sumber pengaruh. Pemimpin dalam memimpin pada dasarnya mempengaruhi dan para pengikutnya mengikuti sebagai pihak yang dipengaruhi. Pada dasarnya kepemimpinan mengacu pada suatu proses untuk menggerakkan sekelompok orang menuju ke suatu tujuan yang telah ditetapkan/disepakati bersama dengan mendorong atau memotivasi mereka untuk bertindak dengan cara yang tidak memaksa. Dengan kemampuannya seorang pemimpin yang baik harus mampu menggerakkan orang-orang menuju tujuan jangka panjang dan benar-benar merupakan upaya memenuhi kepentingan mereka yang terbaik.

Kepemimpinan adalah kemampuan yang sanggup meyakinkan orang lain supaya bekerja sama di bawah pimpinannya sebagai suatu team untuk mencapai atau melakukan suatu tujuan tertentu.

Keberhasilan seorang pemimpin banyak tergantung dari keberhasilannya dalam kegiatan komunikasi. Seseorang tidak mungkin menjadi pemimpin tanpa punya pengikut. Lebih tinggi kedudukannya sebagai pemimpin, akan lebih banyak pengikutnya. Akan tetapi tidak mungkin ia dapat menaiki anak tangga kepemimpinannya tanpa kemampuan membina hubungan komunikatif dengan pengikut-pengikutnya. Yang sangat penting bagi seorang pemimpin dalam kegiatannya sebagai komunikator ialah adanya faktor daya tarik komunikator dan faktor kepercayaan pada komunikator.

Kepemimpinan kadang kala diartikan sebagai pelaksanaan otoritas pembuat keputusan. Ada juga yang mengartikan suatu inisiatif yang bertindak yang menghasilkan suatu pola konsisten dalam rangka mencari jalan pemecahan dari suatu persoalan bersama.

Gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku (kata-kata dan tindakan) dari seorang pemimpin yang dirasakan oleh orang lain. Seorang pemimpin harus mampu melihat dan memahami orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Dengan menggunakan pengetahuannya tentang hubungan manusia dalam kelompoknya. Seorang pemimpin akan dapat melihat gambaran tentang motif-motif seseorang untuk lebih giat lagi melaksanakan tugasnya. Kegiatan memberi motivasi tersebut tidak akan berhasil apabila pemimpin tidak memiliki cara-cara tertentu untuk melaksanakannya. Cara-cara tertentu inilah yang secara umum disebut dengan gaya. Karena itulah gaya kepemimpinan dapat di lihat dari bagaimana cara membawakan diri sebagai seorang pemimpin dalam menggunakan kekuasaannya.

Gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar, sebagai berikut:

1. Gaya kepemimpinan yang berpola mementingkan pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien, agar mampu mewujudkan tujuan secara maksimal.
2. Gaya kepemimpinan yang berpola mementingkan pelaksanaan hubungan kerja sama pemimpin.
3. Gaya kepemimpinan yang berpola mementingkan hasil yang dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan kelompok atau orang.

Beberapa gaya kepemimpinan yang pada pimpinan hingga kepemimpinan berpusat pada bawahan. Gaya kepemimpinan tersebut diantaranya:

1. **Kepemimpinan otoriter**  
Kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil orang yang di antara mereka tetap ada seseorang yang paling berkuasa. Pimpinan bertindak sebagai penguasa tunggal.
2. **Kepemimpinan demokratis**  
Kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting dalam setiap kelompok/ organisasi. Gaya ini mewujudkan dengan domisili perilaku sebagai pelindung dan penyelamat serta mengembangkan organisasi atau kelompok. Di samping itu mewujudkan juga melalui perilaku kepemimpinan sebagai pelaksana.
3. **Kepemimpinan bebas**  
Tipe Kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otoriter. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol, kepemimpinan dijalankan dengan memberi kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan, pemimpin hanya berfungsi dirinya sebagai penasihat.

Fungsi dari kepemimpinan adalah sebagai pemandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi dan membangunkan motivasi-motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik memberikan supervisi/pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju, sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan.

## Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut

dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Di dalam Peraturan Pemerintah Pasal 63 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 2 disusun secara berjangka meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.

## Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan, baik dengan penghimpunan atau menyumbangkan benda dan uang, pikiran atau ide maupun dengan tenaga atau gotong royong. Intinya adalah agar masyarakat umum ikut serta dengan pemerintah memberikan bantuannya guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat, dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan. Maka secara umum partisipasi dapat diartikan sebagai "pengikutsertaan" atau pengambilan bagian dalam kegiatan bersama.

Ada empat aspek penting dalam rangka partisipasi dalam pembangunan yaitu:

1. Terlibatnya dan ikut sertanya rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara turut menentukan arah, strategi, dan kebijaksanaan dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah. Dalam masyarakat demokratis maka arah dan tujuan pembangunan hendaknya mencerminkan kepentingan masyarakat.
2. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu sebaiknya. Oleh karena

itu pada umumnya pemerintah perlu memberikan pengarahannya mengenai tujuan dan cara-cara mencapai tujuan pembangunan tersebut.

3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi, serta rencana yang telah ditetapkan.
4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang berencana.

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 2004, Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan sebenarnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan dari pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia dan disusun secara sistematis. Suatu perencanaan di buat berdasarkan tujuan yang jelas karena perencanaan tersebut dipergunakan sebagai arah atau pedoman pelaksanaan pembangunan.

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 2004 Perencanaan Pembangunan terdiri atas empat tahap, yaitu:

1. Tahap Penyusunan Rencana
2. Tahap Penetapan Rencana
3. Tahap Pengendalian Rencana
4. Tahap Pelaksanaan Rencana

Tahapan ini semua untuk menjamin tercapai tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang pada rencana kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

Evaluasi pelaksanaan adalah bagian dari perencanaan pembangunan secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian tujuan sasaran dan kinerja pembangunan. Proses perencanaan pembangunan nasional dalam hal perencanaan menurut Jangka waktu di bagi tiga, yaitu:

- a. Rencana pembangunan jangka panjang, yang selanjutnya di singkat dengan RPJP dan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun.
- b. Rencana pembangunan jangka menengah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJM dan dokumen perencanaan untuk 5 tahun. RPJM ini disebut dengan Rencana Strategis Kementrian (Renstra-KL) adalah Dokumen perencanaan Kementrian atau Lembaga untuk periode 5 tahun. Untuk perangkat satuan daerah disebut dengan Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 tahun.
- c. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 tahun. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian atau Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Renja-KL) adalah dokumen perencanaan kementerian atau lembaga untuk periode 1 tahun. Rencana Pembangunan yang disebut dengan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 tahun.

#### METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu: Suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi penyebaran atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antar suatu gejala lainnya dalam masyarakat.

Metode pengumpulan datanya, dengan cara studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan dilakukan dalam dua cara yaitu observasi ke obyek penelitian dan wawancara secara langsung dengan nara sumber representatif dan pihak-pihak yang terkait untuk mengumpulkan keterangan yang lengkap dan terpercaya.

Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala desa dan perangkatnya seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), Sekretariat Desa/PNS, LKMD, PKK dan Karang Taruna

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Pacanggaan merupakan desa yang strategis untuk menuju pasar tradisional yaitu pasar Pangarengan, karena tempat lewat para pembawa hasil pertanian oleh para petani, orang Pacanggaan sendiri sering menyanggah mereka yang sedang lewat untuk menukar hasil pertanian mereka atau membeli hasil pertanian tersebut.

Di desa Pacanggaan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang masih kental dengan adat dan gotong royong serta musyawarah untuk mencapai mufakat, pembangunan itu seperti pembuatan jalan, drainase, plat beton, embung dan lain-lain.

Semakin meningkatnya SDM masyarakat Desa Pacanggaan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang melalui pendidikan yang lambat laun mengalami peningkatan pemikiran mereka untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Masyarakat lebih mengerti arti pentingnya pembangunan sehingga banyak warga yang terlibat dalam pembangunan Desa Pacanggaan meskipun mereka hanya terlibat dalam pengawasan.

Desa Pacanggaan mendapatkan proyek PNPM-MP 2 periode 2 yaitu pada tahun 2013 yang direalisasikan pada sector sarpras berupa pengaspalan, TPT dan juga Plat beton di Dusun Asem Kerrep dan di Dusun Danan, dan pada tahun

**Tabel 1.** Kegiatan Pembangunan 2010–2015

No.	Tahun	Program	Jenis Kegiatan	Jumlah
1	2012	ADD	JALAN TELFORD	600 M
2	2012	ADD	PLAT BETON	3 BUAH
3	2013	ADD	JALAN TELFORD	700 M
4	2013	ADD	PLAT BETON	4 BUAH
5	2013	PNPM	JALAN ASPAL	650 M
6	2013	PNPM	JALAN ASPAL	1200 M
7	2014	ADD	JALAN TELFORD	800 M
8	2014	ADD	TPT	600 M
9	2014	PNPM	PENGASPALAN	650 M
10	2014	PNPM	JALAN TELFORD	1200 M
11	2014	PNPM	PLAT BETON	4 BUAH

Sumber: Data primer Desa Pacanggaan Tahun 2015

ini pembangunan juga di realisasikan pada sarana transportasi berupa pengaspalan dan jalan telford di Dusun Nanggung dan di Dusun Cangga.

Desa Pacanggaan juga mendapatkan dana ADD yang pada tahun ini di realisasikan pada jalan telford di Dusun Nanggung tetapi pembangunan di Desa Pacanggaan belum terlihat secara signifikan karena banyaknya kebutuhan desa dalam hal pembangunan, terlebih lagi dalam sektor kesehatan juga dalam sektor ekonomi yang tidak kalah pentingnya.

Desa Pacanggaan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang memiliki luas wilayah kurang lebih 118.416 m<sup>2</sup> dengan kondisi wilayah yang mayoritas penduduknya bergelut pada sektor pertanian berupa padi, jagung, kacang serta tembakau pada musim kemarau, akan tetapi keadaan hidrologi desa Pacanggaan sangat menguntungkan pada curah hujan yang tidak menentu.

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Pacanggaan adalah pertanian walaupun mereka sebagai buruh tani mencapai 42% di samping itu juga mata pencaharian mereka yaitu Guru Swasta.

Ekonomi masyarakat desa Pacanggaan masih di bawah garis kesejahteraan karena mayoritas masyarakat desa Pacanggaan masih menggeluti pertanian yang masih bersifat tradisional, yang rata-rata penghasilan mereka sangat sedikit, seandainya pemerintah mengadakan pelatihan kepada para petani bagaimana cara bertani yang bagus dapat dipastikan mereka lambat laun akan menambah kesejahteraannya.

**Tabel 2.** Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	1.083 Orang
2	Perempuan	1.067 Orang
3	Kepala Keluarga	693 KK

Sumber: Data primer Desa Pacanggaan Tahun 2015

**Tabel 3.** Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Belum Sekolah	225
2	Usia 7–45 tahun tidak pernah sekolah	65
3	Sekolah SD tapi tidak lulus	35
4	Tamat SD/Sederajat	650
5	Tamat SLTP/Sederajat	375
6	Tamat SLTA/Sederajat	180
7	Tamat D1, D2, D3	45
8	Sarjana/S1	17
9	Pernah kursus	75

Sumber: Data primer Desa Pacanggaan Tahun 2015

**Tabel 4.** Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	Petani	500
2	Buruh Tani	800
3	Buruh Swasta	25
4	Pegawai Negeri sipil	14
5	Guru Negeri	15
6	Guru Swasta	200
7	TNI / Polisi	5
8	Pedagang	35
9	Tukang Kayu / Batu	60
10	Peternak	30
11	Karyawan Swasta	45
12	Montir	5
13	Perawat / Bidan	8
14	Dokter	5
15	Supir	14
16	Penjahit	18
17	Pengrajin	2
18	Jasa Angkut	6
19	Pensiunan	18

Sumber: Data primer Desa Pacanggaan Tahun 2015

Kenyataan membuktikan bahwa seorang Kepala Desa dalam menjalankan peranannya sebagai seorang pemimpin menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut sering menjadi pemicu ketidakberhasilan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Jika teknik-teknik kepemimpinan tersebut telah dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan baik, maka kapabilitas Kepala Desa sebagai seorang pemimpin dapat tercapai. Sehingga nantinya akan menjadi pendorong bagi peningkatan kinerja pamong desanya. Didorong oleh kinerja yang memadai dari setiap pamong desa, maka tujuan organisasi dapat dicapai secara berdaya guna.

Di dalam melaksanakan pembangunan desanya masyarakat Desa Pacangaan melaksanakan dengan cara kerja sama pelaksanaan proyek-proyek pembangunan fisik desa dilaksanakan dengan cara gotong royong. Kegiatan gotong royong tersebut dilaksanakan dengan suatu kewajiban sehingga dilakukan dengan sadar dan penuh tanggung jawab di antara warga masyarakat. Oleh karena itu usaha-usaha untuk membangun desanya selalu ditingkatkan segala upaya dilaksanakan guna pembangunan desanya. Dengan demikian warga Desa Pacangaan akan terlihat dalam kegiatan melalui pengorbanan tenaga dan bantuan berupa moril maupun materil.

Keberhasilan Pembangunan Desa (Fisik Desa) Pacangaan masih terbatas, sementara tuntutan dan kebutuhan dari masyarakat semakin mendesak.

Pada periode tahun 2010/2015 Desa Pacangaan memperoleh keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan fisik Desa diantaranya:

1. Pengaspalan jalan  
Yaitu melakukan pengerasan jalan yang berhasil dilakukan di Kampung Danan
2. TPT ( Tembok Penyanggah Tebing )  
Yaitu pembuatan tepi-tepi jalan agar kelihatan rapi, hal ini dilakukan di kampung Asem kerrep
3. Pembuatan saluran air sebagai sarana irigasi
  - a. Pembuatan gorong-gorong di kampung Cangga
  - b. Pembuatan saluran air di Kampung Nanggung
4. Rehabilitasi pagar yaitu termasuk:
  - a. Pembuatan pagar makam di Kampung Cangga
  - b. Pembuatan gardu ronda di Kampung Danan
  - c. Pembuatan Musholla di Kampung Asem kerrep

Untuk mengetahui sampai di mana tingkat keberhasilan pembangunan fisik desa berikut keberhasilan pembangunan fisik desa pada periode 2005–2010 dan periode tahun 2010–2015.

Untuk mengetahui sampai di mana tingkat keberhasilan pembangunan fisik desa berikut keberhasilan pembangunan fisik desa pada periode 2005–2010 dan periode tahun 2010–2015.

Jika diperhatikan dari kedua table diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada periode 2010–2015 terjadi peningkatan pembangunan, hal ini tidak lepas dari peranan kepala desa untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan dari periode sebelumnya.

Kegiatan yang dilakukan kepala desa Pacangaan dalam usaha peningkatan pembangunan fisik desa adalah:

1. Menyusun rencana pembangunan desa atas usulan dari warga desa melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat.
2. Untuk memudahkan kegiatan pelaksanaan pembangunan, maka kepala desa membicarakan atau memberikan bantuan sebagai pendorong atau motivasi dalam pelaksanaan pembangunan. Masyarakat bias ikut serta

**Tabel 5.** Dana Bantuan Pembangunan Fisik

No	Jenis Keberhasilan	Jumlah	Bantuan
1	Pengaspalan	500 m	Rp. 100.000.000
2	Jalan aspal	500 m	Rp. 100.000.000
3	Plat Beton	6 Buah	Rp. 9.000.000
4	Jalan Telford/Makadam	700 m	Rp. 70.000.000
5	TPT	600 m	Rp. 120.000.000
Jumlah			Rp. 399.000.000

Sumber: Data primer Desa Pacangaan Tahun 2015

**Tabel 6.** Keberhasilan Pembangunan Desa (fisik) Tahun 2010–2015

No.	Jenis Keberhasilan	Jumlah	Bantuan
1	Pengaspalan	700 m	Rp. 240.000.000
2	Jalan aspal	600 m	Rp. 220.000.000
3	Plat Beton	10 Buah	Rp. 25.000.000
4	Jalan Telford / Makadam	700 m	Rp. 90.000.000
5	TPT	700 m	Rp. 230.000.000
Jumlah			Rp. 805.000.000

Sumber: Data primer Desa Pacangaan Tahun 2015

- dalam membicarakan batasan pembangunan desanya serta kendala -kendala di dalam
3. Melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pembangunan dan mencegah terjadinya penyelewengan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan.

#### SIMPULAN

Keberhasilan pembangunan desa tergantung peranan kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat. Kepemimpinan yang bijaksana dan semangat kerja yang optimal akan menjadikan desa yang maju, masyarakat yang tentram dan memberi lapangan kerja pada masyarakat.

Fungsi kepemimpinan kepala desa adalah sebagai pemandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi dan membangunkan motivasi-motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik, memberikan supervisi/pengawasan yang efisien, dan membawa masyarakatnya kepada sasaran yang ingin dituju, sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan.

Kepala desa hendaknya mensosialisasikan dulu pada masyarakat tentang program-program yang akan dicapai atau yang telah diusulkan oleh masyarakat, sebelum diadakan rapat penyusunan rencana pembangunan dan menampung

seluruh aspirasi warganya serta memberi jawaban agar masyarakat merasa haknya diperhatikan.

Kepala desa harus mampu mengajak dan mempengaruhi warganya agar kreatif dan berpartisipasi aktif di dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan desa Hasil-hasil fisik desa yang sudah di capai harus ditingkatkan lagi cara pemeliharaannya serta digunakan bersama-sama karena hasil-hasil pembangunan itu milik seluruh warga desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bintoro, Tjokromijojo. *Pengantar Administrasi Pembangunan LP3ES*. Cetakan ke-4. 1991.
- George, R Terry. *Principle of Management*. Edisi ke-6 Home Work 11 Lions. 1987.
- Kartini, Kartono. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Rajawali: Jakarta. 1993.
- Mifra, Toha. *Konsep dan Strategi Kepemimpinan*. Rajawali: Jakarta. 2005.
- <http://kepemimpinan-fisipuh.blogspot.com/2009/03/Definisi-Kepemimpinan.html>. Diakses April 2012.
- <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2235640-Definisi-Desa/>. Diakses April 2012.
- Hadi, Sumarno. *Pemerintahan Daerah*. Liberty: Yogyakarta. 2010.
- Sutomo. *Pembangunan Masyarakat*. Liberty: Yogyakarta. 2005.
- Koentjoroningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia: Jakarta. 2005
- Lembaran Desa Pacangaan. 2014.
- Laman Setkab, Kamis (15/12/2014).
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019.

# The Speech Act Analysis of the Recorded Conversation Between Artalyta and Top Prosecutor

Supeno

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## ABSTRACT

*Austin believed that humans communicate, they do three kinds of actions. It means that every utterance we produce when we are doing communication can be analysed by means of using speech act theory. This paper tries to analyse the recorded conversation between Artalyta and Top Prosecutor. The Speech Act Theory proposes three kinds of acts which are simultaneously performed (1) locutionary act, (2) illocutionary act, (3) perlocutionary act. A locutionary act refers to the utterance of a certain sentence with determinate sense and reference, which is roughly equivalent to meaning in the traditional sense, i.e., act which is the art of saying something in the full sense of 'say'. This is the literal meaning or what is linguistically stated. An illocutionary act refers to the making of a statement, offer, promise, etc. In uttering a sentence, by virtue of a certain (conventional) force associated with it (or with its explicit performative paraphrase). A perlocutionary act refers to the bringing about of the effect on the audience by means of uttering the sentence, such effects being special to the circumstances of utterance (Couthard, 1977:17). The locutionary act has a meaning, the illocutionary act has a certain force in saying something; the perlocutionary act is the achieving of certain effects by saying something. Thus, someone utters sentences with a particular meaning, and with a particular force, in order to achieve a certain effect on the hearer. In analysing the data, the recorded conversation between Artalyta and Top Prosecutor has been divided into three fragments and every fragment was analysed from the viewpoint of locutionary act, illocutionary and perlocutionary. Based on the result of the analysis, the writer can conclude as follows: 1) the utterances produced by the speakers in the conversation contain direct and indirect speech, 2) Most of utterances are dominantly classified into declarative and interrogative and 3) three kinds of acts are simultaneously occurred.*

**Key words:** *speech act, recorded conversation, locutionary act, illocutionary act, perlocutionary act*

## INTRODUCTION

Speaking a language is engaging in a rule-governed form of behavior. It is performing speech acts, acts such as making statements, giving commands, asking questions, making promises, and so on; and more abstractly, acts such as referring and predicating; and secondly, that these acts are in general made possible by and are performed in accordance with certain rules for the use of linguistic element. (Searle, 1969:16). There are many definitions of speech acts. Yule (1996:47) states action performed via utterances are generally called speech acts and in English, are commonly given more specific labels, such as apology, complaint, compliment, invitation, promise, or request. Many linguistic theories take their premises in some rather simple-minded assumptions about human language: that it is nothing but a combination of "sound meaning" (thus in most descriptive grammars), or that language can be defined as asset of correct sentences (thus in most generative-transformational thinking). The basic flaw in these theoreticians' conceptualizations is their disregard of language as action, an action which produces 'speech acts', as they have come to be called with a somewhat infelicitous but by now well-entrenched terminology (infelicitous, because 'speech' connotes the oral medium of language production – by no means the only medium in which 'speech acts' may occur). Speech acts theory argues that the basic minimal unit of linguistic communication is not the symbol, word, or sentence, or even the token of symbol,

word, or sentence, but rather the production of issuance or the symbol, or word, or sentence in the performance of the speech acts. These include, for example, making statements, giving commands, asking questions, making promises, and so on. More precisely, speech acts are the basic or minimal unit of linguistic communication (Searle, 1969:16). The central insight of speech acts is that we use language to do things. Speech act theory, as a theory, which tries to see the relationship between language and acts done by the speaker, views language primarily as a medium of communication. Language is meaningful if it is used in a real activity to communicate.

Austin (1978), the developer of speech act theory, cited in Couthard (1977: 17–18) isolates three basic senses in which to say something one simultaneously may do something, or in saying something one does something, and therefore three kinds

of acts are simultaneously performed (1) locutionary act, (2) illocutionary act, (3) perlocutionary act. A locutionary act refers to the utterance of a certain sentence with determinate sense and reference, which is roughly equivalent to meaning in the traditional sense, i.e., act which is the art of saying something in the full sense of 'say'. This is the literal meaning or what is linguistically stated. An illocutionary act refers to the making of a statement, offer, promise, etc. In uttering a sentence, by virtue of a certain (conventional) force associated with it (or with its explicit performative

paraphrase). A perlocutionary act refers to the bringing about of the effect on the audience by means of uttering the sentence, such effects being special to the circumstances of utterance (Couthard, 1977:17). The locutionary act has a meaning, the illocutionary act has a certain force in saying something; the perlocutionary act is the achieving of certain effects by saying something. Thus, someone utters sentences with a particular meaning, and with a particular force, in order to achieve a certain effect on the hearer.

Hurford & Heasley (1986:24) state that an utterance describes aspects and affairs of the world as well as carries out socially significant acts. As a matter of fact, they further point out that a part of the meaning or an utterance is what that utterance does. Robins, meanwhile, adds that the view of meaning as the notion of speech acts varies in the sentences type, as declarative, interrogative, and imperative sentences (1992:27). Robins further clarifies that a declarative sentence carries out a typical linguistic act of asserting and describing; and interrogative sentences carries out a typical linguistic act of asking or requesting; whereas an imperative sentence carries out a typical linguistic act of ordering. Meanwhile, Searle ends up his establishing of the speech act theory into the five categories, which covers: representative, directives, commissives, expressive, and declaration (1969:14). Mey, meanwhile, categories the speech acts into five in the order: representatives (assertives), directives, commissive, expressive, and declarative. (1993: 164–6).

The reason for concentrating on the study of speech acts is simply this: all linguistic communication involves linguistic acts. The unit of linguistic communication involves linguistic acts. The unit of linguistic communication is not, as has generally been supposed, the symbol, word or sentence, or even the token of the symbol, word or sentence, but rather the production or issuance of the symbol or word or sentence in the performance of the speech act. In this paper, recorded conversation between Artalyta and Kemas Yahya, a deputy attorney general for special crime, is analyzed. This paper only discusses the kinds of speech acts: locutionary, illocutionary and perlocutionary acts performed by Artalyta and Kemas

#### SPEECH ACT THEORY

Before the present century, people were not attentive to the fact that each utterance human's produce was followed by an action. They thought action was different from utterance and utterance had no impact to the action. As Aristotle said in the first chapter of his work, *De interpretatione*,

Every sentence is significant [...], but not every sentence is a statement-making sentence, but only those in which there is truth or falsity. There is not truth or falsity in all sentences: a prayer is a sentence but is neither true nor false. The present investigation deals with the statement-

making sentence; the others we can dismiss, since consideration of them belongs rather to the study of rhetoric or poetry. (17 a 1-5, Edghill translation)

(Taken from <http://ontology.buffalo.edu/smith/articles/speechact.html> on December 15th, 2007)

From what Aristotle said, statement-making sentence should have truth or falsity. The other utterance was not as significant as the statement-making sentence and it was classified as rhetoric or poetry.

People believed this statement for many years until Austin and Searle gave another point of view. Austin, firstly, put attention to what he called "explicit performative utterance". The utterance "I nominate..." or "I pronounce you..." are the examples of performative utterance. Austin, then, realized that there was other kind of utterance that had equal function as performative, which is constative. Not like the performative which is used to state either truth or falsity, constative usually deals with statement that is used to declare someone's feeling or opinion towards something.

These two kinds of utterance, further called types of speech acts, helped Austin to recognise that there was a difference between what was said and what one did in saying it. This recognition developed into a theory which he called speech acts theory. In brief, speech acts theory states that words convey information, people do exploit words more than deliver information only, and the delivery of information contains more than what people said encode (<http://online.sfsu.edu/~kbach/spchacts.html> on December 15th, 2007). Searle says "In a typical speech situation involving a speaker, a hearer and an utterance by the speaker, there are many kinds of acts associated with the speaker's utterance" (1971: 39).

Austin believed that when humans communicate, they do three kinds of actions, locutionary, illocutionary and perlocutionary acts.

#### 1. Locutionary Act

Locutionary act means the act of saying something. This locutionary act exists in the speaker's mind as his intention when he produces certain utterance. Levinson (1983: 236) says, "Locutionary act is the utterance of a sentence with determinate sense and reference". This act is done by the speaker and referred to the hearers. Levinson added his explanation about locutionary act by saying the locutionary act appears that the three basic – sentence types – declarative, imperative and interrogative are universal – all languages appear to have at least two and mostly three of these (1983: 242). The explanations of these types of sentences are as follow:

##### (a) Declarative Sentence

The syntax of declarative sentence is a vast topic, and we can do little more than touch briefly on certain of its fundamental aspects. They are sentences that present a

predicate and with or without more phrase adjuncts. They are closer to assertion and description.

e.g.: Lady at ticket office in railway station: "I'd like a day return to Morecambe, please" (Hurford & Heasley, 1983).

(b) Imperative Sentence

Imperative sentence are said over the person who has some voluntary control. They tend to be restricted to sentences with second – person subjects and active verbs. They are closer to order or request.

e.g.: Mother to child who is eating untidily: "Look at the mess you've made under your chair!" (Hurford & Heasley, 1983)

(c) Interrogative Sentence

There are two basic kinds of interrogative sentences:

- a. Alternative questions; those that ask which of two or more alternative propositions are true.
- b. Specification question; those that ask for the further specification of some constituent. E.g.: Speakers at a meeting on a hot political issue: "Is it right to condone snuggery?" (Hurford & Heasley, 1983)

## 2. Illocutionary Act

The illocutionary act, what one does in saying it, is the utterance the speaker says based on what he has in mind. Levinson (1983: 236) says that illocutionary act is the making of a statement, offer, and promise in uttering a sentence, by virtue of the conventional force associated with it (or with its explicit performative paraphrase). Each sentence produced by speaker has either implicit or explicit meaning that will give effect to the listeners. Searle is the person developing Austin's speech act theory into further step. He classified utterances into five basic categories of actions. They are (Taken from <http://online.sfsu.edu/~kbach/spchacts.html> on December 22nd, 2007):

(a) Representative

Which commit the speaker to the truth of expressed proposition (paradigm cases: asserting, concluding, etc).

e.g.: "The world is flat" (Levinson, 1983: 252)

The locutionary force is to be careful on the edge of the world or you will fall into the space.

(b) Directive

Which is endeavoured by the speaker to get the addressee to do something (paradigm cases: advising, admonishing, asking, begging, dismissing, excusing, forbidding, instructing, ordering, permitting, requesting, requiring, suggesting, urging, warning).

e.g.: "After you" (Hurford & Heasley, 1983: 245)

The illocutionary force is to make the hearer to go first.

(c) Commissive

Which commits the speaker to some future course of action (paradigm cases: agreeing, guaranteeing, inviting, offering, promising, swearing, and volunteering).

e.g.: "Would you like a cup of coffee?" (Hurford & Heasley, 1983: 245)

The illocutionary force is to ask the hearer to wait at the current place.

(d) Expressive

Which expresses a psychological state (paradigm cases: apologizing, condoling, congratulating, greeting, thanking, accepting (acknowledging an acknowledgment)).

e.g.: "I'm awfully sorry I wasn't at the meeting this morning" (Hurford & Heasley, 1983: 245)

The illocutionary force is to ask for forgiveness to the hearer.

(e) Declarative

Which affects immediate changes in the institutional state of affairs and which tend to rely on elaborate extra – linguistic institutions (paradigm cases: excommunicating, declaring war, christening, firing on employment).

e.g.: Curate: "Wilt thou have this woman to thy wedded wife ... and, forsaking all other, keep thee only unto her, so long as ye both shall live?"

The illocutionary force is the bride and groom from now on can do the family life.

## 3. Perlocutionary Act

The perlocutionary act or what one does by saying it represents the hearer's response towards what the speaker just uttered. The other meaning of perlocutionary act is the bringing about of effects on the audience by means of uttering the sentence, such as effects being special to the circumstances of utterance (Levinson, 1983: 236). In brief, perlocutionary act is the effect of an utterance to the hearer. The effect may appear in the form of verbal or non – verbal perlocutionary act.

e.g.: Verbal perlocutionary act:

Policeman to a man on the street: "Good evening, Sir. Do you live around here?"

Man: (says aggressively and walks on) "it's none of your business"

Non – verbal perlocutionary act:

Someone says, "There's a hornet in your left ear". The hearer of that utterance may be panic, screaming or scratching wildly at the ear (Hurford & Heasley, 1983: 243)

The utterances, human's produce, however, are not as simple as a child. One utterance can be interpreted differently between the speaker and the hearer or even among the hearers when there is more than one hearer. The acts of saying something can be grouped into two category; direct speech acts and indirect speech acts.

Searle, however, criticized Austin's speech act theory, 'the problem posed by indirect speech acts is the problem of how it is possible for the speaker to say one thing and mean that but also to mean something else' (Searle 1975, p 60).

The speech act, itself, contains two parts direct and indirect. Briefly, direct speech act is the act of saying something without hidden intention – what is being said is what is being meant – while the indirect speech act is conveying other motive when something is said. Here comes one example of direct and indirect speech acts;

A: Don't you think this room is too hot?  
 B: Yes, it is.

The conversation between A and B is called direct speech act as long as A's intention is only to confirm whether B feels the same as A felt. The conversation, however, can be indirect speech act also if A wants B to do something to reduce that room's heat. This kind of utterance is Searle complained about. It is difficult even almost impossible to understand what each utterance means.

**DISCUSSION**

Speech Acts Analysis of recorded conversation between Artalyta and Kemas, deputy attorney general for special crime.

The conversation took place on March, 1 2008 at 1 pm, before Artalyta arrested By KPK (Corruption Eradication Commission) investigators:

**Fragment 1**

Topic: The announcement of halting the BLBI case

Kemas (K) : *Halo...* (Hello)  
 Artalyta (A) : *Halo... ya, siap* (Hello...I'm ready)  
 K : *Sudah dengar pernyataan saya? He... he...he....* (Did you hear my statement?)  
 He...he...he... (Laugh)  
 A : Good, very good

K : *Jadi, tugas saya sudah selesai* (So, I've done my job)  
 A : *Siap. Tinggal ini...*(Yes, there's only one thing left...)  
 K : *Ya, udah jelas, gamblang. Tidak ada permasalahan lagi.* (Yes, it's all clear, no more problem)  
 A : *Bagus itu* (It's good)

**Fragment 2**

Topic: it's about the news released in Rakyat Merdeka

K : *Tapi saya dicaci maki* (But I was scolded)  
 A : *Ya...(yes...)*  
 K : *Baca Rakyat Merdeka nggak?* (Did you read "Rakyat Merdeka"?)  
 A : *Ah, Rakyat Merdeka mah nggak dibaca, nggak usah dibaca* (No, I didn't read, no need for you to read it, either).  
 K : *Katanya, saya mau dicopot. Ya, jadi begitu ya?* (It was said that I would be fired.)

**Fragment 3**

Topic: Kemas and Ayin talked about Bank Bali Case

A : *Sama ini, Bang. Saya mau informasiin masalah si Joker* (One more thing, I'd like to inform about the joker)  
 K : *Ya, itu nanti-nanti* (yes, it can be done later)  
 A : *Nggak, itu kan saya ditugasin, Bang.* (No, that's my job, Bang)  
 K : *Nanti-nanti. Ada cara lain nanti. Tenang aja. Gampang* (it can be done later, there's another way later, just relax, that's easy)  
 A : *Hari Selasa ya nanti saya ke ...* (Yes, on Tuesday, I'll go to.....)

Utterance	Locutionary	Illocutionary	Perlocutionary
1. K: Did you hear my statement? Hee...hee	Kemas told Ayin that he publicly exposed the halt of BLBI case	He wanted to show that he had the authority to drop the case or not	Ayin is preparing something as a token of gratitude
2. A: Good, very good	Ayin was delighted and fully satisfied with Kemas statement	She is convinced that Syamsul Nursalim, her boss, will be free from the graft case.	Kemas felt encouraged for her high appreciation.
3. K: So. Mission accomplished	He had accomplished his mission which is not impossible.	He wanted to show that his promise to Ayin had been fulfilled.	Ayin was asked to give something as a compensation
4. A: I am ready, what is left is only....	Ayin fascinated She is going to give something to Kemas.	Kemas was pleased with her statement	Kemas expected the gratification from her while he is thinking more about another case
5. K: Yes, it's clear, obvious. There's no problem at al	The BLBI case is closed	He convinced Ayin that the case which involved the tycoon Syamsul Nursalim was not problem any longer	Ayin is getting relax for his delightful service.

Utterance	Locutionary	Illocutionary	Perlocutionary
K: But I was scolded	He was scolded and was going to be removed from his post as a deputy attorney general for special crimes. It's a rumor or gossip	He asked for sympathy from Ayin related to risky announcement	Ayin is forced to give than it should be
A: Ye	It was a kind of spontaneously response	Ayin was giving empathy to him	Kemas was delighted for her response
K: Did you read "Rakyat Merdeka"	He asked Ayin if She read the Newspaper	He asked Ayin to read it	Ayin's response contradicted to what he expected
A: Ah..I didn't read it, no need for you to read it, either	She said that she didn't read it	She suggested to him not to read it to avoid being annoyed	Kemas didn't expect to get more money
K: according to the news, I am going to be removed	He informed that he would be removed by his post	He expected sympathy from Ayin related to his statement	Ayin was urged to increase the bread.
A; That's so, Okey	She expressed her feeling of sympathy	She pleased him by saying so	Kemas was satisfied with her response

Utterance	Locutionary	Illocutionary	Perlocutionary
A: I 'd like to inform about the joker' problem	Ayin wanted to inform Kemas about the joker's problem	She asked Kemas to handle Bank Bali case	Kemas would handle Bank Bali case
K: yes it can be done later	Kemas promised to handle the problem later	He asked Ayin not to talk about it	Ayin would postponed talking about the case
A: no that's my job, Bang	Ayin told Kemas that it was her job	Kemas had to help her to handle the case	Kemas helped her
K: it can be done later, there is another way, just relax, that's easy	Kemas tried to find an alternative way to solve the case problem	He wanted to end the conversation immediately	Ayin ended the conversation because Kemas was worried about being taped
A: well, I think	Ayin insisted talking about the joker	Kemas would handle the case	Kemas was willing to continue talking about the case
K: so, it has been announced, there'll be another reason, don't worry I have planned it	Kemas informed Ayin that there will be a plan to solve the problem	He avoided continuing the conversation	Ayin ended he conversation

K : *Gak usah, nanti-nanti. Gampang. Saya juga ada pesan dari sana, sudah...* (It is not necessary, it can be done later, that's easy, I also get a message from him, okay....)

A : *Iya sudah. Kan begini, Bang ...* (well, I think.....)

K : *Jadi begini, kan sudah diumumkan, ada alasan lain nanti. Sudah dalam ini, dalam perencanaan.* (So, it has been announced, there'll be another reason, don't worry I have planned it)

#### CONCLUSION

Speech act is an act that a speaker performs when making an utterance. It consists of three kinds: locutionary, illocutionary, perlocutionary acts. Locutionary act is the act of saying something, while illocutionary act is what one does

in saying it. Perlocutionary act produces an effect intend or not, achieved in addressee by a speaker's utterance.

Based on the analysis of speech act on the recorded conversation between Artalyta or Ayin and Deputy Attorney General for Special Crimes, the writer can conclude some points as follows:

1. The conversation is typical of many everyday interaction in which it serves locutionary act, illocutionary act and perlocutionary act.
2. The utterances produced by the speakers in the conversation contain two parts: direct and indirect speech.
3. Most of the utterances are dominantly classified into declarative and interrogative.
4. Often one utterance will say something one does something and therefore three kinds of acts are simultaneously occurred.

**REFERENCES**

- Austin JL. 1962. *How to Do Things with Words*. Oxford: Clarendon Press
- Hurford JR & Heasley B. 1983. *Semantics: A Course Book*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Levinson, Stephen C. 1983. *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Searle JR. 1979. *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Oxford: Oxford University Press.
- <http://ontology.buffalo.edu/smith/articles/speechact.html> on December 15th, 2007.
- <http://online.sfsu.edu/~kbach/spchacts.html> on December 15th, 2007